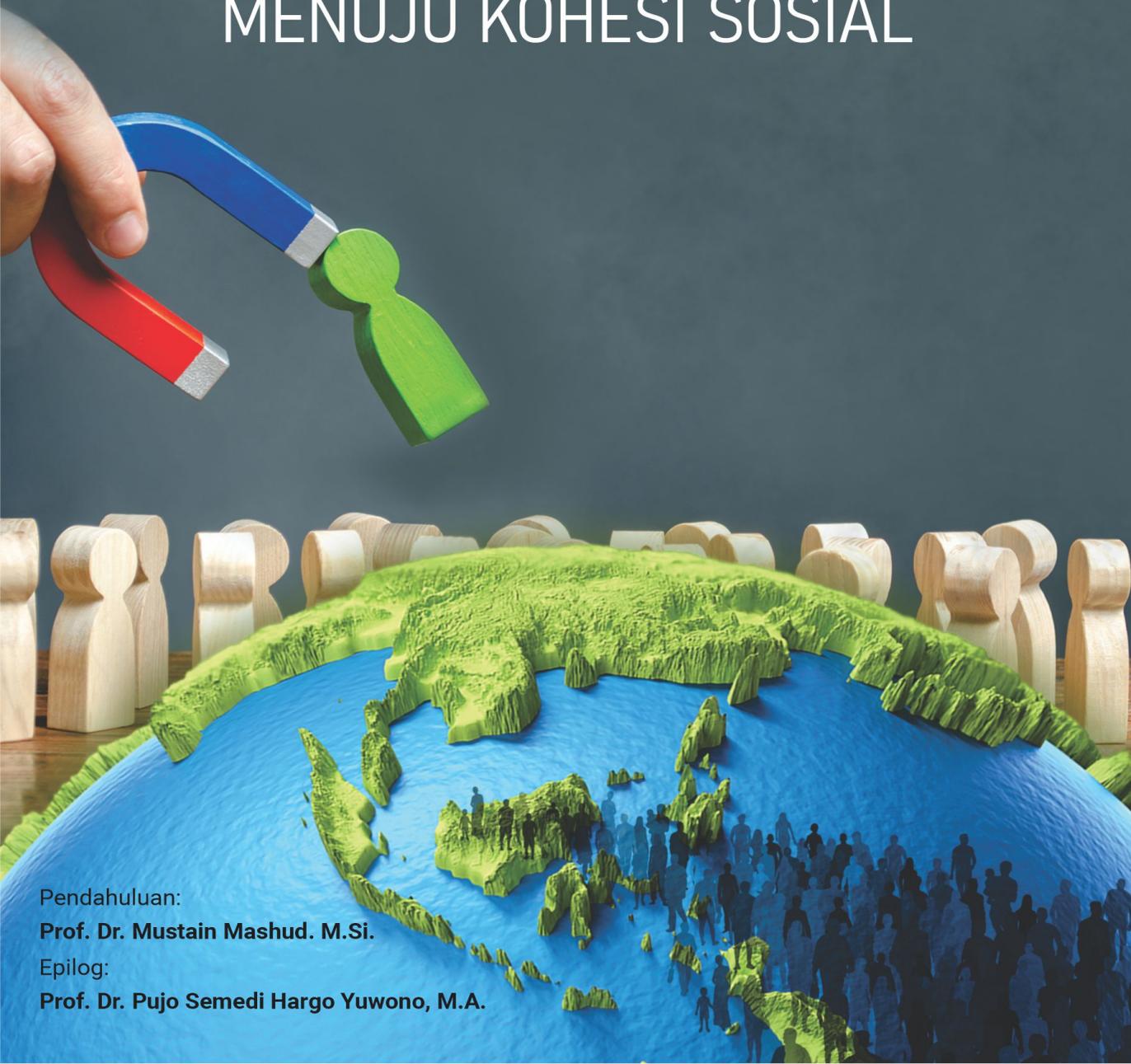


Dr. Ibrahim Chalid. M.Si.



TRANSMIGRASI:

DARI DIFERENSIASI
MENUJU KOHESI SOSIAL



Pendahuluan:

Prof. Dr. Mustain Mashud. M.Si.

Epilog:

Prof. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A.

**TRANSMIGRASI:
DARI DIFERENSIASI
MENUJU KOHESI SOSIAL**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Peggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Peggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TRANSMIGRASI: DARI DIFERENSIASI MENUJU KOHESI SOSIAL

Dr. Ibrahim Chalid, M.Si.



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

TRANSMIGRASI: DARI DIFERENSIASI MENUJU KOHESI SOSIAL

Ibrahim Chalid

Editor :

Bisma Yadhi Putra, Mujiburrahman & Muh. Fahrudin Alawi

Desain Cover :

Syaiful Anwar

Sumber :

www.shutterstock.com

Tata Letak :

T. Yuliyanti

Proofreader :

A. Timor Eldian

Ukuran :

xii, 160 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-6439-9

Cetakan Pertama :

April 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial.***

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, Dr. Ibrahim Chalid. M.Si., yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, kalimat pertama yang penulis ucapkan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Karena atas izin Allah yang maha kuasa, buku yang berjudul **Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial** ada di tangan pembaca. Melalui buku yang ada di tangan pembaca, penulis ingin mengupas transmigrasi tidak hanya dalam perspektif kependudukan. Karena normalnya, ketika berbicara mengenai transmigrasi melulu terkonsentrasi pada pemerataan penduduk, mengurangi kepadatan penduduk. Transmigrasi juga dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, dan pengurangan pengangguran. Bahkan ada konsep yang menilai bahwa transmigrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan. Pada era Orde Baru (orba), transmigrasi dipandang tidak hanya soal demografi semata. Melainkan Orba memiliki cara pandang yang mulai bergeser dari konsep demografi ke persatuan. Orba menilai transmigrasi formula peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional.

Melalui karya ini penulis ingin menjelaskan transmigrasi dari konsep yang berbeda. Penulis melihat bahwa transmigrasi adalah percaturan strategis yang dilakukan oleh Negara untuk kepentingan penguasaan. Penulis menilai bahwa, transmigrasi sebagai tindakan ekspansi terhadap wilayah. Transmigrasi tidak selalu berbicara mengenai demografi, demografi hanya balutan luar yang memiliki tujuan ekspansi wilayah untuk kepentingan penguasaan.

Transmigrasi jembatan yang paling efektif dalam melakukan ekspansi ke relung-relung kebudayaan dan sendi-sendi sosial di

suatu wilayah. Transmigrasi alasan yang paling legal oleh pemerintah untuk mensubsitusikan penduduk ke dalam komunal yang memiliki struktur sosial dan budaya yang berbeda. Dimana kebijakan ini berakhir pada pertarungan antar solidaritas entitas yang difasilitasi Negara melalui transmigrasi. Transmigrasi berkemampuan melahirkan kesenjangan baru pada daerah atau wilayah sasaran transmigrasi. Transmigrasi potensial menjadi pemantik bara konflik yang terus membesar menjadi api yang akan membakar pranata sosial pada suatu wilayah. Transmigrasi juga memfasilitasi konflik agraria, karena sebagaimana diketahui bahwa penambahan penduduk pasti, akan tetapi luasan wilayah tidak pernah bisa bertambah. Karena transmigrasi pasti menghadirkan agenda pembukaan lahan baru dan penggunaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian yang berdampak pada munculnya persaingan sumber daya yang dapat menyebabkan konflik antara penduduk asli dan pendatang baru.

Transmigrasi acap kali dijalankan tanpa mempertimbangkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan merugikan kepentingan masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik. Ditambah lagi pemahaman yang tidak memadai pendatang terhadap adat dan budaya lokal dapat memicu ketidakpuasan dan konflik antara penduduk asli dan pendatang baru. Kemudian transmigrasi sering kali dijalankan tanpa menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi. Artinya jumlah penduduk bertambah secara spontanitas melalui transmigrasi, sementara sarana layanan tidak bertambah. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.

Transmigrasi di Aceh memang telah menjadi sumber konflik dan masalah sosial budaya yang kompleks pada masa lalu. Kehadiran pendatang transmigran yang memiliki latar belakang budaya dan bahkan mungkin agama yang berbeda dengan masyarakat lokal, serta persaingan sumber daya. Baik sumber daya penggunaan lahan pertanian, maupun persaingan sumberdaya manusia itu sendiri, telah menimbulkan gesekan di antara penduduk asli dan pendatang. Gesekan-gesekan multi dimensi ini telah mendorong terjadi akumulasi yang kemudian meledak menjadi konflik. Transmigrasi telah menjadi medan konflik baru dalam ekosistem sosial di Aceh. Akumulasi dari semua irisan sosial tersebut menjadi sentimen sosial antara transmigrasi dan penduduk setempat. Akhirnya wilayah yang didiami oleh transmigrasi akan menjadi arena ketagangan. Oleh karenanya disebutkan bahwa transmigrasi adalah senjata tanpa peluru.

Transmigrasi di Aceh memperburuk hubungan antara Aceh dengan negara. Kehadiran pendatang transmigran yang tidak memahami adat dan budaya yang kemudian dinilai tidak menghargai adat dan budaya Aceh serta persaingan sumber daya seperti penggunaan lahan pertanian memicu konflik antara pendatang transmigran dan penduduk asli Aceh. Konflik ini kemudian dimanfaatkan oleh gerakan kemerdekaan Aceh untuk memperjuangkan kemerdekaan. Konflik transmigrasi di Aceh memperkuat gerakan kemerdekaan Aceh dan menjadi titik balik dalam perjuangan Aceh melawan negara. Konflik ini memicu tuntutan Aceh untuk memperoleh hak otonomi yang lebih besar dan merdeka dari Indonesia.

Transmigrasi di Aceh juga memiliki polarisasi ekspansi dan kooptasi terhadap sendi sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya transmigrasi Aceh menyajikan banyak cerita tentang persinggungan sosial. Senjata tanpa peluru tersebut terus menyalakkan amunisi di

relung-relung kehidupan sosial masyarakat Aceh. Alhasil, akumulasi konflik tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tentu, baik Negara atau yang anti terhadap Negara. Akibat transmigrasi Aceh menjadi arena ketegangan yang memilukan. Transmigrasi yang pada awalnya memiliki konsep kesejahteraan dan ketahanan pada masa Orba, justru di Aceh menjadi petaka yang memilukan. Kesejahteraan berubah menjadi kesengsaraan, ketahanan menjadi titik balik melawan Negara. Bagaimana awal mula kepiluan yang lahir dari rahim transmigrasi tersebut di Aceh, penulis telah mengungkapkan dalam buku yang telah berada ditangan pembaca ini.

Dr. Ibrahim Chalid, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR PENULIS.....	vi
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
BAGIAN 1 Memahami Transmigrasi di Indonesia	8
Kebijakan dan Generasi: Dari Kolonisatie, Kokuminggakari, sampai Transmigrasi.....	10
Makna Transmigrasi Sesuai Tujuannya	21
Tujuan Transmigrasi	22
Jenis-Jenis Transmigrasi.....	25
Motivasi Transmigrasi	28
Kendala-Kendala Transmigrasi.....	35
BAGIAN 2 Etnisitas dalam Transmigrasi di Indonesia	38
Jawanisasi dan Ketegangan yang Menyertainya	49
BAGIAN 3 Transmigrasi di Daerah Konflik: Kisah Tidak Terusirnya Transmigran Jawa di Gampong Bukit Hagu.....	61
Menenal Gampong Bukit Hagu	61
Menyatu dengan Penduduk Setempat	85
Hidup Aman di Tengah Perang	108
BAGIAN 4 Transmigrasi Pascakonflik.....	130

EPILOG 144
DAFTAR PUSTAKA..... 149
BIODATA 159

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah tentang kependudukan; bukan saja ketika itu pertumbuhannya yang tidak terkendali, tetapi juga permasalahan konsentrasi kepadatan di Jawa. Oleh karena itu, kebijakan program transmigrasi dinilai penting bagi pemerataan penduduk ke wilayah luar Jawa yang relatif masih luas dan sedikit penduduknya. Kebijakan kependudukan melalui program transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa sudah dimulai sejak zaman Belanda (yang dikenal dengan kolonisasi) tahun 1905) juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa.

Sementara itu, istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 (Harian Soeloeh Indonesia, 26 Sep 2022). Pemberangkatan transmigran pertama pada tahun 1950; saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung (23 KK) dan ke Lubuk Linggau (2 KK). Transmigrasi ini juga dinilai membantu mempercepat terwujudnya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Kemudian Wakil Presiden Bung Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946, secara eksplisit menyebut pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. Setelah kemerdekaan, pada awal Orde Lama, selain tujuan demografis, sesuai Undang-Undang No.20/1960, tujuan transmigrasi adalah meningkatkan

keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Orde Baru, tujuan utama transmigrasi semakin berkembang ke arah tujuan-tujuan non-demografis lainnya. Sebagaimana disebut dalam UU No.3 Tahun 1972 bahwa tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Pergeseran orientasi ke arah pembangunan wilayah menyebabkan permukiman transmigrasi didesain untuk ditumbuhkembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan.

Selain itu, di Masa Orde Baru program transmigrasi juga dimaksudkan untuk memindahkan penduduk yang mayoritas hanya terkonsentrasi di pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Program ini juga dalam rangka meningkatkan produksi beras guna mencapai swasembada pangan dan memperluas kegiatan pembangunan di sektor lainya, seperti perluasan kesempatan kerja, pembangunan daerah, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional. Ringkasnya, program transmigrasi era Orde Baru ditujukan untuk meningkatkan persebaran penduduk dan tenaga kerja. Selain itu, transmigrasi pada periode tersebut dilakukan dalam rangka membuka dan mengembangkan daerah produksi baru terutama daerah pertanian, khususnya di luar Jawa dan Bali.

Pasca bergulirnya reformasi, transmigrasi masih menjadi salah satu program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun dalam beberapa hal disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sistem pemerintahan. Berbeda dengan pemerintah Orde Baru yang sentralistik, maka pelaksanaan program transmigrasi era otonomi daerah dilaksanakan dengan asas keotonomian, yakni desentralisasi. Kebijakan desentralisasi

melalui implementasi otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan terhadap penyelenggaraan program transmigrasi dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan transmigrasi disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah.

Seiring dengan otonomi daerah, kebijakan transmigrasi mengalami pergeseran paradigma dari eksklusif ke inklusif. Artinya, paradigma program yang sebelumnya cenderung hanya memperhatikan para transmigran telah bergeser menjadi melibatkan juga masyarakat sekitar lokasi transmigrasi. Pergeseran paradigma transmigrasi ini sesuai dengan amanat Undang Undang UU No. 15 Tahun 1997, PP No. 2 Tahun 1999 dan UU No. 29 Tahun 2009. Dalam regulasi ini dijelaskan lingkup geografis kawasan transmigrasi yang harus diperhatikan terdiri dari permukiman baru transmigrasi, desa-desa eks transmigrasi, dan desa-desa setempat. Meski sudah ada ketentuan pelibatan desa-desa sekitar wilayah transmigrasi, namun dalam implementasinya masih belum mampu dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Misalnya, masih ditemukan pemukiman transmigran dari daerah tertentu dibangun secara terkonsentrasi dalam lokasi blok tertentu. Sementara masyarakat desa sekitar yang merupakan penduduk lokal berada di luar area pemukiman transmigran. Di beberapa lokasi pemukiman transmigran memang sudah disediakan juga alokasi pemukiman transmigran lokal, namun tetap saja terkonsentrasi dalam lokasi blok tertentu yang terpisah dari blok transmigran. Keterpisahan segregatif demikian menyebabkan kurangnya komunikasi dan interaksi antara transmigran pendatang dan transmigran lokal. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan terjadinya bias informasi, munculnya isu-isu negatif, dan tumbuhnya prasangka negatif antar kedua belah pihak. Dalam taraf tertentu kemudian mempermudah menyulut konflik laten hingga konflik manifes.

Perjalanan panjang pelaksanaan program transmigrasi telah membawa sejumlah keberhasilan. Baik dari sisi tujuan demografis maupun non-demografis. Meski di sisi lain pada saat bersamaan muncul juga cerita-cerita kurang sedap terkait program ini. Banyak fakta menunjukkan bagaimana keberhasilan transmigrasi dalam mengembangkan dan mempercepat perubahan kehidupan masyarakat. Program transmigrasi mengakselerasi perkembangan pembangunan serta ketahanan sosial pada wilayah-wilayah yang masih kurang padat penduduk yang umumnya berada di luar Jawa. Area dan sentra-sentra transmigrasi seringkali menjadi triger dan rujukan perkembangan kemajuan dan keberhasilan pembangunan di lokasi transmigran. Transmigrasi sebagai contoh khas dan menjadi strategi pengembangan wilayah yang **original** di Indonesia merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah. Terutama dalam konteks pengembangan wilayah di luar Jawa.

Tidak dapat dipungkiri program transmigrasi memiliki berbagai berdampak positif. Dampak positif tersebut antara lain, mengurangi kepadatan penduduk bagi tempat yang ditinggalkan, memunculkan keberagaman budaya karena ada interaksi saling mengenal satu sama lain, meningkatnya ekonomi pedesaan, pemerataan pengembangan wilayah, meningkatnya hasil produksi pertanian, mengurangi pengangguran dengan pemanfaatan lahan-lahan kosong. Muara dari berbagai dampak positif tersebut adalah berkurangnya kemiskinan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Sementara dampak negatif yang bisa saja terjadi antara lain, menambah masalah kependudukan bagi tempat tujuan, kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin meningkat dikarenakan bertambahnya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat seiring peningkatan kesejahteraan. Tidak menutup kemungkinan juga berakibat pada meningkatnya tindakan kriminal seperti

perjudian, perampokan, pencurian, dan bentuk masalah sosial lainnya.

Di balik potensi kehidupan yang lebih terjamin, dalam program ini juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Artikel ini menguraikan potensi konflik di daerah tujuan transmigrasi disertai dengan beberapa kasus yang telah terjadi. Potensi terjadinya konflik di daerah transmigrasi sangat besar. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesesuaian budaya pendatang dengan budaya lokal, kuatnya fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang, dan perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal. Konflik juga bias terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan yang berkaitan dengan teori ketamakan dan teori kemerosotan, serta kelangkaan sumber daya alam. Hasil studi empiris yang dipaparkan memperkuat teori yang sudah ada. Berbenturnya sifat-sifat negatif yang dimiliki masing-masing etnis menjadi akar konflik etnis Madura dengan etnis Sampit. Pada sisi lainnya teori ketamakan menjadi basis timbulnya konflik di Mesuji Lampung.

Di balik keberhasilan yang diperoleh, program transmigrasi juga menyimpan potensi konflik yang beraneka ragam. Baik antara para transmigran dengan penduduk lokal maupun antara transmigran dengan perusahaan swasta yang memiliki kepentingan pribadi dan dilindungi oleh negara. Hal ini menjadi problem yang sangat serius. Persoalannya menjadi begitu kusut dan kompleks untuk diuraikan. Kebijakan pembinaan transmigran yang sentralistik dan terstandarisasi telah berimplikasi pada kuatnya budaya pendatang. Sementara budaya lokal nyaris tidak berkembang. Akibatnya, terjadi penegasian budaya setempat dan rusaknya perkembangan kultural masyarakat setempat.

Potensi konflik yang terjadi di daerah tujuan transmigrasi juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan yang dieksploitasi secara berlebihan. Dari sudut pandang penduduk lokal setempat, eksploitasi berlebihan ini akan mengganggu stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Artinya, konflik sosial atau konflik antar etnis di daerah transmigrasi sering didahului oleh problema lingkungan yang hingga saat ini sangat sulit ditemukan cara pemecahannya. Perselisihan mengenai lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial. Tidak hanya berwujud perebutan akses sumber daya alam, tetapi juga pada keberlangsungan peradaban modern karena terjadinya pencemaran air atau polusi atmosfer. Konflik lingkungan yang terjadi memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan antar sektor dan stakeholders pembangunan. Glasbergen (1995) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan lingkungan seringkali terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukan persoalan fisik, tetapi juga mencakup dimensi kepentingan subjek pelakunya (Baiquni dan Rijanta, tanpa tahun).

Meskipun dalam proses implementasi kebijakan pembangunan transmigrasi terjadi dinamika sosial yang rentan dengan konflik, kebijakan transmigrasi masih dinilai penting dan strategis. Itulah yang menjadi alasan mengapa kebijakan transmigrasi hingga 2023 masih tetap dilakukan sebagai salah satu pilihan strategis pembangunan di Indonesia. Terutama terkait upaya pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah, dan penguatan ketahanan sosial. Harus disadari bahwa program transmigrasi akan selalu melibatkan bertemunya dua pihak yang saling berbeda latar belakang sosial, budaya, dan etnis sehingga diperlukan saling adaptasi antar berbagai pihak.

Saling adaptasi cenderung mengarah pada terjadinya proses asosiatif (kohesi dan integrasi). Meskipun dalam prosesnya sering menimbulkan gesekan-gesekan yang disosiatif. Realitas di lapangan menunjukkan banyak transmigran yang dapat langsung beadaptasi dan terintegrasi (baik dengan masyarakat lokal maupun antar transmigran). Sementara itu sebagian yang lain masih memerlukan waktu untuk adaptif. Tidak jarang dalam proses adaptasi ini juga terjadi gesekan-gesekan konflik. Namun, pada akhirnya terbangun toleransi dan integrasi. Bahkan banyak pula ditemukan masyarakat lokal yang justru menerima dengan sangat baik kedatangan transmigran di wilayahnya; bahkan warga lokal "melarang" para transmigran meninggalkan (pindah) ke daerah lain atau kembali asalnya seperti balik ke Jawa. Artinya, perbedaan etnis dan sosial budaya transmigran dengan warga masyarakat lokal memerlukan waktu adaptasi untuk saling mengenal, mengakui, memahami dan kemudian saling membutuhkan (*cross-cutting affiliation*) sehingga terbangun integrasi sosial yang berketahanan sosial. Fenomena dinamika praktek transmigrasi seperti ini dapat dibaca secara lengkap pada buku yang diberi judul "Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial" karya Ibrahim Chalid ini. Selamat membaca.

Prof. Dr. Mustain Mashud. M.Si.
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga

BAGIAN 1

Memahami Transmigrasi di Indonesia

Masalah mendasar yang dihadapi umat manusia adalah fakta bahwa jumlah mereka terus bertambah di daratan luasnya tak meluas, Selagi manusia terus bertambah jumlahnya, luas daratan tak mengekori pertambahan tersebut; daratan tidak bertambah luas. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir daratan semakin menyusut akibat abrasi pantai maupun naiknya permukaan laut.

Memang jika dibandingkan dengan luasnya area yang belum ditempati manusia, pertambahan jumlah penduduk bumi tampak jauh dari mengkhawatirkan. Ada cukup banyak tanah-tanah kosong di perdesaan maupun pedalaman dekat gunung atau bukit yang masih bisa digarap menjadi tempat tinggal komunitas baru. Akan tetapi, tak semua tempat di muka bumi layak menjadi tempat tinggal. Jika suatu kelompok manusia hendak menempati tanah kosong tertentu, mereka perlu memastikan tempat tersebut punya kesuburan yang, sumber air, relatif aman, dan memiliki faktor pendukung kehidupan lainnya.

Perkembangan penduduk akan mempengaruhi luasnya pasar. Besarnya pasar barang dan jasa tergantung pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Apabila penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar juga akan bertambah oleh karena itu jumlah penduduk akan mendorong pertumbuhan produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Masalah sosial ekonomi masyarakat selalu berkaitan erat dengan SDM dan lapangan kerja.

Di negara-negara yang kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduknya belum mendatangkan hasil diharapkan, situasi demikian lantas memicu tumbuhnya kemiskinan sebagai persoalan yang melahirkan cabang-cabang problem sosial lainnya. Kemiskinan adalah sebuah masalah. Dia disebut masalah bukan cuma karena menyangkut kemelaratan orang-orang. Kemiskinan merupakan masalah yang menelurkan ratusan masalah lainnya di tengah masyarakat. Kriminalitas, penyakit menular, putus sekolah, tersingkirnya kebudayaan, gizi buruk, dan seterusnya, merupakan masalah-masalah yang lahir dari kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, satu jalan keluar andalan banyak pemerintah adalah dengan menggelar program transmigrasi. Ribuan orang di wilayah perkotaan yang sudah amat padat penduduknya dikeluarkan dari sana, dikirim ke tempat-tempat baru yang masih belum dihuni dan cocok untuk kehidupan manusia dalam jangka panjang. Pemerintah tentu saja membujuk orang-orang untuk ikut bertransmigrasi dengan kampanye-kampanye mengenai kehidupan keluarga yang prospektif. Mereka yang sudah berkeluarga dibujuk dengan janji-janji bahwa nantinya anak, istri, atau orang tua mereka dapat hidup sejahtera di tempat baru, lahan baru. Mereka yang masih muda dan belum menikah dipersuasi dengan gambaran akan suatu tempat yang cocok untuk membangun masa depan ketimbang di tempat sekarang yang kumuh, padat, jorok, berpenyakit, amoral, penuh gangguan, dan seterusnya.

Orang-orang miskin yang sudah tak tahan dengan daerah asal mereka akan cukup terpengaruh dengan bayangan mendapat lahan secara cuma-cuma dari pemerintah. Apalagi selama menunggu panen tiba, mereka dijamin kebutuhan hidupnya dengan program pemberian "jatah hidup" (jadup) yang terdiri dari uang saku tunai, bahan makanan (beras, kecap, dan seterusnya),

sandang, dan lain-lain. Imajinasi inilah yang kemudian menggerakkan jutaan orang penuh dengan suka cita mendaftarkan diri dan keluarga untuk menuju ke tempat tujuan yang sebetulnya tidak secara pasti menjamin akan hadirnya kehidupan idaman yang sejahtera dan tenteram.

Kebijakan dan Generasi: Dari Kolonisatie, Kokuminggakari, sampai Transmigrasi

Kebijakan secara umum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Setiap kebijakan berorientasi pada tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar yang berhubungan dengan masalah publik dan administrasi pemerintah. Kebijakan juga dikaitkan dengan orang atau masyarakat. Biasanya kebijakan timbul oleh adanya suatu pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran (Nugroho, 2006).

Lebih lanjut, Tahir (2011) memberikan garis besar pengertian kebijakan yang hendak diimplementasikan, yakni:

1. Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan
2. Kebijakan harus dibedakan dengan administrasi
3. Kebijakan mencangkup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran guna mencapai suatu itikad tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intra organisasi
9. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.

Berdasarkan kesembilan poin di atas, maka kebijakan dapat disimpulkan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sengaja dilakukan atau tak dilakukan seseorang, kelompok, atau instansi (pemerintah) di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Adapun tujuan diambilnya kebijakan adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, Tahir (2011) memaparkan anggapan kebijakan yang sangat penting bagi perumusan bersama dalam upaya untuk memahami:

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah;
2. Apa penyebab atau yang memengaruhinya
3. Apa dampak dari suatu kebijakan yang diambil jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Terlepas dari acuan teoretis tersebut, kebijakan transmigrasi mulanya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyelenggara Transmigrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958. Adapun landasan yang selanjutnya dibakukan dalam peraturan implementasi transmigrasi di Indonesia yakni: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1960; (2) Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi UU Nomor 3 Tahun 1972; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; (4) UU No. 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ketransmigrasian; (6) UU No. 15/1997; (7) sUU No. 29/2009.

Secara historis, transmigrasi di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri sebagaimana program pembangunan pada masa politik etis Pemerintah Hindia Belanda bagi penduduk miskin Jawa yang dikirim sebagai buruh ke perkebunan swasta di Sumatera (Supriatna, 2008). Program ini disebut sebagai *kolonisatie*, yang dimulai sejak tahun 1905 hingga 1941. Sejumlah besar penduduk telah dipindahkan ke Lampung dan Sumatera Selatan. Antara tahun 1905-1941, pemerintah Hindia Belanda secara keseluruhan telah memindahkan sekitar 200 ribuan jiwa dari Jawa ke luar Jawa. Namun, selama kurun waktu yang sama, penduduk Pulau Jawa meningkat dari 30 juta menjadi 45 juta jiwa (Saleh, *et al.*, 2013).

Pada masa pendudukan Jepang, kebijakan transmigrasi diteruskan di bawah nama *Kokumintangakari* yang berlangsung titimangsa 1942-1945. Perpindahan penduduk dalam *Kokumintangakari* memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut H. Halwi Dahlan dalam "Perpindahan Penduduk dalam Tiga Masa", pemerintah militer Jepang tidak memindahkan penduduk secara keluarga atau bedol desa seperti rezim Belanda. Penerapan transmigrasi dilakukan secara individu. Militer Jepang memiliki orang per orang yang memiliki badan bagus, terlihat kuat, atau kualifikasi fisis lainnya. Mau tak mau, standar ini lebih banyak menyerap kaum laki-laki sebagai transmigran. Sejarawan Aiko Kurasawa menyebutkan lebih lanjut, setiap transmigran ini diupah. Namun para pekerja—yang dinamai *romusha*—tidak akan menerima bulat-bulat upah mereka. Sebagian porsi upah dipotong untuk dikirimkan kepada keluarga pekerja di kampung halaman. Otoritas yang mengurus transmigrasi masa Jepang ini adalah *Naimusho* atau Kementerian Dalam Negeri Jepang (Kurasawa, 1993).

Setelah Indonesia menjadi “merdeka”, Pemerintah Indonesia melanjutkan program transmigrasi dengan cara relatif sama. Selama masa Orde Baru, atau sebelum tahun 2000-an, program transmigrasi pernah dilaksanakan secara besar-besaran untuk menangani problem kemiskinan perdesaan Jawa. Dari waktu ke waktu, sejarah transmigrasi diwarnai beberapa perubahan baik dari sisi aturan legal, kebijakan, paradigma, serta orientasi pragmatis pelaksanaannya. Sejak masa pra-Pelita hingga kini, setidaknya ada empat kategori “generasi transmigrasi” yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Generasi Pertama

Transmigrasi dilaksanakan pada masa pra-Pelita dan berakhir hingga pertengahan tahun 1980-an atau pada masa Pelita III. Kehadiran generasi ini mengacu pada legalisasi ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi. Adapun ciri-ciri transmigrasi generasi ini, di antaranya sebagai berikut:

- A. Pemandahan penduduk secara besar-besaran dari dan keluar Pulau Jawa, Madura, Bali (Jambal), dan Lombok, dengan sepenuhnya biaya ditanggung pemerintah;
- B. Tema-tema utama transmigrasi saat itu adalah pengurangan kepadatan penduduk Jawa dan kelangkaan penduduk luar Jawa;
- C. Pola usaha dan permukiman transmigrasi hampir seluruhnya dibangun dengan orientasi pengembangan pertanian (padi dan sawah) baik lahan basah maupun lahan kering;
- D. Produk akhir transmigrasi generasi ini adalah kesatuan sosial atau komunitas administratif desa, yang dalam jangka panjang telah terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan wilayah dan ekonomi

regional sebagai pusat-pusat produksi pertanian dan menjadi wilayah belakang dari kota-kota yang secara tradisional sudah ada di wilayah provinsi yang bersangkutan;

- E. Komunitas desa-desa bekas transmigrasi umumnya berskala besar dan berkembang pesat baik secara politis maupun administratif.

2. Generasi Kedua

Transmigrasi generasi ke dua dilaksanakan di masa Pelita IV hingga berakhir pada masa 1990-an (Pelita VII). Dalam era ini, transmigrasi ditandai salah satunya oleh keterlibatan pihak swasta untuk berinvestasi di sektor perkebunan. Tema-tema demografis transmigrasi di era ini kemudian ditinggalkan karena efek-efek pengurangan penduduk di daerah asal (Jambal) ternyata tidak tercapai.

Transmigrasi kemudian dilakukan dengan orientasi pengembangan wilayah di daerah. Maka lahirlah UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagai pengganti UU Nomor 3 tahun 1972. Secara konseptual, orientasi transmigrasi generasi kedua bukan lagi membangun komunitas administratif desa atau desa definitif, melainkan pembangunan proyek-proyek berbasis spasial, yaitu WPT atau Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan LPT atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

3. Generasi Ketiga

Transmigrasi generasi ketiga dilaksanakan sejak berakhirnya pemerintahan sentralistis Orde Baru lalu berakhir di penghujung tahun 2004. Dengan demikian, dalam praktiknya, UU Nomor 15/1997 belum sempat diimplementasikan secara utuh dan orientasi pengembangan wilayah praktis belum sempat

dilaksanakan. Pasalnya waktu itu transmigrasi lebih difokuskan atau mendapat mandat yang bersifat *ad hoc* untuk menangani secara permanen korban konflik baik horizontal maupun konflik vertikal melalui upaya pemukiman kembali di berbagai wilayah (termasuk daerah asal Jawa, Madura, dan Bali).

Pada era ini, transmigrasi mengalami stagnasi. Tahun 2000-2001, misalnya, tidak ada penempatan transmigrasi. Di beberapa provinsi, program transmigrasi dihentikan. Sejak saat itulah citra transmigrasi mulai meredup. Kondisi ini semakin sulit, karena otonomi daerah yang mulai diberlakukan menjadikan dikotomi yang begitu kuat antara kepentingan daerah tujuan dan daerah asal transmigrasi, serta perolehan lahan pun untuk permukiman transmigrasi berskala luas (yang bersifat eksklusif) menjadi semakin sensitif untuk dibicarakan. Satuan-satuan permukiman transmigrasi dibangun dalam skala yang relatif lebih kecil, sehingga sulit untuk menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

4. Generasi Keempat

Pada tahun 2009, UU No. 29/2009 disahkan sebagai perubahan (amandemen) atas UU No. 15/1999. Banyak tugas baru yang diamanatkan dalam UU baru ini, meliputi:

- A. Merencanakan infrastruktur kawasan transmigrasi sebagai kawasan yang memiliki fungsi-fungsi perkotaan atau ciri fungsi perkotaan baru. Maka transmigrasi dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh dukungan aparat birokrasi yang memahami betul planologi wilayah perkotaan;
- B. Departemen Transmigrasi harus mempersiapkan para calon transmigran, baik dari daerah pengirim maupun dari daerah tujuan atau penempatan (transmigran penduduk setempat), untuk menjadi calon masyarakat transmigrasi

yang mampu menopang pertumbuhan budaya perkotaan dengan basis pertanian. Selain tugas membangun prasarana dan sarana fisik kawasan perkotaan guna melayani kebutuhan masyarakat, tugas baru transmigrasi adalah membuat program-program pengembangan kultur perkotaan bagi masyarakat transmigran, atau model transformasi kultural yang diperlukan guna menopang kemajuan kawasan yang berciri atau berfungsi perkotaan. Pada generasi ini (saat ini) diperlukan aparat birokrasi (pusat maupun daerah) yang mampu melakukan rekayasa transformasi budaya dari tradisional ke modernitas pendukung kehidupan kota;

- C. Memberikan pemahaman kepada publik bahwa transmigrasi ke depan bukan lagi hanya membangun desa, melainkan membangun masyarakat kota yang dicirikan oleh etos kerja keras, kompetitif, dan reseptif terhadap nilai-nilai modern yang mendukung kemajuan. Di era baru ini, transmigrasi akan memasuki babak baru sebagai program yang sangat prestisius, tetapi tetap berciri populis, dan akan mendapat simpati rakyat (publik) bagi siapa pun rezim pelaksana dan berkuasa di negeri ini.

Kebijakan transmigrasi ini pada dasarnya dilakukan dengan berlandaskan dengan pembangunan daerah yang mengutamakan bidang agroindustri dan agrobisnis. Langkah ini dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru atau yang mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang (Siahaan, 2004).

Dalam hal konsentrasi wilayah, transmigrasi diarahkan ke kawasan timur dan barat Indonesia. Kebijaksanaan mengarahkan pembangunan transmigrasi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) ditempuh dengan membangun sarana dan prasarana ekonomi dan

sosial budaya yang lebih baik. Harapannya, ini dapat meningkatkan kelancaran arus perhubungan, membangun kelembagaan yang dibutuhkan, meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan produktivitas, mengarahkan pembukaan pola perkebunan PIR-Trans di KTI.

Sebagaimana diyakini pemerintah, studi mengenai potensi usaha di KTI dapat menemukan formula guna memudahkan perizinan untuk membuka usaha di sana. Hal ini sekaligus memberikan kemudahan mendapatkan kredit bagi pengembangan usaha dan mengusahakan lingkungan sosial yang baik bagi pembauran para transmigran dengan penduduk daerah tujuan/setempat. Tetapi yang lebih penting dari itu ialah bagaimana transmigrasi dapat mengatasi problem kemiskinan di KTI.

Hal tersebut secara mendasar dilakukan dengan mengatasi kemiskinan yang diderita para transmigran terlebih dahulu, baru kemudian penduduk di sekitar unit penempatan transmigrasi. Kebijakan transmigrasi untuk membantu upaya penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan memberikan prioritas yang lebih besar kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menjadi transmigran. Para transmigran yang hendak disejahterakan diberikan bimbingan untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kemampuan. Bimbingan ini termasuk pemberian bantuan sarana pengolahan hasil pertanian, informasi pasar hasil usaha pertanian, dan akses terhadap fasilitas di koperasi/KUD di daerah transmigrasi.

Di samping itu, terdapat pula transmigrasi swakarya mandiri. Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya transmigrasi swakarsa meliputi upaya memberikan penerangan, penyuluhan dan pelayanan bagi calon transmigran di daerah asal mengenai peluang usaha yang terdapat di daerah transmigrasi. Pemerintah juga merasa perlu memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh sarana transportasi sampai ke daerah tujuan. Tidak berhenti di situ, juga

diupayakan pengembangan usaha transmigran melalui serangkaian program peningkatan pengetahuan serta kecakapan praktis. Bagi yang ingin bertani, misalnya, perlu dicari jalan agar transmigran swakarsa juga bisa menguasai sebidang tanah.

Di luar kebutuhan akan pekerjaan, pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah dan sarana lain yang diperlukan. Berbagai program sandingan juga digalakkan untuk memperoleh modal usaha secara mudah; memberikan informasi mengenai peluang pasar bagi berbagai hasil produksi transmigran; memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha transmigran; memberikan kemudahan untuk melakukan magang pada industri atau usaha swasta yang sesuai dengan usaha transmigran; memberikan kesempatan untuk memperoleh mitra usaha bagi pengembangan usaha transmigran; dan memberikan prioritas bagi transmigran swakarsa mandiri untuk memilih daerah transmigrasi yang mempunyai peluang tinggi untuk berkembang. Hal-hal ini merupakan bagian dari kebijakan umum dalam transmigrasi.

Sementara kebijakan khususnya meliputi:

- A. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan usaha lain di daerah transmigrasi. Untuk mengembangkan daerah transmigrasi yang dapat lebih mendorong tumbuhnya agrobisnis dan agroindustri, diupayakan untuk menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung penyediaan sarana produksi dan pemasaran; mengembangkan sistem lembaga keuangan di daerah transmigrasi; meningkatkan sarana produksi terutama pupuk, bibit unggul, peralatan pertanian, dan peralatan pascapanen; meningkatkan diversifikasi pola usaha seperti pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan;

meningkatkan produktivitas hasil pertanian; mengembangkan industri pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah; mengembangkan sistem pemasaran yang didukung sistem transportasi yang andal, terutama dengan meningkatkan peranan koperasi/KUD di daerah transmigrasi; menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha; meningkatkan ekspor hasil pertanian dari daerah transmigrasi; meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani; meningkatkan keterkaitan antara kegiatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran; menciptakan rangsangan bagi agroindustri kecil dan menengah berupa kemudahan permodalan, perizinan dan pemasaran; meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi pengolahan; serta meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi/KUD di daerah transmigrasi dan industri pengolah hasil pertanian. Kegiatan pengembangan agrobisnis, agroindustri dan usaha lain di daerah transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan.

- B. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan transmigrasi. Mengingat transmigrasi memerlukan dukungan kegiatan dari banyak sektor pembangunan, kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, diupayakan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah pada setiap tingkatan, terutama di tingkat pemerintah daerah tingkat II, baik di daerah asal maupun di daerah penerima mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan; meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintah dengan lembaga masyarakat yang

mendukung transmigrasi; mendayagunakan lembaga keuangan, pemasaran, industri pengolahan, transportasi, koperasi/KUD) dan lembaga ekonomi lainnya yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran; menyempurnakan kelembagaan kelompok tani, kelembagaan penyuluhan dan pelatihan serta pendidikan pertanian untuk meningkatkan manajemen usaha tani, manajemen keuangan dan penguasaan teknologi; meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan pertanian di daerah transmigrasi; serta mengembangkan sistem informasi ketransmigrasian. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengikutsertakan penduduk setempat dalam pengembangan daerah transmigrasi; membina penduduk sekitar permukiman transmigrasi termasuk permukiman kembali para peladang berpindah dan perambah hutan, dan meningkatkan minat calon transmigran di daerah asal dengan menginformasikan peluang usaha yang ada di daerah transmigrasi.

- C. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi yang sesuai di daerah transmigrasi, diupayakan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; menerapkan teknologi tepat guna meningkatkan produktivitas daerah transmigrasi dan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan di daerah transmigrasi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya transmigran diupayakan memberikan pelatihan dasar di bidang pertanian dan nonpertanian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah transmigrasi. Pelayanan

kesehatan bagi para transmigran juga ditingkatkan. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas aparatur yang menangani kegiatan transmigrasi dengan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan motivasi dan dedikasi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para transmigran.

Makna Transmigrasi Sesuai Tujuannya

Penting dicatat bahwa makna transmigrasi sangat dipengaruhi oleh bidang-bidang ilmu yang ada di lingkungan umat manusia, tentunya tanpa meninggalkan makna dasarnya sebagai “perpindahan penduduk”. Hal ini membuat makna transmigrasi tidak cuma perpindahan atau pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang dinilai lebih baik.

Dari sisi kebudayaan, ada yang mendefinisikan transmigrasi sebagai upaya menyebarkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya di suatu daerah ke daerah lain yang dihuni oleh etnik lain pula. Dengan berpindahnya suatu penduduk, kebudayaan mereka cakupannya akan menjadi lebih luas.

Dari sisi ekonomi, transmigrasi bertujuan untuk mengatasi kemiskinan akibat kepadatan penduduk di suatu wilayah dengan cara mengirimkan orang-orang miskin yang ada ke daerah lain yang penduduknya masih jarang dan tersedia lahan kosong cukup luas untuk digarap sebagai kebun atau sawah.

Dari sisi politik, transmigrasi bisa dipakai untuk tujuan memenangkan organisasi politik penguasa dalam pemilihan umum. Tahun 1977, sekelompok tokoh Golongan Karya di Sumatra Utara dan Aceh mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar di Aceh ditempatkan sebanyak 1.000.000 transmigran dari Jawa untuk “melenyapkan kefanatikan dan daerahisme” dan memenangkan Golongan Karya”. Usul ini semakin menguat setelah Golkar

mengalami kekalahan di Aceh dalam Pemilu 1977. Teuku Nyak Razali, seorang purnawirawan TNI AD yang menyokong Golkar, pada 26 Juli 1977 mengirimkan surat kepada Soeharto untuk meminta penempatan 1.000.000 transmigran Jawa itu segera dilaksanakan karena: "Golongan Karta di daerah Aceh Pemilu 2 Mei 1977 mengalami kekalahan yang sangat menyolok sehingga kemenangan telah dicapai oleh Golongan Parpol" (Arsip Setwapres HB IX 495-7). Pemenang pemilu di Aceh waktu itu ialah Partai Persatuan Pembangunan.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa transmigrasi tetap tepat jika didefinisikan berdasarkan variabel-variabel khusus. Namun definisi-definisi yang dikembangkan itu tetap tak bisa meninggalkan makna dasar transmigrasi, yakni program atau aktivitas perpindahan penduduk. Hal ini dikarenakan pemindahan atau pemindahan penduduk sendiri memiliki tujuan yang tidak tunggal. Transmigrasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk tujuan yang beragam.

Tujuan Transmigrasi

Cara paling mendasar bahkan baik dalam mendefinisikan "transmigrasi" adalah dengan menyandingkan kata itu dengan tujuan pelaksanaannya. Dalam kata lain, transmigrasi dapat dimaknai sesuai dengan tujuannya. Dengan landasan konseptual ini maka transmigrasi bermakna aktivitas berpindah dari daerah yang padat ke tempat yang berpenduduk jarang demi meraih kehidupan yang sejahtera, baik itu dilakukan secara berkelompok di dalam program negara maupun perorangan tanpa bantuan atau fasilitasi dari negara.

Kata "transmigrasi" berasal dari bahasa latin: *transmigratus*. Dua penggalan kata dalam *transmigratus* ialah *trans* yang artinya "berlawanan" dan *migrare* yang bermakna "bergerak". *Migratus*

atau *migrare* berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam artian yang lebih khusus, transmigrasi merupakan pemindahan penduduk ke tempat yang tingkat kepadatan manusianya masih cukup rendah serta potensi alamnya melimpah tetapi masih belum digarap secara intensif.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjelaskan beberapa hal terkait dengan transmigrasi. Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa transmigrasi dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengertian ini senada dengan kebijaksanaan nasional dalam rangka mewujudkan ketersebaran penduduk yang lebih seimbang.

Transmigrasi secara umum dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan basis sumber daya nasional dengan membuka lebih banyak lahan. Langkah ini diyakini akan meningkatkan produksi pangan. Ini jelas sangat penting di negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni 2,1 persen, tetapi hanya 50 persen dari luas lahan di pulau terluar yang dapat digunakan untuk pertanian. Pemilihan lokasi yang tepat dan koordinasi sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas program transmigrasi (McAndrews, 1978).

Dalam konteks Indonesia, tujuan utama transmigrasi adalah menyebarkan mengurangi tekanan penduduk serta kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa. Namun bukan berarti kemiskinan di Jawa hendak disebarkan ke pulau-pulau lain. Apa yang hendak diwujudkan adalah penyediaan kesempatan untuk memperoleh kehidupan sejahtera di tempat-tempat yang prospektif untuk perbaikan hidup, utamanya dengan aktivitas perkebunan. Kebijakan transmigrasi di Indonesia memiliki tujuh tujuan:

1. Perbaikan tingkat kesejahteraan
2. Pembangunan daerah
3. Distribusi penduduk yang seimbang
4. Pemerataan pembangunan di Indonesia
5. Penggunaan sumber daya alam dan manusia
6. Persatuan dan kesatuan nasional
7. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Sri Edi Swasono (1973), transmigrasi bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup para transmigran. Pendapat lain diajukan Lester R Brown et al (1982): "... (transmigrasi bertujuan untuk) mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan mengadakan pemindahan penduduk dan suatu daerah (tempat) ke daerah lainnya, yang ditujukan ke arah pembangunan perekonomian dalam segala lapangan".

Transmigrasi tentunya melibatkan transmigran sebagai pelakunya. Ketika baru tiba di daerah transmigrasi, para transmigran menghadapi situasi di mana mereka ditempatkan di "hutan belantara". Mereka harus membuka lahan lalu menanam tanaman pangan dan menunggu masa panen tiba. Tempat tinggal mereka seadanya: dari kayu, berdinding papan, dan tak sedikit yang ternyata hanya berlantaikan tanah.

Sambil menunggu panen tiba, para transmigran memperoleh mendapatkan jatah bahan makanan, sandang, dan uang dari pemerintah selaku otoritas penyelenggaraan transmigrasi. Tidak semua transmigran sanggup bertahan dalam situasi ini. Beberapa orang memutuskan kembali ke kampung halamannya atau pergi ke daerah transmigrasi lain yang mereka yakini kehidupannya lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua transmigrasi merupakan program pemerintah. Ada pula transmigrasi yang dipelopori secara individual atau kelompok yang bukan di bawah

manajemen ketransmigrasian negara. Situasi ini membuat transmigrasi terbagi ke dalam dua jenis. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Jenis-Jenis Transmigrasi

Transmigrasi dibagi menjadi “transmigrasi umum” dan “transmigrasi swakarsa”. Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Adapun transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi atas prakarsa transmigran atau warga sendiri. Sementara itu transmigrasi swakarsa terbagi lagi ke dalam dua kelompok:

- Transmigrasi Swakarsa Berbantuan: transmigrasi ini dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran.
- Transmigrasi Swakarsa Mandiri: transmigrasi ini merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Dari dua jenis di atas, transmigrasi yang khas Indonesia adalah yang dilakukan pemerintah dalam upayanya melakukan pemerataan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Penyelenggaraan sistem ini sudah dimulai sejak zaman Belanda sampai saat ini. Pembangunan transmigrasi pada dasarnya merupakan sebuah upaya merekayasa ruang atau wilayah agar bernilai tambah dan menjadi daya tarik bagi penduduk untuk mendatangnya. Tak sekadar mendatangi, tetapi juga

bertempat tinggal di dalamnya, serta bekerja berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Masyarakat transmigrasi, baik para pendatang ataupun masyarakat lokal yang berada di satuan-satuan permukiman transmigrasi, merupakan entitas kehidupan sosial sebagai subjek, pionir, sekaligus pemanfaatan pembangunan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi telah berhasil menciptakan wilayah-wilayah baru berbasis komoditas unggulan, baik sebagai pusat pertumbuhan baru, maupun sebagai pendukung pusat pertumbuhan yang telah ada, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Ini berarti pembangunan transmigrasi telah berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut bahkan juga berimbas pada wilayah sekitarnya. Data yang ada memperlihatkan bahwa melalui pembangunan transmigrasi selama ini telah terbentuk 3.052 desa, 382 kecamatan, 104 (kabupaten-kota), dan satu ibu kota provinsi. Hingga saat ini, tercatat sekitar dua juta keluarga atau lebih dari sepuluh juta jiwa yang difasilitasi langsung untuk bermukim (Saleh, 2013). Dalam hal motifnya, ada lima jenis transmigrasi: transmigrasi umum, transmigrasi spontan (swakarsa), transmigrasi sektoral (khusus), transmigrasi lokal, dan transmigrasi bedol desa.

Apa pun bentuk atau jenis transmigrasi, semuanya tentu memiliki manfaatnya. Manfaat-manfaat mengikuti transmigrasi tentu membawa perubahan atas hidup para transmigran. Sebagaimana dikemukakan Angelsen, *et al.* (2013) dalam praktiknya sebagian besar mekanisme pembagian manfaat dirancang untuk mencapai berbagai tujuan. Manfaat tersebut harus disalurkan kepada mereka yang memiliki klaim atau hak legal (baik menurut undang-undang negara maupun hukum adat) atas sejumlah manfaat.

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan kata lain Pulau Jawa mendominasi permasalahan mendasar terkait persebaran tenaga kerja.

Dampaknya, pengangguran di Pulau Jawa menjadi permasalahan struktural maupun fungsional. Oleh karena itu transmigrasi dapat dijadikan solusi unggulan untuk pemeratakan persebaran tenaga kerja. Sebagaimana dikemukakan Aswatini dan Hartiningsih (2011), persebaran tenaga kerja yang merata akan berdampak pada (1) berkurangnya pengangguran, (2) bertambahnya tenaga kerja di daerah terpencil, dan (3) banyak sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan lapangan kerja baru secara jamak.

Lapangan kerja didefinisikan sebagai kesempatan kerja yang menghasilkan timbal balik yang memadai kepada pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks transmigrasi, "pekerja" adalah transmigran. Akan tetapi transmigrasi bukan cuma memberikan pekerjaan kepada transmigran. Program ini juga akan memicu lahirnya pekerjaan-pekerjaan sandingan yang menyerap lebih banyak orang yang nontransmigran. Misalnya, dengan lahirnya desa transmigrasi, penduduk asli di sekitar penempatan transmigran mendirikan rumah makan atau pasar-pasar penyedia kebutuhan pokok yang dibutuhkan para transmigran untuk berbelanja. Contoh lainnya: ketika kebun para transmigran sudah mulai memasuki masa panen, diperlukan tenaga kerja untuk memanen hasil pertanian yang ada di lahan. Transmigran bisa merekrut penduduk asli sekitar untuk pemanenan. Inilah yang dimaksud dengan "transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja".

Menurut ILO (2010) setidaknya ada tiga keunggulan utama dari perluasan lapangan kerja:

- Membantu menjembatani kesenjangan pengentasan kemiskinan.
- Menempatkan kesempatan kerja sebagai fokus dalam perencanaan pembangunan.
- Membantu memperjelas persoalan koherensi kebijakan, atau kurangnya koherensi kebijakan, antara target-target kemiskinan dan kesempatan kerja di satu sisi dan kebijakan serta target ekonomi di sisi lain.

Setiap transmigran tentu tak pernah dibatasi untuk memiliki satu usaha saja, yakni kebun mereka yang dijatah oleh pemerintah. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha awalnya serta membentuk unit-unit usaha baru untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Strategi guna memperluas usaha transmigran tersebut sebagaimana dituangkan dalam trilogi pemikiran pembangunan dan pemerataan yang menyatakan bahwa kesempatan berusaha dalam transmigrasi dilakukan dengan kebijakan untuk mempermudah permodalan usaha yang salah satunya melalui kebijakan perkreditan. Kebijakan permodalan usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguatan permodalan usaha bagi masyarakat (Hadi, 2006).

Motivasi Transmigrasi

Motivasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam diri manusia karena motivasi merupakan dasar terbentuknya perilaku manusia. Motivasi lebih mendekati pada keinginan melakukan tugas agar mencapai suatu tujuan. Motivasi di sini adalah kekuatan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Motif atau motivasi berasal dari kata latin "*movere*" yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau

berperilaku. Pengertian motivasi tidak lepas dari katakebutuhan atau “*need*” atau “*want*”. Kebutuhan adalah suatu *potensi* dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons (Tjandra, 2004). Maslow mengembangkan teorinya setelah ia mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia berdasarkan kondisi yang bertingkat tingkat atau sesuai dengan hierarki, di antaranya:

1. Manusia adalah suatu makhluk sosial “berkeinginan”, dan keinginan ini menimbulkan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Keinginan ini bersifat terus-menerus, dan selalu meningkat.
2. Kebutuhan yang telah terpenuhi (dipuaskan), mempunyai pengaruh untuk menimbulkan keinginan atau kebutuhan lain dan yang lebih meningkat.
3. Kebutuhan manusia tersebut tampaknya berjenjang atau bertingkat-tingkat.
4. Tingkatan tersebut menunjukkan urutan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam suatu waktu tertentu.
5. Satu motif yang lebih tinggi tidak akan dapat mempengaruhi atau mendorong tindakan seseorang, sebelum kebutuhan dasar terpenuhi. Dengan kata lain, motif-motif yang bersifat psikologis tidak akan mendorong perbuatan seseorang, sebelum kebutuhan dasar (biologis) tersebut terpenuhi.
6. Kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain saling kait mengait, terlalu tidak terlalu dominan keterkaitan tersebut.

Terlepas dari konsep motivasi tersebut, dalam penyelenggaraan transmigrasi secara luas dan besar-besaran akan menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) yang menimbulkan daya tarik bagi tenaga kerja secara berganda pula (Kasim dan Karim, 2006). Pengembangan daerah-daerah transmigrasi dengan kondisi hidup yang menarik akan mendorong terlaksananya

transmigrasi spontan (swakarsa) yang sekaligus mewujudkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Transmigrasi sebagai keluaran atau alternatif pembangunan komunitas atau masyarakat akan memberikan daya motivasi yang begitu kompleks. Hal ini, sebagaimana dikemukakan Soegiharto (2009), mempunyai tiga sasaran pokok, yakni, (1) Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi); (2) Membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi); (3) Mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat membangun masyarakat dinamis, produktif, maju, dan mandiri dalam suasana yang harmonis serta sejahtera. Untuk membangun komunitas masyarakat yang demikian, tentunya memerlukan proses perencanaan. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan mereka menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah kepada satu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.

Dalam menciptakan landasan yang kuat bagi kemajuan pembangunan, perencanaan pembangunan diperlukan guna meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu akan mendorong dan menghambat perkembangan ekonomi. Tanpa perencanaan yang baik, hal ini mustahil ditangani.

Manfaat Transmigrasi bagi Daerah Tujuan

Salah satu perhatian penting orang-orang di daerah yang akan menjadi lokasi transmigrasi adalah apakah daerah mereka akan memperoleh dampak positif dari kehadiran para transmigran baru. Para pejabat daerah maupun masyarakat biasanya akan bertanya-tanya: apa untungnya bagi daerah mereka ketika hutan-hutan dirambah demi membuka lahan permukiman maupun perkebunan baru untuk "orang luar", sementara dua hal itu tidak pernah negara berikan kepada mereka selaku "orang asli"?

Ahli pembangunan Prijono Tjiptoherijanto melihat, pembangunan yang disebar ke seluruh wilayah mampu menghasilkan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) secara signifikan, bahkan secara khusus meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Dengan padatnya penduduk di suatu wilayah, serta tersedia wilayah-wilayah yang "kosong", hal demikian dengan cepat bisa diwujudkan pemerintah. Dalam catatannya, Tjiptoherijanto menyebutkan bahwa "dengan berkembangnya program transmigrasi ke luar Pulau Jawa telah tercipta lapangan kerja baru sekitar 1,5 juta keluarga. Angka ini merupakan fenomena per tahun 1995 ("Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan Nasional", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLIV, No. 4, 1996). Namun terdapat kenyataan lain bahwa segenap potensi daerah belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk lokal. Situasi ini menggambarkan bahwa

transmigrasi tidak menjamin potensi daerah dapat tergarap untuk mewujudkan keuntungan daerah. Hanya saja, biar demikian, transmigrasi setidaknya menjadi satu alat baru untuk mewujudkannya.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah (*natural*) dan potensi yang bersifat buatan (*nonnatural*). Potensi alamiah terdiri potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM), meliputi air dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalam perut bumi. Sementara itu potensi SDM meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas manusia, baik aspek fisik maupun nonfisiknya. Potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia baik yang berupa teknologi, sarana-prasarana, produk, maupun yang berupa institusi atau organisasi yang eksis di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu, secara teoretis, identifikasi potensi daerah memiliki cakupan yang sangat luas. Sebagaimana dikemukakan Bratakusumah dan Solihin (2004), pengembangan potensi daerah akan membentuk suatu hubungan yang berupa jaringan kerja (*network*) yang saling tergantung satu sama lain. Potensi SDA hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SDM yang memiliki kualitas dalam suatu institusi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pemanfaatan seluruh sumber daya tersebut secara optimal maka diperlukan keseimbangan di antara ketiganya.

Dalam program transmigrasi, transmigran dan nontransmigran yang hidup di sekitar unit penempatan sama-sama dianggap sebagai potensi SDM. Kedua pihak ini berhubungan sedemikian rupa menciptakan roda interaksi sosial, budaya, dan yang lebih penting ialah bisnis/ekonomi. Perputaran uang di kalangan mereka menggerakkan perekonomian setempat, lalu

menjalar lebih luas di dalam daerah. Segenap potensi yang ada di sekitar orang-orang yang terlibat serta berhubungan dengan transmigrasi bakal digarap untuk tujuan kesejahteraan umum.

Manfaat transmigrasi lainnya yang diklaim pemerintah bakal terwujud ialah merosotnya kesenjangan tingkat pertumbuhan wilayah. Kesenjangan wilayah memang suatu dampak yang berpotensi terjadi seiring dengan kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi negara.

Menurut Richardson dan Bae (2005), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah, antara lain: (1) banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan; (2) belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis; (3) kesenjangan pembangunan antara desa dan kota; dan (4) rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Untuk itu, transmigrasi menawarkan alternatif sebagai upaya mengentaskan kesenjangan tersebut. Keempat persoalan ini hendak disingkirkan dengan mewujudkan empat hal berikut (Suparno, 2009):

1. Rekayasa ruang dan orang yang arahnya untuk mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan nasional;
2. Pengembangan usaha dan budidaya di permukiman transmigrasi diarahkan untuk mendukung kebijakan energi alternatif dengan mengembangkan budidaya tanaman bahan bio-energi seperti kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, dan juga jarak pagar;
3. Mengembangkan daerah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal dan terisolir, yang mana ini merupakan upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah;
4. Kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam pengembangan investasi, sehingga nantinya transmigrasi

akan mampu mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan.

Biarpun memiliki lahan belum tergarap yang cukup luas serta prospektif, nyatanya sebagian besar daerah tujuan transmigrasi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Biasanya, argumentasi yang dipakai dalam menjelaskan persoalan ini adalah karena potensi-potensi yang prospektif di daerah tujuan tersebut belum digarap secara terampil, meluas, dan melibatkan warga-petani yang terlatih. Agar semua itu bisa dilakukan, transmigran yang telah dilatih oleh pemerintah merupakan solusinya. Maka pengiriman transmigran sering dipromosikan pemerintah sebagai praktik pengiriman tenaga terlatih ke daerah tujuan transmigrasi. Tenaga-tenaga terlatih ini nantinya dapat berkolaborasi dengan penduduk tempatan yang umumnya masih miskin pula.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar: makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Memakai penjelasan Sapta & Supartono (2005), faktor penyebab kemiskinan ada delapan:

1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Tingkat upah rendah
4. Ketidakseimbangan distribusi kesempatan kerja
5. Kualitas sumber daya manusia rendah
6. Etos dan motivasi pekerja yang rendah
7. Kultur atau tradisi yang menghambat perilaku untuk mencapai kemajuan
8. Politik yang belum stabil

Kolaborasi transmigran dengan penduduk asli dipercaya akan membawa mereka bersama-sama ke arah kesejahteraan. Dengan begitu, kemiskinan pun tereduksi secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan terwujudnya kesejahteraan, kepercayaan terhadap transmigrasi, khususnya pemerintah, bisa terbangun. Situasi ini akan menguntungkan pemerintah saat hendak menggelar program-program lainnya. Saat pemerintah mengajak orang-orang yang sudah sejahtera untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, ajakan ini akan mudah diterima ketimbang ketika mereka berada dalam keadaan sebaliknya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mawujud dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena tumbuh dari unsur-unsur sosial-budaya masyarakat Indonesia itu sendiri; yang ditempa dalam jangka waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.

Kendala-Kendala Transmigrasi

Praktik penyelenggaraan transmigrasi selama ini hanya berkesan pada target jumlah transmigran tanpa diiringi dengan kualitas yang memadai dari para transmigran, dalam arti mereka siap sebagai SDM yang dapat pula menggerakkan sistem ekonomi di tempat baru. Akibatnya, banyak transmigran berubah profesi dari petani menjadi pekerja lain demi menyambung hidup.

Banyak transmigran yang pada akhirnya menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, supir, pekerja informal, bahkan pengangguran. Hal ini, tentu akan membawa dampak yang pada akhirnya menjadikan kendala bagi penduduk lokal, yakni menciptakan dilema bagi wilayah setempat.

Berikut adalah kendala-kendala transmigrasi yang dipetakan:

1. Lokasi transmigrasi

Lokasi transmigrasi pada umumnya berada di daerah yang relatif masih terisolasi. Sebagai daerah pengembangan

baru, prasarana dan sarana ekonomi seperti pasar, kelembagaan keuangan, koperasi, dan penyuluhan belum berkembang.

2. Kondisi sarana dan prasarana

Terbatasnya prasarana dan sarana pemasaran ini di samping menghambat pemasaran hasil produksi dari daerah transmigrasi juga membatasi masuknya barang dan jasa seperti sarana produksi pertanian yang dibutuhkan oleh transmigran. Kondisi ini juga menyebabkan kurangnya daya tarik daerah tersebut bagi dunia usaha.

Sebaliknya, kondisi prasarana dan sarana yang lebih baik di pulau Jawa dapat mengurangi minat dunia usaha untuk menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa, termasuk di daerah transmigrasi. Hal tersebut juga merupakan kendala dalam mengembangkan daerah transmigrasi.

3. Lahan pengelolaan

Sebagian daerah transmigrasi memiliki lahan pertanian yang kurang subur, serta ketersediaan peralatan pertanian terbatas. Hal ini mengakibatkan para transmigran tak dapat mengolah seluruh lahan yang dikuasainya secara optimal.

Rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi usaha tani, ditambah rendahnya tingkat pengetahuan para transmigran, akhirnya bermuara pada rendahnya produktivitas usaha tani di daerah transmigrasi sehingga kemampuan para transmigran memperoleh pendapatan yang layak juga terbatas.

Di samping itu, beragamnya latar belakang penghidupan dan kehidupan sosial budaya masyarakat

selain merupakan potensi dinamika masyarakat sekaligus juga adalah kendala yang perlu diantisipasi.

4. Lemahnya kelembagaan

Kelembagaan transmigrasi masih lemah, khususnya kemampuan dalam koordinasi pembangunan antarsektor. Mulai dari penyediaan ruang, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun di lapangan.

5. Konflik atau perang

Di beberapa daerah, transmigrasi terkendala oleh gangguan keamanan akut yang berlangsung. Konflik sosial antarmasyarakat maupun konflik politik antara daerah dengan pemerintah, yang diejawantahkan dengan perseteruan bersenjata, telah mengancam keselamatan ribuan transmigran yang telah menetap di daerah tersebut. Tidak sedikit yang terusir bahkan terbunuh. Dalam konteks konflik yang didasari pada ketidakadilan akibat transmigrasi, transmigran tentu saja menjadi salah satu sasaran utama dalam konflik yang berlangsung.

BAGIAN 2

Etnisitas dalam Transmigrasi di Indonesia

Setiap perpindahan tidak mungkin bisa mengelak dari perbedaan. Setiap penduduk yang dipindahkan ke tempat yang lain pasti akan berhadapan dengan hal-hal berbeda dengan mereka. Perbedaan ini kadang tak bisa menghindari terciptanya permusuhan sosial baru, entah itu berlangsung begitu saja ataupun secara bertahap, dalam jangka waktu sebentar ataupun berkepanjangan. Setiap kelompok penduduk tentu memiliki keunikan. Sebagian keunikan tersebut ada yang bisa diasimilasi dengan komponen keunikan komunitas lain, sedangkan sebagian lainnya berseberangan sama sekali. Untuk asimilasi ini, guna mewujudkan stabilitas sosial, perlu ada setidaknya satu pihak yang mengalah. Dalam konteks perpindahan penduduk, yang dituntut selalu mengalah tentu saja para pendatang. Sebagaimana bunyi sebuah kearifan yang dipegang teguh masyarakat Nusantara: "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung".

Institusi seperti keluarga, media, sekolah, etnik, atau komunitas religius semuanya dipahami sebagai bagian dari jaringan yang saling terhubung. Setiap lembaga-lembaga ini berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas masyarakat (Nye dan Berardo, 1973). Syarat terwujudnya suasana ideal seperti ini adalah telah dimakluminya perbedaan-perbedaan "wajar" yang ada. Struktur sosial dan organisasi sosial cenderung secara fungsional terkait satu sama lain, sehingga apa yang terjadi di satu bagian masyarakat

memengaruhi dan dibentuk oleh apa yang terjadi pada orang lain (Henslin, 2006). Nilai memberikan pedoman umum untuk mengatur perilaku dalam hal peran dan norma. Sebagai misal, dalam sebuah kelompok, perempuan mandi di sungai bersama-sama merupakan kebiasaan yang kelak terlihat seperti suatu keunikan dari kelompok tersebut. Ketika kelompok ini berpindah ke komunitas yang melarang perempuan mandi dengan cara demikian, norma kelompok tempatanlah yang mesti dipatuhi, yang mana dengan demikian mereka mesti mengeliminasi kebiasaan/keunikan dirinya itu. Meneruskan kebiasaan lama secara pasti mengarahkan keduanya dalam ketegangan sosial pada mulanya, lalu bisa berakhir pada pertikaian fisis pada akhirnya.

Manakala satu perubahan terjadi dalam sebuah kelompok, akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Masyarakat, dalam perspektif teori struktural-fungsional, merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Dalam pemahaman yang sederhana, masyarakat merupakan suatu sistem interaksi bagian-bagian yang mempromosikan stabilitas atau transformasi melalui interaksi mereka. Konsep ini menyarankan, untuk memahami sistem sosial kita harus melihat bagaimana bagian-bagian dari sistem itu mendukung kegiatan-kegiatan dan keterkaitan para anggota sistem (Chilcott, 1998). Oleh demikian, struktur dan fungsi masyarakat saling berhubungan dan saling bergantung, dan akhirnya berfokus pada mempertahankan atau memediasi keseimbangan sosial (Radcliffe-Brown, 1935) serta transformasi yang diperlukan (Dale, *et al*, 2013b). Fungsi sistemis (yaitu bagaimana bagian dari sistem bekerja) di dalam dan di dalam

struktur berfungsi untuk memperkuat dan menjaga stabilitas struktur sistem di konteks sistem yang selalu berubah, kompleks dan tidak dapat di prediksi.

Setiap kelompok, baik kelompok "asli" daerah maupun pendatang (transmigran, misalnya), selalu merasa perlu memelihara dirinya di tengah pembauran. Pembauran yang dipahami dan diinginkan ialah tindakan yang tidak melenyapkan semua sub dalam konstruksi identitas diri. Pembauran tidak diinginkan seperti mengocok telur sampai bagian putih atau kuningnya hilang. Apa-apa yang inheren dan tidak bertentangan dengan acuan norma utama seperti agama dan kearifan setempat akan dipertahankan. Sementara sebagian lainnya "dikorbankan" dengan asimilasi. Yang terpenting, kompromi dalam asimilasi mesti berkontribusi untuk memelihara setiap kelompok. Pemahaman ideal inilah yang jadi titik tolak untuk menciptakan harmoni untuk kebaikan bersama. Para sarjana sosiologi dan antropologi mengenal proses ini sebagai suatu "evolusi", yakni terjadinya adaptasi yang damai terhadap struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan baru serta membatasi atau menghilangkan struktur yang sudah tidak sesuai atau sudah tidak diperlukan. Budaya dan nilai yang dihasilkan kemudian secara umum membentuk perekat kohesi sosial. Kebanyakan perubahan ini terjadi secara lamban dan melibatkan terjadinya pengguguran komponen institusi serta penyesuaian antarfungsi.

Institusi bukanlah produk dari keputusan yang dibuat individu-individu ketika ia sudah ada sebelum individu-individu itu lahir. Para anggotanya terlibat sebagai penerus, penyesuai dengan keadaan, dan penjaga agar institusi lama mereka tidak hilang. Semua orang bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Mereka tidak menyangkal adanya konflik, tetapi mereka percaya masyarakat dapat mengembangkan

cara mengendalikannya. Para ahli teori konflik melihat, kelompok-kelompok memperjuangkan kekuasaan dan pengendalian konflik hanya untuk menekan para pesaingnya (Wallace dan Alison, 1986: 62).

Bagaimana memahami dinamika antarkelompok dalam program transmigrasi barangkali dapat mengacu pada basis teoretis yang diajukan Durkheim. Durkheim mengungkapkan, masyarakat adalah sebuah kesatuan yang mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuatnya jadi seimbang. Bagian tersebut saling mengikat satu sama lain dan fungsional sehingga jika ada yang tidak berfungsi akan merusak keseimbangan sistem.

Secara modern, masyarakat yang rumit berisi anggota-anggota yang melakukan tugas sangat berbeda sehingga menghasilkan interdependensi yang kuat. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat yang rumit akan disatukan oleh solidaritas organik. Baginya, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat, yang disebut solidaritas sosial, dimantapkan oleh sosialisasi yang melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar semua standar atau aturan perilaku (Jones, 2009). Aturan-aturan kebudayaan yang sudah ada menentukan gagasan dan perilaku manusia melalui sosialisasi. Durkheim menerapkan kerangka fungsi sosial ini di semua studinya. Teori fungsional melihat bagaimana bagian-bagian dalam masyarakat memberikan sumbangan dan berfungsi pada berjalannya suatu masyarakat. Durkheim juga melihat bagaimana bagian-bagian dalam masyarakat tersebut menghasilkan kohesi sosial. Ia memfokuskan perhatian pada solidaritas sosial. Dalam bukunya *The Division of Labor in Society*, Durkheim menemukan bahwa pembagian kerja memberikan dasar baru solidaritas dalam

masyarakat yang mengalami diferensiasi dengan cepat (Turner dan Maryanski, 2010: 30).

Durkheim menghubungkan konsep sistem sosial dengan konsep solidaritas sosial dan integrasi sosial. Dia pun menjelaskan bahwa fungsi integrasi masyarakat menjadi kenyataan yang *sui generis* (sudah ada dengan sendirinya) dan tugas sosiologi adalah mempelajari sistem hubungan menggunakan statistik dan metode yang lain.

Dalam solidaritas terdapat kesadaran bersama, yang mana ia merupakan hasil kepercayaan, perasaan, dari seluruh anggota masyarakat. Kesadaran individu akan terserap ke dalam kesadaran kolektif. Ini berarti bahwa kesadaran kolektif dapat menutupi kesadaran individu. Kesadaran kolektif menyelimuti seluruh masyarakat. Kedua kesadaran tersebut mempunyai aspek yang mirip, mempunyai dasar organis yang sama, dan terikat satu sama lainnya. Keduanya mempunyai satu entitas, keduanya bekerja dengan solidaritas, dan meningkatkan solidaritas. Ini disebut sebagai "solidaritas mekanis" (Anwar, 2011). Sementara itu, dengan perkembangan kerja yang semakin cepat, individu-individu tidak akan selamanya sama, sebab pekerjaan mereka mengikuti fungsi spesialis. Akan tetapi, perasaan solidaritas mengikuti pembagian kerja yang membawa kepada posisi saling melengkapi. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan bersama sebagai sumber perasaan solidaritas dari macam-macam peradaban tertentu.

Di samping upaya diri dengan cara berasimilasi, kelompok pendatang juga bergantung pada struktur yang lebih kuat, lebih besar, atau berada di atas, untuk memperoleh jaminan atas keamanan/keselamatan dirinya dari tekanan-tekanan yang tidak mampu ditangani sendiri. Struktur itu bisa jadi formal maupun informal. Yang formal adalah negara. Dalam hal transmigrasi, ia berarti lembaga negara yang mengurus ketrasmigrasian serta

militer yang dilibatkan di dalamnya. Yang informal, yakni lembaga atau individu di ruang sosial yang punya pengaruh kuat, misalnya kelompok-kelompok bersenjata atau individu yang dengan kekayaannya bisa menciptakan suatu entitas penekan yang sangat diperhitungkan karena sukar dikalahkan.

Dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcott Parson, masyarakat berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas (Craib, 1986: 58). Parsons, sebagai seorang sosiolog, telah berjasa dalam memotret kondisi masyarakat dengan teori sistem sosial, adaptasi sosial, dan tindakan sosial. Teori sosiologi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan realitas sosial dengan memahami secara obyektif kondisi masyarakat. Masyarakat, menurut Parsons, merupakan jalinan dari sistem yang di dalamnya berbagai fungsi bekerja seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus, dan bentuk-bentuk kohesi sosial lainnya.

Berjalannya fungsi yang berbeda-beda itu disebut sebagai "spesialisasi". Artinya, setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis. Satu organ dapat dikomandoi organ lainnya, tetapi tidak yang memberi perintah berkedudukan lebih tinggi. Artinya terjadi hubungan timbal balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. Kesemuanya itu membangun suatu bentuk koordinasi antarsistem sosial (Syawaludin, 2015).

Eksistensi masyarakat yang di dalamnya terdiri dari sistem sosial, sistem budaya, dan sistem materi, selalu membutuhkan suatu kondisi yang menciptakan keberadaan atau *condition of existence*. Menurut Parsons, kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik harus memastikan berfungsinya "AGIL": (A) *Adaptation*, (G) *Goal Attainment*, (I) *Integration*, dan (L) *Latensi* (Poloma, 2005; Hamilton, 1990; Ritzer, 2005). Uraian keempatnya sebagai berikut:

1. Adaptasi

Sebuah sistem yang berfungsi dalam akan mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebaliknya, menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Setiap masyarakat membutuhkan lembaga tertentu yang menjalankan fungsi adaptasi terhadap lingkungan yang merupakan fungsi eksternal. Adaptasi menyediakan sarana aspek instrumental untuk mencapai tujuan.

Dalam teori sosial, adaptasi merupakan sebuah cara untuk menjaga keseimbangan yang terdapat dalam diri individu dengan lingkungannya. Fungsi adaptasi termasuk dalam sistem ekonomi, yang operasinya dikuasai oleh "uang" sebagai medium. Sebagai media umum, uang adalah standar yang menetapkan nilai-nilai untuk semua barang dan jasa. Prinsip nilai dari uang adalah utilitas, yaitu rasionalitas spesifik dari subsistem ekonomi (Parsons, 1977). Salah satu argumen inti Parsons mengenai adaptasi adalah manusia telah mengembangkan fitur-fitur lebih tinggi yang membuat kehidupan sosial dan budaya jadi lebih kompleks. Karena manusia adalah makhluk hidup, adaptasi adalah pusatnya bagi semua makhluk hidup.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Fungsi ini berkaitan dengan kebutuhan sistem untuk memobilisasi sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan menetapkan prioritas di antara mereka. Fungsi ini memobilisasi motivasi para anggota masyarakat dan mengatur upaya mereka. Akan tetapi, dalam masyarakat, fungsi ini diberikan kepada lembaga politik karena disadari kekuasaan amat penting guna implementasi serta pengambilan keputusan.

3. Integrasi

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A.G.L). Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Fungsi ini dianggap sebagai "hati" dari paradigma empat fungsi (Wallace dan Wolf, 1980:36). Dengan integrasi berarti kebutuhan untuk berkoordinasi, menyesuaikan, dan mengatur hubungan di antara berbagai aktor (atau unit dari sistem seperti institusi) sehingga sistem adalah "entitas berkelanjutan". Menurut teori aksi umum, sistem sosial melakukan ini berfungsi. Sedangkan di masyarakat, lembaga hukum dan pengadilan dipercayakan untuk fungsi ini. Integrasi berkaitan dengan tujuan dan aspek internal dari sistem.

4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Setiap kelompok masyarakat harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki dirinya. Baik itu dengan memotivasi individu maupun membangun pola-pola kultural yang mampu mereproduksi motivasi (Ritzer dan Douglas, 2005: 121).

Fungsi ini juga berkaitan dengan masalah penyediaan pengetahuan dan informasi ke sistem. Dalam teori tindakan umum, budaya merupakan tempat penyimpanan pengetahuan dan informasi untuk menyelesaikan fungsi ini. Budaya bukanlah komponen yang bertindak sehingga tidak memiliki energi. Lain halnya dengan aktor, oleh karena ia bertindak maka memiliki energi yang mereka butuhkan untuk melakukan tindakan. Sederhananya, budaya ada "di belakang" tindakan orang. Hal itu disebut "laten".

Integrasi menangani dua hal, Pertama, memotivasi para aktor untuk memainkan perannya dalam sistem dan mempertahankan

pola, nilai, dan norma. Kedua, untuk menyediakan mekanisme dalam mengelola ketegangan internal antarbagian yang berbeda. Masalah yang dihadapi setiap masyarakat adalah menjaga sistem nilainya tetap utuh dan memastikan bahwa anggota sesuai dengan aturan. Itu menjadikan nilai-nilai sosial ditransmisikan dan diserap dengan benar. Latensi memberi arti untuk mencapai tujuan yaitu internal ke sistem.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari anggotanya serta mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Jika konflik akan menimbulkan kekacauan maka itu harus dikendalikan (Ritzer dan Douglas, 2005: 125).

Menurut Robert K. Merton (1947), masyarakat adalah suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan senantiasa ingin mewujudkan keseimbangan. Kecenderungan ini untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Perubahan sosial mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru. Dalam perspektif sosiologis, fungsi dibedakan menjadi dua menurut Merton, yakni fungsi *manifest* dan fungsi *latent*.

Fungsi *manifest* merupakan pola-pola tingkah laku yang diharapkan dan dikenal dalam aktivitas masyarakat atau fungsi yang secara nyata diakui. Misalnya, institusi atau lembaga agama berfungsi untuk mempertahankan moral masyarakat; institusi pendidikan formal berfungsi sebagai jalan yang dipakai mencapai

suatu kedudukan (sosial) yang lebih tinggi. Sebaliknya, fungsi *latent* (fungsi yang tersembunyi), tidak mengenal hal demikian.

Merton mengembangkan gagasan awal tentang *dysfunction* yang diartikan bahwa struktur atau institusi (di samping dapat menyumbang pemeliharaan bagian-bagian lain dari sistem sosial) dapat pula menimbulkan akibat negatif terhadap sistem sosial. Merton juga mengemukakan konsep *nonfunctions* yang didefinisikannya sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan. Masyarakat seyogyanya bekerja sama dalam keselarasan atau konsistensi internal yang memadai "tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau diatur".

Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah "bertentangan dengan fakta". Sebagai contoh, dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain. Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi kelompok lain (Jonathan, 2000:62-66).

Dalam masyarakat yang mendambakan kesejahteraan, struktur yang seimbang lebih disukai daripada struktur yang tidak seimbang. Penekanannya adalah bahwa struktur yang tidak seimbang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman dari pengaruh negatif. Dan perasaan negatif ini mendorong orang berjuang untuk menciptakan struktur yang seimbang sambil menghindari situasi sebaliknya.

Teori keseimbangan mengasumsikan, hubungan positif dapat dihasilkan dari persepsi bahwa dua objek atau individu milik bersama. Sebaliknya, hubungan negatif dapat dihasilkan dari persepsi bahwa dua objek atau individu bukan milik bersama. Hubungan semacam ini biasanya disebut "hubungan unit".

Hubungan unit positif dapat dihasilkan dari segala jenis kedekatan, kesamaan, atau kedekatan, seperti keanggotaan dalam tim sepak bola yang sama, gaya rambut yang sama, atau latar belakang etnik yang sama. Sebaliknya, hubungan unit negatif dapat dihasilkan dari jarak, ketidaksamaan, atau perbedaan, seperti keanggotaan dalam tim sepak bola yang berbeda, gaya rambut yang berbeda, atau latar belakang etnik yang berbeda.

Dalam prinsip keseimbangan, jika suatu pengaturan dibuat jadi tak seimbang (misalnya memunculkan ketegangan), aktor sosial akan mengubah pengaturan sosial mereka untuk mengurangi ketidakseimbangan. Para transmigran yang mendapat tantangan atau ketegangan di daerah baru akan mengikuti pola ini, yang mana kemudian lahir budaya mengalah di kalangan transmigran. Tantangan atau ketegangan itu terutama soal kedudukan mereka sebagai kelompok etnik yang tidak sama dengan etnik yang mendiami daerah tempat tinggal baru mereka.

Saat ada dua etnik berbeda bertemu, tentu mereka membawa budaya dan adat istiadat masing-masing. Yang membuat kagum, budaya mengalah ini menjadikan kelompok etnik pendatang yang baru saja memulai hidup baru di "tanah orang" rela tidak menonjolkan budaya dan adat istiadat sendiri demi menciptakan keseimbangan yang nantinya mekar sebagai keserasian. Namun upaya menjaga keseimbangan ini dengan tetap mempertahankan anasir-anasir kebudayaan diri yang dinilai selaras dengan norma-norma sosial setempat.

Sambil itu, etnik pendatang dituntut untuk mempelajari budaya orang-orang setempat yang mereka harapkan jadi teman

dekat dan bahkan saudara. Kebudayaan yang dipelajari antara lain budaya berdagang dengan tujuan melancarkan transaksi ekonomi yang mesti mereka jalankan. Dalam adat pernikahan pun demikian. Pernikahan perempuan dari etnik Aceh dengan laki-laki Jawa, misalnya, menghadirkan keseimbangan dalam bentuk ekspresi yang mengombinasikan unsur-unsur kebudayaan dari kedua etnik tersebut. Situasi akan jadi tak lancar seperti itu bila salah satu pihak menutup diri untuk asimilasi. Kalaupun asimilasi terwujud, biasanya butuh waktu yang lama.

Tantangan atau hambatan lainnya adalah eksploitasi oleh elite terhadap masalah kependudukan. Sebagaimana fakta, demografi Indonesia sudah lama jadi objek rekayasa elite. Di samping tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang jelas, tujuan-tujuan politik juga menduduki tempat utama dalam program-program yang menyangkut isu demografi.¹ Pengisian daerah-daerah kosong di luar Jawa sudah menjadi tujuan kebijakan yang politis sejak zaman kolonial. Setelah kemerdekaan, integrasi nasional menjadi tujuan utama dan menjadi alasan intervensi yang terus-menerus dilakukan dalam bidang demografi. Di samping itu, anggaran yang besar dari sumber negara ditambah bantuan luar negeri menjadikan masalah demografi sebagai lahan yang cukup menggiurkan bagi elite. Transmigrasi dari pulau Jawa ke luar Jawa dibantu oleh World Bank.

Jawanisasi dan Ketegangan yang Menyertainya

Dengan adanya program transmigrasi ini, maka kepentingan Jawa di luar Jawa dijamin oleh transmigran dan keturunannya. Mereka akan merasa bahwa negeri-negeri di luar Jawa adalah

¹ Rekayasa demografi adalah istilah yang dipinjam dari Bookman (1997), dan secara umum didefinisikan sebagai upaya negara untuk membentuk ulang komposisi suku demografi penduduk untuk berbagai tujuan strategis.

tanah air mereka dan milik mereka. Sehingga tidak jarang ditemukan bahwa mereka menganggap bahwa program transmigrasi merupakan program "Jawanisasi" yang kemudian dikembangkan sebagai sebuah pemahaman dalam kebijakan transmigrasi.

Satu hal yang mencengangkan dari Jawanisasi, menurut Buchori (1982), adalah fakta bahwa prosesnya menjalar ke mana-mana dan meresap di mana-mana. Kenyataan ini cukup menjadi bukti bahwa amat besarnya kekuatan pengaruh etnik Jawa. Dalam birokrasi Indonesia titimangsa Orde Baru, Jawanisasi jelas tampak dan dengan mudah dapat ditemukan. Birokrasi yang mengurus transmigrasi, utamanya, diisi oleh orang-orang Jawa dengan semangat Jawanisasi. Alhasil budaya birokrasi dan politik Indonesia rasanya tidak bisa dijelaskan tanpa menjelaskan apa-apa yang mengonstruksi "kepentingan Jawa". Fachry Ali (1986), misalnya, dengan yakin menyebut sistem politik dan kekuasaan yang berkuasa di Indonesia adalah sistem kekuasaan Jawa. Para birokrat yang non-Jawa pun senantiasa berperilaku seperti orang Jawa.

Jawanisasi juga menampakkan coraknya di dalam regulasi. Ketika kita berbicara sejarah peraturan desa, penyeragaman struktur berbasis konstelasi Jawa dapat ditemukan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang memaksakan penerapan "desa" di seluruh Indonesia. Banyak pihak menilai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan pengejawantahan Jawanisasi. Pemerintah menerapkan model "Desa Jawa" untuk kesatuan masyarakat adat di luar Jawa. UU ini segera menegaskan keberadaan nagari, *huta*, *sosor*, *marga*, *binua*, *lembang*, *parangiu*, dan konstelasi-konstelasi lokal lain-lain yang di luar Jawa. Pemerintah memaksa semua itu menjadi bagian yang seragam dalam bentuk desa (kadang disebut kelurahan). Bahkan terjadi *regrouping* desa akibat pemaksaan tersebut, sehingga desa-desa

yang telah hidup ratusan dan ribuan tahun menjadi “lenyap” karena dilebur.

Rusbiantoro (2001) menyerang Jawanisme dengan menyebutkan sebagai ideologi fasis yang melahirkan praktik Jawanisasi dan militerisasi. Melalui dua alat yang keras ini, Indonesia diseragamkan (sebenarnya lebih tepat disebut “dirusak”). Aspek-aspek multikulturalisme, multiras, multiagama menjadi retak. Jawanisasi berarti men-Jawa-kan setiap yang ada di luar Jawa. Namun Jawanisasi yang berkembang dengan baik sejak masa raja-raja di Nusantara berbeda dengan yang dipraktikkan sejak Orde Baru. Pada masa kerajaan, Jawanisasi tidak dengan membangun sebuah sistem yang menundukkan kekuatan-kekuatan non-Jawa. Yang ada adalah kolaborasi antarsistem yang dianut pada kerajaan-kerajaan di wilayah berbeda sehingga Jawanisasi bukan memusat, namun meluas tanpa menghilangkan sistem yang ada. Ibarat lampu mulai bercahaya, semakin bercahaya dan semakin terang. Praktik Jawanisasi yang berkembang pada masa Orde Baru berbeda, yaitu dengan membuat Jawa jadi dominan. Ibarat bola lampu yang cuma menerangi dalam, bukan bagian luar.

Aceh yang dikenal dengan nama Serambi Mekkah memiliki keunikan dari segi budaya dan etnik. Aceh bukanlah wilayah yang homogen, tetapi heterogen.² Konflik yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh selama ini lebih disebabkan oleh pertentangan antara kebencian rakyat Aceh terhadap NKRI yang mengatakan bahwa, Jawa merupakan sentral pemerintahan Indonesia, tidak meratanya pembangunan, dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh

² Masyarakat Aceh dari segi suku bangsanya memiliki keunikan tersendiri. Karena menggambarkan suatu integrasi etnik atau campuran etnik yang akhirnya menjadi etnik baru yang disebut Aceh. Etnik Aceh diduga berasal dari India dan Timur Tengah, memiliki kemiripan dengan etnik Melayu yang hidup di Nusantara maupun di Semenanjung Melayu lainnya. Lihat A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, 2003: 7.

pemerintah Indonesia terhadap provinsi-provinsi di luar Jawa menyulut kebencian terhadap etnik Jawa yang tinggal di Aceh. Pengusiran etnik Jawa dari tanah Rencong merupakan sebuah realitas, seakan-akan kehadiran para transmigran sebagai ancaman, meskipun ada alasan lain yang menjelaskan mengapa pertentangan itu muncul ke permukaan.³

Dari segi ekonomi, Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Namun eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu faktor penyulut konflik. Konflik semakin memuncak ketika ditemukannya ladang gas alam Arun. Beroperasinya kilang gas Arun tahun 1977 di Lhokseumawe menjadikan wilayah ini sebagai kawasan industri strategis. Sebagai gambaran, tahun 1993 dari 6,644 triliun penghasilan bersih negara dari sektor migas, hanya 453,9 miliar yang kembali ke Aceh. Kekayaan daerah tersebut terserap ke pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan ke Aceh untuk keperluan pembangunan sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kekecewaan-kekecewaan rakyat Aceh terhadap bangsa Indonesia, sehingga memunculkan sebuah pemberontakan yang memakan banyak korban jiwa.

Dalam sebuah bangsa yang multietnik, integrasi sosial dan integrasi nasional adalah sebuah permasalahan yang tidak akan sepenuhnya tuntas, konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah sebenarnya. Masalahnya, konflik ideologi menjadi masalah dan sumber kehancuran ketika disertai dengan tindakan

³ Alasan klasik selain persoalan kesenjangan kelas ekonomi antara pendatang dan penduduk asli, kesenjangan posisi pada sektor formal, juga benturan budaya. Khusus orang Aceh dominan disebabkan oleh alasan politik, yang oleh orang Aceh, transmigran Jawa dianggap pagar betis Indonesia untuk meredam pemberontakan berdiri dengan tujuan penggalian kekayaan alam sehingga menjadikan Aceh sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.

penjarahan dan kekerasan. Dan sejak reformasi 1998 di Indonesia, konflik kekerasan antar kelompok (*Intergroup conflict*) yang mengusung label-label etnik pecah di banyak tempat di Indonesia. Kekerasan-kekerasan antar etnik tersebut lebih jauh dikhawatirkan dapat menciptakan terjadinya penghancuran kerekatan sosial dalam masyarakat. Rusaknya kerekatan sosial saling mempercayai antar kelompok sosial, saling bermusuhan atau bahkan saling meniadakan.

Pemujaan terhadap kelompok etnik, demikian pernah disebutkan Harrold Issac, penuh dengan keindahan yang memikat dan kekejaman yang mematikan (Wahyudin, 2002). Dalam rentang waktu 1945-1975 diperkirakan jumlah orang yang meninggal karena pertentangan etnik di dunia mencapai 10 juta orang (James, 1998). Sementara di Tanah Air, seperti banyak terjadi, kekerasan dengan label etnik merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Atas nama kelompok dan kepentingan etnik, sering terjadi pengusiran, pembunuhan, atau penolakan terhadap. Hal ini disebabkan tidak lain karena konflik ideologi yang kerap terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan kekhawatiran rusaknya kerekatan sosial sebagai bangsa ini, dalam sebuah diskusi Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa Indonesia akan tinggal kenangan jika dalam sepuluh tahun ke depan para pemimpin tidak menyadari pluralitas bangsa. Berkaitan dengan kekerasan dan konflik ideologi yang mengikutsertakan konflik etnik, Harian Kompas menurunkan artikel *Sebuah Kenangan tentang Negeri Indonesia* (1 Maret 2001). Artikel tersebut menegaskan, bila kerusuhan dan konflik antar etnik dibiarkan atau salah penanganan, bukan mustahil sejarah bangsa ini akan memasuki zaman kesukuan baru dan meruntuhkan keberadaan Republik Indonesia.

Kelompok etnik, demikian James G Kellas, adalah kelompok yang *exlusive or ascriptipe*, di mana *membership in such group is confined to those who share certain inborn attributes*. Atau menurut Donald L. Horowitz, terminologi etnik berkaitan erat dengan kelahiran dan darah, walaupun tidak selamanya selalu demikian. Karenanya, bagi sebagian besar anggotanya identitas etnik berkaitan dengan dasar kesamaan darah (kelahiran). Ikatan-ikatan etnik kemudian berkembang dan terwujud dalam kumpulan orang, kelengkapan-kelengkapan primordial seperti derajat, martabat, bahasa, adat istiadat dan atau kepercayaan yang dibebankan atas setiap anggotanya.

Menurut Raharjo (dalam Gustina, 2002: 1), kontak atau pertemuan dua etnik atau lebih di daerah pemukiman transmigrasi akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu yang bersifat positif dan yang bersifat negatif sebagai perwujudan dari proses interaksi. Akan menimbulkan positif apabila mereka mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis di daerah tujuan mereka. Kemudian sebaliknya akan muncul hal yang bersifat negatif apabila masing-masing etnik tidak mampu memahami budaya etnik lain yang ada di sekitar mereka, sehingga menimbulkan banyak potensi konflik.

Konflik etnik yang terjadi antara kedua pihak mengandung unsur politik yang beragan sebab. Kasus antara etnik Jawa dengan Aceh bertalian dengan kebijakan politik yang menjurus kepada ketidakadilan ekonomi, yang berefek munculnya prasangka etnik Aceh dan pribumi pendatang, terutama etnik Jawa. Hal di atas menunjukkan bahwa potensi konflik, baik bernuansa etnik maupun bangsa, dengan beragam pemicunya masih menjadi ancaman dan tantangan dalam kehidupan berbangsa yang akan mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa (Abdullah, 2015).

Kleden (1999) menilai, permusuhan dan kekerasan terhadap sebuah kelompok etnik, seperti yang terjadi pada kelompok etnik Jawa, tidak pernah terjadi secara murni etnik. Memang benar, perbedaan etnik, budaya, dan ras bisa menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak dengan sendirinya menimbulkan permusuhan antaretnik yang mendalam, yang membawa kepada kekerasan. Perbedaan budaya dan identitas etnik, paling mungkin hanya menimbulkan salah pengertian. Hubungan antaretnik baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau disertai juga dengan dominasi politik ataupun ekonomi oleh etnik yang satu terhadap etnik yang lain. Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya sudah mengandung suatu kekerasan struktural, karena tidak merupakan hubungan setara, melainkan ditandai oleh keunggulan dominan satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain. Jika dominasi itu kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik, atau perbedaan yang terlalu besar dalam penguasaan aset dan penghasilan ekonomi, maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami depresi atau ketergantungan. Menyusul kemudian konflik antara pihak yang menguasai dan pihak yang merasa dikuasai, yang apabila mengalami eskalasi, dapat berkembang menjadi kekerasan.

Konflik ideologi yang tercermin dalam kelompok etnik sebagai luapan ketidakpuasan pembangunan selama ini seharusnya dihadapi dan dikelola secara baik oleh negara; dan bukan sebaliknya, dianggap sebagai penghambat integrasi bangsa. Dalam konflik etnik, kelompok mayoritas sering kali dikawatirkan sebagai kelompok yang mewakili simbol-simbol nasionalisme suatu bangsa karena merupakan kelompok dominan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kalangan mayoritas juga dapat tereksploitasi oleh kelompok minoritas yang berkuasa atau *the*

exclusive-majority. Merujuk pada era Orde Baru, realitas tersebut dialami oleh golongan etnik Jawa yang mayoritas, di mana oleh Orde Baru, banyak simbol budaya Jawa yang dipergunakan secara salah-kaprah untuk membangun struktur dan budaya politik yang sentralistis. Hal ini mengakibatkan komunitas Jawa secara otomatis menjadi ikut tertuduh dalam pembangunan budaya politik Orde Baru.

Sebagian besar orang Aceh menganggap bahwa program transmigrasi merupakan program "Jawanisasi". Yaitu program yang membawa seluruh aspek kehidupan orang Jawa ke tanah rantau. Misalnya, di beberapa daerah di Aceh, sudah banyak yang mengganti nama daerah tersebut menjadi nama daerah khas Jawa. Hal semacam ini tentu mengkhawatirkan masyarakat Aceh tentang tujuan dari transmigrasi sehingga menyulut konflik yang mengatasnamakan etnik.

Jurnal Nanda Winar Sagita yang berjudul "Konflik Antar Etnik di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnik Jawa dan Etnik Aceh Tahun 1989-2015" (2016) memaparkan hubungan sosial antara masyarakat sebelum terjadinya konflik di kampung Gayo Murni, Kabupaten Aceh Tengah, dan dampak yang ditimbulkan kemudian. Penelitian ini membahas interaksi yang terjadi antara etnik Gayo yang berada di Aceh Tengah dengan masyarakat transmigran etnik Jawa. Sebelum terjadinya konflik, keharmonisan mewarnai hubungan antaretnik Gayo Murni. Kedatangan transmigran Jawa ke kampung Gayo Murni memberikan dampak positif pada saat itu karena Aceh Tengah masih dalam proses pembangunan. Sebelum konflik antara RI dengan GAM menyebar secara menyeluruh di daerah Aceh, kehidupan masyarakat umumnya masih harmonis. Baik kegiatan ekonomi maupun interaksi sosial sama sekali belum mengalami gangguan yang dapat berakibat fatal.

Perubahan kehidupan yang membentuk dinamika konflik terjadi ketika Aceh ditetapkan oleh rezim Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai wilayah darurat militer. Ini menyebabkan terjadinya konflik struktural. Banyak transmigran yang berasal dari Jawa yang menetap di Gayo Murni gelisah. Konflik yang dahulunya bersifat struktural berubah menjadi konflik kultural yang melibatkan etnik. Konflik yang terjadi antara etnik Jawa dengan etnik Aceh di Gayo Murni memiliki dampak yang berpengaruh kepada pola kehidupan masyarakat setempat. Dalam bidang sosial, banyak warga yang memutuskan untuk meninggalkan kampung tersebut. Dalam bidang ekonomi, adanya pelarangan bagi petani untuk masuk dan bekerja di kebun telah menyebabkan penurunan jumlah panen. Munculnya GAM mengakibatkan kekhawatiran terhadap keberadaan masyarakat transmigran yang berada di Kampung Gayo Murni.

Dalam *Perkembangan Etnik Jawa di Kota Banda Aceh: 1945-2015*, Sri Wahyuningsih menyebutkan, sejarah kehadiran suku Jawa di Banda Aceh telah dimulai sejak kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kedatangan orang Jawa ke Aceh sebagian besar dikarenakan proses pengiriman tenaga-tenaga kerja di perkebunan Belanda yang tersebar di sepanjang Sumatra.

Orang-orang Jawa di Banda Aceh susah beradaptasi karena adanya perbedaan budaya yang kuat. Di satu sisi, etnik Jawa ingin mempertahankan budaya nenek moyang mereka sehingga sangat sulit untuk menerima budaya orang Aceh menyebabkan proses adaptasi berjalan lamban. Proses adaptasi dimulai dengan asimilasi dan akulturasi budaya. Lambat laun, kedua budaya yang berbeda saling melebur dan membentuk hubungan baik. Dengan mengenal budaya masing-masing, kedua etnik dapat hidup rukun dan tenteram.

Seiring waktu, kehidupan orang-orang Jawa pun mengalami peningkatan, tidak lagi menjadi buruh, tetapi beralih ke pedagang, berjualan jamu, berjualan bakso, dan profesi-profesi lain tanpa melepas kekhasan orang Jawa. Tetapi pada tahun 2000, etnik Jawa yang berada di Aceh sempat mengalami masa suram karena mendadak muncul sekelompok gerilyawan yang menebarkan teror anti-Jawa, yakni Gerakan Aceh Merdeka.

Konflik berkepanjangan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia awalnya tidak berpengaruh pada orang-orang Jawa. Tetapi konflik yang semakin meningkat membuat mereka sulit beraktivitas dan bekerja, ditambah lagi dengan adanya unsur keterlibatan orang-orang etnik Jawa yang dicurigai sebagai mata-mata Pemerintah Pusat. Situasi ini membuat keseharian etnik Jawa semakin rumit apalagi beberapa dari mereka ada yang bertempat tinggal di perkampungan Aceh. Tidak sedikit yang mendapat perlakuan kurang baik seperti dipaksa kembali ke Jawa oleh gerilyawan setempat. GAM mengklaim bahwa etnik Jawa adalah agen Pemerintah Pusat. Alhasil sebagian ada yang terpaksa pulang ke Jawa atas keinginan sendiri karena merasa takut dengan keamanan yang kian merosot.

Pada periode 1999 sampai 2002, banyak orang Jawa melarikan diri dari desanya. Ada ribuan orang Jawa yang meninggalkan Aceh. Sebagian besar melarikan diri ke Sumatra Utara dan ke Jawa. Jumlah perpindahan terbesar terjadi pada 2001. Sementara hingga September 2002 ada sekitar 178.000 pengungsi dari Aceh di Sumatra Utara. Konflik menyebabkan penataan kembali populasi yang besar diantaranya desa-desa di kabupaten yang sangat terdampak. Demikian dipaparkan Mathias Czaika dalam *Civil Conflict and Displacement: Village-Level Determinants of Forced Migration in Aceh* (2009).

Tidak semua orang Jawa yang pergi dari Aceh berdasarkan keinginan mereka sendiri. Sebagian besar boleh dikatakan merupakan korban pengusiran yang dilakukan oleh kelompok GAM. Motif pengusiran ini, selain mencurigai orang Jawa sebagai alat spionase pemerintah, adalah karena faktor perebutan sumber daya alam yang diperkuat sentimen kedaerahan. Aceh dijadikan sebagai tempat eksploitasi sumber daya alam sejak masa kolonialisme Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan pun rakyat Aceh masih memersepsikan Indonesia terbentuk sebagai sebuah "kekaisaran kolonial di bawah kendali Jawa" (McCarthy, 2007).

Kemarahan rakyat Aceh terhadap Jawa merupakan representasi kemarahan mereka terhadap pemerintah pusat, karena Jawa dianggap sebagai bagian politik dari pemerintah pusat. Dari sini, lahirlah perjuangan pemberontakan untuk mengamankan sumber daya alam yang dimiliki oleh Aceh. GAM membenci orang-orang Jawa dan terjadi eskalasi kekerasan terhadap mereka dalam serbaneka bentuk, utamanya adalah pengusiran besaran-besaran.

Pengungsian juga didorong oleh faktor kerentanan pangan. Ketika konflik semakin memanas setelah kejatuhan Soeharto, orang-orang Jawa—sebagaimana orang-orang Aceh—kesulitan mencari rezeki. Pertanian tidak berjalan dengan baik. Cekaman rasa takut membuat para transmigran lebih memilih menetap di rumah atau desanya. Kesulitan bekerja tentu berujung pada kesulitan memenuhi pangan keluarga. Situasi ini ditemukan oleh peneliti Amiruddin Ketaren yang dijabarkan dalam artikel "Konflik GAM-RI dan Kerentanan Pangan Masyarakat Transmigran: Studi Kasus di Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh" (2018).

Menurut temuan Ketaren, perjuangan orang-orang Jawa di Cot Girek dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah perang bukanlah perkara yang mudah. Pada keadaan kehidupan yang rutin

atau normal saja sulit untuk menemukan sistem budaya yang mengatur tentang ketahanan pangan, apalagi dalam masa sulit ketika terjadi konflik bersenjata. Perang menyebabkan kelangkaan pangan, terutama beras. Kegiatan produksi, penyediaan, dan pendistribusian pangan sulit dilakukan mengingat situasi keamanan yang tidak kondusif. Banyak yang kemudian berlindung dan mencari jaminan pangan dalam waktu yang lama di tempat pengungsian, dari hitungan hari hingga lebih dari satu tahun.

Kesulitan hidup para transmigran Jawa di Aceh terjadi secara meluas. Alhasil, eksodus besar-besaran ke tempat-tempat lokal yang aman maupun luar daerah terjadi dengan sangat mencolok. Bahkan, orang-orang Jawa menyewa bus yang khusus akan membawa mereka keluar dari Aceh, menuju tempat penampungan sementara di Sumatra Utara. Sebagian ada yang pergi dari Aceh sebentar saja. Setelah beberapa bulan di pengungsian dan mendapat kabar bahwa unit-unit penempatan transmigran di Aceh sudah aman karena dijaga aparat bersenjata, mereka kembali di kampungnya di Aceh. Namun ada pula yang pergi tanpa pernah kembali. Mereka meninggalkan Aceh secara permanen biarpun situasi sudah aman.

Di tengah-tengah peristiwa eksodus besar-besaran itu, ada sebuah kampung di Kabupaten Aceh Utara yang penduduknya mampu bertahan. Mereka tidak ikut eksodus seperti warga desa-desa tetangga. Kampung itu bernama Dusun Bukit Hagu.

BAGIAN 3

Transmigrasi di Daerah Konflik: Kisah Tidak Terusirnya Transmigran Jawa di Gampong Bukit Hagu

Mengenal Gampong Bukit Hagu

Gampong Bukit Hagu adalah sebuah desa yang amat jauh dari jalan raya Medan-Banda Aceh. Terletak di pedalaman Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, desa ini sangat terpencil, yakni sekitar 25 km dari pusat perdagangan Lhoksukon yang berada persis di kedua sisi jalan raya. Daerahnya berbukit-bukit, dikelilingi hutan, dengan sarana—terutama jalur transportasi—yang jauh dari memadai.

Ketika saya melakukan penelitian, untuk sampai ke sana kita harus melalui sebagian jalan yang belum teraspal, yang ketika setelah hujan cukup berlumpur sehingga menyulitkan perjalanan. Mereka yang memerlukan jalan untuk aktivitas sehari-hari—seperti pedagang dan anak sekolah—amat menderita ketika tiba di bagian jalan tersebut. Kadang-kadang, sepeda motor yang dikendarai pelajar jatuh sehingga seragam sekolah mereka kotor. Namun untungnya, ada bagian jalan yang masih teraspal bagus dan jaraknya lumayan panjang.

Bukit Hagu lahir pada dasawarsa kedua pemerintahan Orde Baru. Waktu itu, kebijakan pembangunan nasional masih berkonsentrasi pembukaan desa-desa baru di luar Jawa. Generasi pertama Bukit Hagu adalah mereka yang datang pada tahun 1987.

Mereka pergi dari Jawa dengan memikul harapan terciptanya kesejahteraan diri serta keluarga. Provinsi Aceh memang merupakan salah satu *tanah sabrang* prospektif yang dijadikan tujuan program transmigrasi oleh pemerintah. Program transmigrasi di Aceh mulai berjalan sejak tahun 1964 ditandai dengan kedatangan sekitar 100 kepala keluarga (KK) warga transmigran dari pulau Jawa ke daerah tujuan transmigrasi seperti di Blang Peutek, Padang Tiji, dan Kabupaten Pidie. Namun, tidak berselang lama, yaitu pada tahun 1973 pemerintah kembali melakukan pembukaan kawasan baru bagi transmigran di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam sejarahnya, Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kerajaan Islam di pesisir Sumatra, yaitu Kerajaan Samudera Pasai. Bekas kerajaan ini sampai sekarang masih bisa ditemukan di Kecamatan Samudera Geudong. Kerajaan ini merupakan tempat pertama kehadiran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511, hingga masa penjajahan Belanda.⁴

⁴ Secara *de facto* Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliiek di Samalanga. Dengan surat Keputusan *Vander Geuvement General Van Nederland Indie* tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Aceh dalam enam *Afdeeling* (kabupaten) yang dipimpin seorang *Asistent Resident*, salah satunya adalah *Affleefing Noord Kust Van Aceh* (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie. *Afdeeling Noord Kust Van Aceh* dibagi dalam tiga *Onder Afdeeling* (kewedanaan) yang dikepalai seorang *Countroleur* (Wedana) yaitu: (1) *Onder Afdeeling Bireuen*, (2) *Onder Afdeeling Lhokseumawe*, (3) *Onder Afdeeling Lhoksukon*. Selain *Onder Afdeeling* tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (*Zelf Bestuur*) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurugok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik. Pada masa pendudukan Jepang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor I tahun 1957, Aceh Utara terbagi dalam tiga Kewedanaan: (1) Kewedanaan Bireuen, (2) Kewedanaan Lhokseumawe, (3) Kewedanaan Lhoksukon. Dua tahun kemudian keluar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 07/SK/11/Des/1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireuen.

Tahun 1974, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen. Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Dan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor

istilah *Afdeeling* diganti dengan *Bun*, *Onder Afdeeling* disebut *Gun*, *Zelf Bestuur* disebut *Sun*, Mukim disebut *Kun* dan gampong disebut *Kumi*. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949.

48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen. Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat, dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² terdiri dari 27 kecamatan. Ibu kota kabupaten adalah Lhoksukon.

Kecamatan Lhoksukon merupakan salah satu dari 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan ini beribukota di Lhoksukon, dengan luas wilayah mencapai 243 km² atau sekitar 24.300 hektare. Kecamatan ini terbagi ke dalam 75 desa. Peta Kecamatan Lhoksukon dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3. Peta Kecamatan Lhoksukon

Sumber: PODES Kecamatan Lhoksukon (2012)

Sejak tahun 1946 hingga saat ini, Lhoksukon telah dipimpin oleh 20 camat. Hampir semua gampong di Lhoksukon merupakan hamparan. Hanya ada tiga yang merupakan lereng: Gampong

Arongan LT, Buket Sentang, dan Bukit Hagu. Hanya sekitar 13 persen dari total luas wilayah yang merupakan persawahan. Sebagian besar merupakan perkebunan, termasuk Desa Bukit Hagu yang menjadi fokus dan area dari penelitian saya. Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas penduduk Lhoksukon bergerak dalam sektor pertanian. Hanya beberapa desa yang sumber mata pencaharian utama penduduknya dalam sektor perdagangan dan jasa.

Orang-orang Jawa datang ke daerah ini melalui program transmigrasi pada tahun 1987 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seluruh daerah pertanian yang terdapat di Lhoksukon dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada dasarnya, program transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah di Aceh Utara telah memicu lahirnya sentra-sentra produksi dan ekonomi baru bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai dampak positif dari keterpaduan pembangunan multisektor. Para transmigran Jawa yang mendiami Bukit Hagu berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Di tempat barunya yang masih berupa hutan belantara, mereka berjuang memenuhi kebutuhan harian dengan menanam singkong, bawang, cabe, dan lain-lain. Dan di samping menggarap lahan jatah seluas dua hektare, mereka pun bekerja sebagai petani kelapa sawit, petani kebun karet, atau berdagang kelontong.

Desa Bukit Hagu merupakan salah satu desa dari 75 desa yang terdapat di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Data dari BPS setempat menunjukkan bahwa Desa Buket Hagu merupakan desa terluas di wilayah Kecamatan Lhoksukon yaitu mencapai 2.186 hektare. Luas tersebut sekitar sembilan persen (9%) dari total luas Kecamatan Lhoksukon yaitu 43.000 hektare. Dari total keseluruhan luas Desa Bukit Hagu, sebagian besar untuk perkebunan.

Kondisi geografis desa Bukit Hagu memiliki perbatasan-perbatasan dengan desa lainnya. Sebelah Barat berbatasan dengan desa (gampong Seunebok Barat), di mana tidak ada penduduk transmigran yang menetap di desa ini. Penduduk yang menempati Seunebok Barat seluruhnya merupakan penduduk asli Aceh. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Cinta Makmur Kecamatan Baktia (berbeda kecamatan dengan Desa Bukit Hagu) merupakan desa transmigrasi yang ketika konflik semua warga transmigrasi mengungsi ke wilayah Sumatera Utara. Sebelah timur berbatasan dengan desa Babussalam, kecamatan Langkahan, penduduk desa ini adalah warga transmigrasi SP 5, ketika konflik seluruh warga desa, mengungsi ke luar Aceh. Bahkan di desa ini juga terjadi pembakaran rumah transmigrasi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Alue Leuhop, Kecamatan Cot Girek. Desa ini merupakan desa transmigrasi yang ketika konflik, sebagian penduduknya mengungsi ke wilayah Sumatera Utara. Sebagian dari penduduk tinggal menetap di desa, disebabkan karena wilayah ini merupakan dekat dengan wilayah kecamatan sehingga sudah banyak pos-pos polisi, TNI dan aparaturnya untuk bisa melindungi mereka dari keganasan GAM. Jarak antara desa ini dengan Bukit Hagu yaitu 8 km, yang sepanjang jalan ini berupa perkebunan warga dan tidak terdapat pemukiman penduduk. Kondisi jalannya masih merupakan wilayah Bukit Hagu berupa tanah dan sekitar 4 km sesudah batas desa kondisi jalannya berupa batu dan kerikil.

Perbatasan antara desa Bukit Hagu dengan desa-desa lainnya memiliki jarak yang jauh dengan pemukiman warga. Tidak hanya itu, akses transportasi kendaraan bermotor sangat susah, sehingga hanya di lewati melalui jalan yang setapak. Sehingga kondisi ini mengakibatkan desa Bukit Hagu merupakan desa yang terisolir dan jauh dari pemukiman warga. Desa Bukit Hagu merupakan desa

yang terletak di tengah-tengah gunung yang di sekitarnya dikelilingi oleh perkebunan warga dan tanah/lahan telantar yang berupa hutan-hutan rimba dan liar.

Desa Bukit Hagu, yang masuk dalam wilayah pemukiman Lhoksukon Tengah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara merupakan desa yang sangat terpencil. Data dari BPS setempat memperlihatkan bahwa jarak desa ini sekitar 25 km dari ibu kota Kecamatan yaitu Lhoksukon dan 47 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Lokasinya di daerah pegunungan dengan sarana jalan yang sangat jelek. Kondisi jalannya sebagian sudah berbatu dan sebagian lainnya masih tanah, sehingga jika musim hujan sangat sulit di lewati.

Akses sarana transportasi menuju ke Desa Bukit Hagu dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu jalan utama melalui Kecamatan Cot Girek. Dari jalan ini, jarak tempuhnya sekitar 35 km dengan keadaan jalan aspal. Dari kota Kecamatan Cot Girek menuju Desa Bukit Hagu berjarak 7 km yang keadaan jalannya berkerikil, bahkan sebagian masih berupa jalan tanah. Ketika musim kemarau datang, struktur jalan berubah menjadi banjir dan becek bahkan kadangkala tidak dapat dilalui. Jalur kedua dapat melewati jalan alternatif dari patok 3 (kira-kira 5 km dari kota Kecamatan Lhoksukon), yang merupakan jalan akses ke beberapa desa di sekitar Desa Bukit Hagu. Kondisi jalannya berbatu dan di beberapa lokasi juga masih berupa jalan tanah saja dengan jalur berbukit dan terjal. Kondisi jalan semakin parah jika musim penghujan karena air mengalir di badan jalan. Hal ini disebabkan tidak adanya parit (selokan) di kanan maupun kiri badan jalan sebagai saluran air. Akibatnya, jalan menjadi berlubang serta mengalami banjir walaupun terdapat banyak kerikil dan bebatuan di badan jalan karena terbawa arus air. Bahkan jalan kadangkala tidak bisa dilalui.

Penggunaan jalur alternatif ini banyak dilalui oleh masyarakat Bukit Hagu karena mempendek jalur yang dilewati. Jarak tempuh pada jalan alternatif ini dekat jika dibandingkan dengan jarak tempuh melalui jalan utama, yaitu hanya 20 km dari Ibu Kota kecamatan Lhoksukon. Selain jarak tempuhnya lebih dekat, juga akses akan kebutuhan hidup lebih banyak tersedia di Lhoksukon yang merupakan Ibu Kota Kecamatan sekaligus jalur utama Jalan Raya Banda Aceh-Medan. Pada jalur alternatif ini, terdapat beberapa perkampungan masyarakat Aceh (desa lama) dengan kondisi jalan beraspal pengerasan. Adapun selebihnya sekitar 15 km lagi berupa jalan menuju ke perkebunan warga desa, sehingga pemandangan di sebelah kiri dan kanan jalan berupa ladang dan perkebunan rakyat yang ditanami sayur-sayuran, kelapa sawit dan karet.

Desa ini memiliki satu kantor desa dan satu balai desa. Di desa ini juga ada dua sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas. Selain itu juga terdapat satu puskesmas dan dua puskesmas pembantu. Desa ini belum ada pasar, hanya toko dari para penduduk sebagai pusat perekonomian. Meski demikian, Desa Bukit Hagu memiliki satu koperasi unit desa (KUD).

Luas areal Desa Bukit Hagu mencapai 1625 hektare (ha). Dari areal tersebut 125 ha berupa perumahan warga transmigrasi dan selebihnya adalah perkebunan sawit dan karet. Setiap kepala keluarga warga transmigrasi mendapatkan tanah berupa pekarangan $\frac{1}{4}$ ha dengan bangunan rumah, pekarangan yang ditanami dengan beraneka ragam bunga dan terdapat juga bangunan kandang untuk ternak berupa ayam, bebek, kambing dan kerbau. Areal selebihnya di sekitar rumah ditanami dengan tanaman palawija dan sayur-sayuran. Adapun $\frac{3}{4}$ ha yang seharusnya diperuntukkan tanaman palawija di Desa Bukit Hagu,

seluruh warga transmigrasi menanam karet atau rambong. Lahan dua hektare (2ha) untuk perkebunan di Desa Bukit Hagu tersebut di kelola oleh KUD Diponegoro Mandiri dengan cara bagi hasil kolektif.

Masyarakat Buket Hagu memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Mengingat akan areal persawahan yang sangat luas, pertanian dan perkebunan menjadi pilihan masyarakat dalam strategi yang digunakan dalam menyambung kehidupan mereka. Di desa ini, profesi seperti PNS, pedagang dan lain memiliki persentase yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan profesinya sebagai petani. Tidak sedikit yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan mereka. Hal itu mereka lakukan karena tidak memiliki lahan sendiri untuk digarapnya. Biasanya yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani adalah mereka yang pada umumnya adalah anak dari para warga transmigrasi atau pecahan kepala keluarga dari keluarga induk yang merupakan warga transmigrasi yang memiliki lahan. Biasanya mereka datang secara pribadi ke desa Bukit Hagu, atau bukan bagian dari transmigrasi awal yang mendapatkan jatah tanah dari program pemerintah.

Keadaan rumah tempat tinggal penduduk di Desa Bukit Hagu umumnya sudah banyak berubah dari kondisi rumah bantuan ketika awal dari program transmigrasi. Menurut beberapa informan, rumah bantuan awal dari program transmigrasi sudah tidak ada lagi disebabkan sudah banyak yang melakukan renovasi menjadi permanen, maupun semi-permanen. Pemukiman warga sudah jauh lebih baik daripada keadaan pertama mereka datang transmigran ke desa Bukit Hagu. Sudah tidak terdapat lagi rumah warga yang murni rumah bantuan program transmigrasi. Terdapat 690 unit rumah di Desa Buket Hagu. Rumah tempat tinggal warga sudah berubah atau direnovasi menjadi permanen dan semi permanen atau memiliki ornamen yang lebih bagus. Sudah direnovasi menjadi

rumah berlantai semen. Pada awal transmigrasi, rumah yang mereka buat merupakan jenis rumah panggung yang hanya berasal dari bahan kayu dan papan.

Desa Bukit Hagu terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Harapan Mulia, Dusun Bukit Aman, Dusun Bukit Tenteram, Dusun Bukit Bahagia, Dusun Suka Damai, Dusun Sukorejo. Antara satu dusun dengan dusun yang lain, dihubungkan oleh jalan dengan kondisi berbatuan dan di beberapa tempat masih berupa tanah, kecuali 2 KM hampir mendekati desa Bukit Hagu terdapat jalan aspal sepanjang 800 meter.

Secara geografis Desa Bukit Hagu merupakan desa terisolir dan merupakan desa paling jauh dari ibu kota kecamatan yang sekaligus merupakan desa perbatasan dengan Kecamatan Cot Girek. Jarak dengan pemukiman penduduk (desa lama) sekitar 20 km. Rumah-rumah penduduk dengan pemukiman transmigran di Bukit Hagu lumayan jauh, itu pun hanya berupa rumah di ladang yang hanya difungsikan ketika mereka ke ladang untuk membersihkan, pemupukan dan yang paling sering ketika musim panen tiba. Dengan demikian proses komunikasi antara warga Aceh (desa lama) dengan warga transmigrasi sangat susah terjadi dengan penduduk yang berladang di sekitar wilayah Desa Bukit Hagu.

Generasi pertama transmigran Bukit Hagu datang saat Aceh sedang berada dalam suasana perang. Mereka tiba dan langsung membayangkan adanya potensi gangguan keamanan yang bisa menimpa komunitasnya. Apalagi, desa mereka berada di hutan pedalaman yang bisa jadi tempat persembunyian pemberontak. Kekhawatiran akhirnya mereda karena keadaan belumlah seperti yang mereka bayangkan. Walaupun datang ke Aceh di tengah konflik dan bara sentimen anti-Jawa, suasana Bukit Hagu waktu itu masih stabil. Daerah ini baru merasakan tekanan akibat konflik titimangsa

1997-1998. Sebelum itu, warga Bukit Hagu dengan baik membangun hubungan dengan orang-orang Aceh di sekitar mereka. Mereka pun mampu mewujudkan keseimbangan dalam interaksi sosial dengan masyarakat lokal. Hasil dari integrasi ini melampaui adanya rasa aman dalam diri masing-masing warga. Berkat lahirnya pengertian antaretnik ini, identitas kebudayaan etnik pendatang pun bisa diekspresikan secara terbuka. Ekspresi kebudayaan itu, antara lain, adalah pegelaran kesenian kuda lumping dan pernikahan sesuai tradisi Jawa (*mantenan*). Ketika berhadapan dengan identitas masyarakat lokal yang sudah mapan secara kolektif, penguatan identitas di kalangan orang Jawa juga menjadi isu penting. Capaian positif ini diutarakan oleh semua informan yang saya wawancara, yakni sebanyak 25 orang. Mereka terdiri dari tiga kelompok:

- Orang-orang Jawa yang mendiami Bukit Hagu
- Masyarakat Aceh yang berhubungan baik dengan para transmigran
- Bekas gerilyawan GAM.

Kehidupan harmonis antarsuku di Aceh punya akar riwayat yang dalam. Dalam konteks dengan Jawa, hubungan antara orang Aceh dengan Jawa bahkan sudah terjadi sejak masa Kerajaan Majapahit. Dimulai dari ketika Majapahit mengirimkan pasukan secara besar-besaran ke wilayah Sumatra termasuk Aceh sekitar tahun 1350 M. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Aceh dan etnis Jawa sudah terjalin jauh sebelum ada program transmigrasi. Dalam hubungan kedua etnik, terjadilah pola interaksi timbal balik, sehingga terbentuklah menjadi masyarakat baru. Terjadi adaptasi dari etnis pendatang terhadap etnis lokal. Demikian pula antara transmigran Jawa sebagai pendatang dengan masyarakat Aceh sebagai etnis lokal membentuk sebuah keseimbangan sosial.

Menurut Selo Soemardjan (1956), keseimbangan dalam masyarakat (*social equilibrium*) adalah suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dari masyarakat benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Secara psikologis, individu dalam kondisi keseimbangan sosial akan merasakan adanya ketenteraman, karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya atau menerima unsur yang baru dengan cara mengubah susunan lembaga kemasyarakatan. Apabila ketidakseimbangan dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian (*adjustment*), tetapi apabila tidak ada penyesuaian dinamakan ketidaksesuaian sosial (*maladjustment*).

Keberadaan keseimbangan sosial secara diam-diam dijalin ke setiap kejadian dalam lingkungan sosial. Di dalam masyarakat, ada pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat dengan memenuhi norma-normanya. Ketika keseimbangan sosial dipertahankan melalui kepatuhan pada norma-norma, semuanya dapat diprediksi, gerakan tidak berpengaruh, emosi tidak terganggu dan persepsi adalah konstan. Dengan kata lain, individu dapat terbuka dalam menghadapi permasalahannya. Namun ketika, seseorang anggota komunitas berani melanggar norma, dia menutup diri dan mengimbangi keseimbangan gerakan, emosi dan persepsi. Oleh karena itu, melalui tindakan fisik membuka diri, seseorang individu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial yang mengatur gerakan, emosi, dan persepsi (Bicchieri, 2011).

Tokoh kunci dari semua orang yang saya wawancara adalah kepala desa. Kepala desalah yang mengungkapkan kepada saya bagaimana mereka menyusun siasat agar Bukit Hagu bisa tetap

aman di tengah naiknya gelombang kekerasan terhadap orang-orang Jawa selagi pemberontak GAM dan prajurit militer nasional saling bertempur. Di unit-unit penempatan transmigran lain dalam daerah Aceh, orang-orang Jawa dengan mudah jadi target kekerasan.

Separatisme GAM disebabkan oleh paling tidak empat faktor utama, yaitu: (1) masalah ketidakadilan ekonomi/eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh pusat yang sangat merugikan Aceh; (2) sentralisasi kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah Pusat dan homogenisasi kultural/identitas lokal; (3) penindasan dan kekerasan oleh militer RI; dan (4) impunitas aparat TNI yang dituduh melanggar HAM ketika bertugas di Aceh (Khususnya periode DOM/Daerah Operasi Militer tahun 1989-1998). Selain keempat faktor tersebut, berdirinya GAM juga dimotivasi oleh semangat etno-nasionalisme. GAM dalam perjuangan separatisnya melakukan politisasi etnis sebagai instrumen propaganda untuk melawan dominasi etnis Jawa dan komunitas Batak Kristen sebagai salah satu kelompok pendatang non-muslim di Aceh.¹³

Gerakan politik baru-baru ini di Aceh telah berevolusi di sepanjang garis perjuangan Aceh untuk keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Wacana seputar nasionalisme bukanlah titik awal dan satu-satunya titik awal perjuangan. Aceh telah memiliki waktu yang sangat lama mengabdikan energi mereka untuk mengakhiri pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia dan angkatan bersenjata yang berturut-turut. Kebangkitan nasionalisme kontemporer di Aceh telah menjadi reaksi terhadap perasaan ketidakadilan dan penindasan yang tampaknya tak berujung.

Sebelum menuai konflik dengan pemerintahan Republik Indonesia yang sah, rakyat Aceh berjuang membela bangsa ini sampai tumpah darah penghabisan. Lahirnya GAM, di sisi lain,

sering juga dikaitkan dengan masalah eksplorasi gas alam dan minyak bumi serta penindasan akibat pembangunan tersebut terhadap rakyat Aceh sekitar tahun 1970-an. Di Aceh Utara, Aceh Timur, muncul persoalan penggusuran tanah, ganti rugi dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.¹⁸ Salah satu anggota GAM pada saat konflik dahulu menceritakan tentang bagaimana pergerakan GAM pada masa dahulu. Salah satu informan penelitian ini menjelaskan kepada peneliti:

“Ketika saya menjadi anggota GAM dahulu, pergerakan GAM awalnya hanya dalam bentuk gerilya saja untuk menakut-nakuti kelompok yang tidak diharapkan menginjak tanah rencong Aceh ini. Pergerakan kami diam-diam dan berada di bawah tanah, memiliki markas sendiri. Lama kelamaan, kelompok ini berubah menjadi kelompok perang bersenjata karena menurut petinggi GAM bahwa Aceh ini hanya dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengeruk sumber daya alamnya. Saya tidak bisa membayangkan ketika sebelum saya bertaubat dan kembali seperti sekarang ini, pada saat itu, saya memegang senjata, menembak sana sini, sudah tidak lagi memikirkan tentang rasa sakit, yang ada bagaimana negara Aceh (pada masa dahulu) itu dipertahankan dari gerakan Tentara Republik Indonesia. Seakan-akan kematian itu sudah sangat dekat sekali ketika proses konflik yang terjadi dulu. Saya pernah kena tembak di kaki, itu sakit sekali.” (Wawancara dengan Rahmat, seorang mantan anggota GAM)

Pengakuan dari informan ini menggambarkan situasi konflik yang begitu dahsyat terjadi untuk masing-masing mempertahankan ideologi yang mereka yakini baik antara TNI dengan GAM. Perjuangan GAM sama halnya dengan SIRA, yang menanamkan visi kepada masyarakat agar setia dan berbagai lapisan sosial termotivasi berperan aktif dalam melakukan revolusioner. Perjuangan mereka mengangkat aspek historis dari kesenjangan

sosial, ekonomi, dan ketidakstabilan yang digunakan untuk melegitimasi gerakan yang dilakukan, di samping menimbulkan efek psikologis pada masyarakat untuk memberi dukungan terhadap perjuangan mereka (Syarifuddin, 2000).

GAM tidak hanya menjadi gerakan bersenjata saja, namun didirikannya gerakan ini memiliki maksud dan tujuan berdasarkan surat pembentukan resmi dari GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya dan warisan agama. Jika mengacu pada teks proklamasi Aceh Merdeka, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh diterjemahkan cukup jelas menyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa (Schulze, 2004). Maksud dari merdeka yang dikemukakan di sini mengandung dua makna, bagi para tokoh ulama GAM dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat desa yang menjadi pendukung GAM, bahwa bangsa Jawa dianggap sebagai penjajah karena dianggap telah mengambil hak mereka, baik hak ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka ingin mengusir Jawa karena menganggap tidak diperlukan secara adil di tanah rencong Aceh yang merupakan tanah mereka sendiri (Schulze, 2004).

Sejarah Aceh merupakan contoh dari kenyataan yang pahit yang mengetahui dekade-dekade awal Republik Indonesia hingga orde baru dan ketika substansi harus diberikan kepada struktur negara baru ini. Hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat menjadi sebab dari rentetan konflik di Aceh. Mulai dari Presiden Soekarno hingga Soeharto, tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi rakyat. Kekecewaan yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah itu

akhirnya membuahakan perlawanan yang terkoordinir dan mengakibatkan lahirnya gerakan perlawanan rakyat Aceh yang terangkum dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Anwar, 2004). Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu informan yang dapat merasakan bagaimana perlakuan pemerintah terhadap Aceh

“... Aceh itu salah satu provinsi yang bisa dikatakan kurang perhatian dari pemerintah, banyak sumber daya alam yang tereksplorasi namun hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat Aceh, walaupun ada, hanya kalangan-kalangan tertentu yang dapat merasakannya. Terlebih dengan kondisi Aceh yang mengalami konflik, Aceh ditetapkan menjadi Daerah Operasi Militer. Penetapan daerah Aceh ini tentu memakan korban yang sangat banyak. Sehingga, GAM memiliki rasa untuk mempertahankan Aceh dari ancaman keganasan tentara yang bertugas. Seandainya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, mungkin tidak akan terjadi konflik bersimbah darah yang memakan banyak korban dalam kelangsungannya” (Wawancara dengan Datuk Abduh, salah satu tetua di Kecamatan Lhoksukon).

Penyelesaian konflik GAM dengan pemerintah pusat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara internal dan eksternal. Secara internal Pemerintah Indonesia menggunakan strategi mengalahkan (*win-lose solution*) dan kesejahteraan ekonomi untuk menumpas GAM. Pada tahun 1976-1979, tekanan militer sangat efektif untuk menekan kekuatan GAM, tetapi sejak tahun 1989 GAM kembali menampakkan kekuatannya melawan Pemerintah Indonesia dengan kekuatan senjata. Pemerintah Indonesia pun menggunakan pendekatan militer (Sulaiman, 2000). Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), terutama di wilayah basis GAM, seperti Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie. Operasi Militer ini ternyata tidak dapat melumpuhkan GAM, bahkan menjadi lebih besar, baik dari segi jumlah anggota maupun struktur

organisasinya. GAM di persepsi masyarakat sipil memiliki dukungan yang kuat terutama tentang penegakan hak asasi manusia (HAM). Mereka menganggap bahwa aparat keamanan dalam hal ini pemerintah pusat melalui tentara Republik Indonesia tidak saja telah melanggar HAM ringan, tetapi juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagian masyarakat Aceh menilai bahwa tindakan kekerasan yang mereka alami merupakan salah satu konfrontasi tindakan kejahatan penghabisan etnis (*the crime of genocide*) (Gade et al, 2001). Pada saat konflik tersebut, penyelesaian melalui negosiasi atau soft power tidak pernah dilakukan, kecuali hanya untuk merebut hati rakyat supaya tidak menyokong GAM. Tindakan itu pun terkadang dilakukan dengan cara teror dan intimidasi. Sikap politik Soeharto dan TNI yang keras terhadap GAM dirasionalisasi dengan semboyan "NKRI harga mati", dan tidak ada ideologi selain Pancasila di Indonesia (Djumala, 2013).

Dalam sebuah bangsa dan negara, sering ditemukan permasalahan yang menyangkut tentang konflik ideologis. Di mana konflik ideologis merupakan salah satu tekanan dalam masyarakat modern yang menembus semua aktivitas manusia. Konflik ideologis ini sebenarnya sangat rentan terhadap anak-anak, biasanya berada di lingkungan sekolah. Sejak usia dini sangat mungkin untuk membuat anak-anak menjadi terbiasa dengan peperangan ide, dan sebagai orang dewasa mereka melakukan pertempuran ideologis mereka sendiri, membawa ini ke tingkat nasional dan internasional. Mereka tidak hanya dikondisikan untuk terlibat dalam konflik ideologis dan persaingan, tetapi juga untuk perilaku yang lebih emosional daripada logis dan yang melemparkan lawan-lawan mereka ke dalam peran setan atau peran musuh kemanusiaan. Ini mengarah kepada pembersihan, prasangka dan permusuhan yang meletus menjadi kekerasan.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, dalam tahapan pasca-konflik, "konflik terpendam" (*latent conflict*) dapat kembali muncul ke permukaan dan pendalaman yang masih rentan dapat berubah menjadi konflik dan kekerasan. Hal itu terjadi terutama ketika ketegangan struktural (*structural tensions*) belum bisa di atasi oleh kelembagaan ekonomi dan politik yang ada, negara dan institusi bisnis dan organisasi masyarakat sipil yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Jeroen de Zeeuw (2001) menunjukkan bahwa, dalam tahapan *pasca-conflict*, „konflik terpendam“ ketika agen pembangunan atau kelembagaan politik yang ada masih sangat lemah dalam melakukan kelola konflik dan merespons kebutuhan pembangunan untuk mengatasi ketegangan struktural.

Pada masa Orde Baru telah mengakibatkan pemberdayaan gaya hidup yang sangat berbeda dan sangat tajam. Lapisan masyarakat miskin semakin banyak sedangkan kelompok elite hidup dengan berkelimpahan. Walaupun demikian, dengan kepemimpinan yang dibangun oleh militer dengan sistem sangat otoriter maka berbagai perbedaan yang muncul tidak sampai pada konflik terbuka antara masyarakat dan penguasa. Memang, pada tahun 1974 antara mahasiswa dan ilmuwan di satu pihak berhadapan dengan penguasa Orde Baru melalui peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) berupa kerusuhan di Jakarta selama 2 (dua) hari, namun karena tidak ada dukungan luas mengakibatkan penangkapan terhadap beberapa aktivis mahasiswa dan guru besar. Sebaliknya peristiwa Malari itu telah menempatkan Soeharto sebagai pemimpin yang disegani, ditakuti, dan tak tergoyahkan pada waktu itu.

Berbicara mengenai konflik ideologi, konflik yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat Aceh atau yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga merupakan salah satu konflik ideologi. Konflik terjadinya perbedaan ideologi antara GAM dengan pemerintahan Republik Indonesia. Di satu sisi rakyat Aceh ingin

membentuk sebuah negara merdeka karena kekecewaan yang mereka alami yang disebabkan oleh ulah pemerintah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah ini mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia yang sah. Sehingga perbedaan ideologi tersebut menumpahkan darah yang tidak sedikit. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak serta merta bahwa kekerasan menjadi pilihan dalam sebuah bangsa dan negara. Persatuan antara semua lapisan masyarakat yang hidup menjadi cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan. Persatuan setiap warga negara harus mampu menjadikan suatu bangsa menjadi damai, seperti yang diungkapkan oleh Ernest Renan (1994: 53-54):

“... bangsa adalah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah banyak berkorban, dan bersedia untuk menjadi korban itu lagi. Ia mengandung arti adanya suatu waktu yang lampau; tetapi ia terasa dalam waktu yang sekarang sebagai suatu kenyataan yang dapat dipegang: (yakni) persatuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama. Hidup sesuatu bangsa ialah suatu plebisit (keputusan rakyat) dari setiap hari, sebagaimana individu adalah bukti kekal dari adanya hidup”.

Berbicara mengenai Pernyataan Renan di atas tersebut menggambarkan bahwa bagaimana seharusnya keinginan rakyat Aceh yang ingin diwujudkan, yaitu untuk diakui perjuangan, serta pengorbanan mereka dalam membantu membebaskan bangsa Indonesia dalam penjajahan. Namun diantara pemerintah dan warga Aceh memunculkan sebuah perbedaan pandangan yang mengakibatkan terjadinya konflik ideologi.

Konflik ideologi ini terjadi disebabkan ketidakadilan; bahwa tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang

rendah. Konflik ideologi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh Muhammad Hasan Tiro. Demikianlah GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik. GAM dikenal dengan nama ASNLF (*Aceh Sumatera National Liberation Front*). ASNLF selalu digunakan bila berhubungan dengan dunia internasional. Gerakan pemerintah juga tidak kalah dalam menjalankan berbagai operasi baik secara politik maupun militeristik untuk menumpas gerakan ini.

Dalam penelitiannya, Nanda Winar Sagita (2016) menjelaskan bagaimana para transmigran Jawa di Desa Gayo Murni, Aceh Tengah, awalnya memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan warga lokal yang sudah lebih dahulu tinggal di sana. Saling mengenal budaya satu sama lain dan saling terikat serta membangun komunikasi yang baik. Namun ketika muncul GAM, semuanya berubah dan GAM banyak mempengaruhi masyarakat lokal untuk membenci transmigran Jawa. Konflik yang mulainya konflik struktural pun berubah jadi konflik kultural. Konflik mengakibatkan keseharian para transmigran menjadi rumit, harus hidup dalam lingkungan teror GAM. Situasi ini secara tragis membuat banyak transmigran harus terusir dari desanya.

Umumnya transmigran terintimidasi oleh keberadaan GAM (Czaika, 2009). Konflik menyebabkan mereka lari ke luar Aceh, baik dilakukan karena inisiatif diri maupun akibat dipaksa oleh pihak yang bersikap anti-Jawa. Selama masih berada di tempat tinggalnya, mereka kerap mendapat teror, dituduh menjadi mata-mata, diculik, bahkan tak sedikit yang dieksekusi kilat (dibunuh di tempat, misalnya dalam atau halaman rumahnya).

Pengusiran pun menjadi momok. Pengusiran oleh GAM dilakukan dengan beragam metode. Kadang, utusan GAM mendatangi desa transmigrasi dan memberitahu semua orang di situ bahwa mereka harus angkat kaki sesuai dengan tanggal yang ditetapkan secara sepihak. Apabila ada yang bersikeras tinggal maka akan dibunuh. Dalam cara lain, gerilyawan mendatangi desa dan menulis tanda X (silang) di rumah-rumah orang Jawa. Tanda yang ditulis dengan cat itu merupakan kode peringatan bagi penghuninya agar dalam beberapa jam kemudian mereka sudah mengosongkan rumah. Mengabaikan kode ini akan berhadapan dengan risiko yang cukup serius. Alasannya, bukan cuma kepala keluarga yang akan ditindak. Anggota keluarga lain pun bisa dikenai hukuman. Tak ada kepala keluarga yang mau keluarganya terimbas. Meninggalkan Aceh cepat-cepat menjadi satu-satunya opsi masuk akal. Metode lainnya bersifat lebih horor. Di kawasan Aceh Timur, pengusiran terhadap keluarga-keluarga Jawa dilakukan dengan menempatkan mayat orang Jawa di depan pintu rumah mereka. Ketika pagi atau malam hari mereka membuka pintu dan melihat ada mayat tergeletak, itu merupakan peringatan tanpa kata-kata. Gerilyawan meletakkan mayat untuk mengganti ucapan "kalau kalian tidak segera keluar dari Aceh, beginilah nasib kamu dan keluargamu dalam waktu dekat".

Pada pertengahan tahun 1990, kelompok pemberontak menyerang perkampungan transmigran di Aceh Utara. Menurut Amnesty Internasional, ribuan transmigran Jawa diintimidasi sehingga meninggalkan rumah mereka. Skenario tersebut berulang pada September 1999. Dilaporkan, ribuan transmigran Jawa diancam, diperas, dan rumah mereka dibakar. Mereka pun beramai-ramai lari ke luar Aceh. Menjelang milad GAM pada Desember 1999, aksi-aksi sedemikian semakin meningkat.

GAM juga mulai melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang melakukan perjalanan di daerah mereka untuk memburu orang Jawa (Reid, 2006). Pada awal 2001, pelecehan GAM terhadap etnik Jawa mulai meningkat. GAM menggunakan kombinasi taktik teror termasuk pembakaran dan pembunuhan untuk memaksa orang Jawa keluar. Kantor transmigrasi di Jawa Tengah mengatakan, sejak Juli 1999 ada 1.006 transmigran di Aceh telah kembali di kediaman keluarga mereka di Jawa Tengah. Mereka memilih pulang kampung karena merasa sudah tak ada yang bisa diharapkan dari kehidupannya di Aceh.

Sebenarnya, teror langsung oleh gerilyawan GAM tidak mengenai semua orang dalam setiap desa transmigrasi. Para gerilyawan cuma menyasar satu-dua orang atau rumah, tetapi itu menggelisahkan semua keluarga yang ada. Akibatnya, terjadilah eksodus besar-besaran. Berjumlah ribuan, orang-orang Jawa mulai meninggalkan Aceh. Ditambah lagi konflik menyebabkan kelangkaan pangan, seperti yang dipaparkan dalam penelitian Amiruddin Ketaren (2018). Jadi, eksodus dilakukan orang-orang Jawa selama konflik Aceh untuk menjauhi gangguan keamanan sekaligus ancaman kelaparan. Lebih dari 21.000 kepala keluarga terlibat dalam eksodus. Oleh karenanya, pada masa tersebut sering terdengar istilah "eksodus besar-besaran".

Serangan terhadap orang Jawa berdampak besar karena pula umumnya gerilyawan memersepsikan mereka dengan predikat-predikat negatif. Orang Jawa dipandang sebagai bagian dari penjajahan Jakarta atas Aceh. Orang-orang Jawa dikirim pemerintah pusat untuk mengeruk kekayaan Aceh yang warganya sebagian besar masih miskin. Pemerintah pusat dituduh sengaja memanfaatkan kesuburan alam Aceh untuk menyejahterakan orang Jawa sambil mengabaikan kemelaratan hidup yang mencekik rakyat Aceh. Sebuah pamflet yang sempat diterbitkan GAM bahkan

menyebut transmigrasi sebagai nama lain dari “pencuri”. Maka, para transmigran Jawa yang datang ke Aceh dipersepsikan sebagai pihak yang ingin mencuri kekayaan alam Aceh. Pencuri harus diperangi dan dihukum.

Komentar-komentar keras GAM terhadap program transmigrasi diterbitkan pada 8 Oktober 1986 dalam majalah *AGAM*. Majalah ini dideklarasikan sebagai *madjalah angkatan atjeh meurdehka*. Dalam edisi ini khusus dibahas kejahatan-kejahatan yang terselubung di balik tirai program transmigrasi. GAM, melalui majalah ini, menyebut transmigrasi sama saja dengan *peundjajahan*. Sebuah hikayat karangan Ilyas Hanafiah dalam terbitan ini juga menyebut “Transmigrasi = Pantjuri”. Tujuannya ialah untuk meyakinkan orang-orang (pembaca) bahwa para transmigran adalah pencuri.

Transmigrasi = Pantjuri

Uléh:

Iljas Hanafiah

Assalamu Aleikum Warahmetullah
Saleuëm njang tjeudaih sambót kawóm lón
Saleuëm lón kirém deungon mulia
Dari Iäropa keunoë lón peutrón

Sambót banas lón ngon lapang dada
Njang na di rimba banda ngon dusón
Kon meutjéh keu keumuën ka deungon apa
Chusus keu banas njang that lón djuandjóng

Tau-inget sabé di ulón keu banas
Malam ngon seundja sampalé fadjar trón
Sabé teupiké di dalam dada
Padjan keuh masa tanjaë duëk siglóng

Deungon izin Po sidroë njang kaja
Kamoë diluua Allah peulindóng
Malam dan uroë droëneuh njang djaga
Sabé tiëp masa kamoë neutulóng

Meunantjit Tengku njang na di rimba
Dusón ngon banda Rehaat neupeutrón
Umu beupanjang rezeki mudah
Neubri ja Allah Iman bék siróng

Meubri beuteutep Iman lam dada
Meubri sidjahtera duwa boh gampóng
Sidjahtera di dönja bék djeuët chianat
Uroë Kiamat meuseubri pajóng

Meubri ja Allah beu-ék meuseba
Dalam ngon luwa beuna lagalé phóm
Beutroëh meukeusud lagalé ta pinta
Beutroëh bak masa peumeurdéhka keuóm

Wahé banas lón agam ngon dare
Kamoë diluua meuoë u gampóng
Ban bandum rakan sigo meugias
Uroë ngon masa handjeuët lón peuphóm

Handjeuët lón peugah njoë bah rehsia
Taktik geurilja tjit meuno hukóm
Nak bék djiteupeuë lé asoë-Ojava
Bék djeuët ajëëdara tanjoë dikeupóng

Habéh ngon meubeuët tamat sikula
Kamoë meugias langkah meu-ajón
Masa lé meuduëk di negeroë luwa
Meudjak tjok banas njang na lam kuaë

Menyatu dengan Penduduk Setempat

Situasi demikian berbanding terbalik dengan kehidupan orang-orang Jawa di Bukit Hagu. Keributan seperti di tempat-tempat dan yang menimpa transmigran Jawa lain tidak mereka rasakan di desanya. Mereka tidak harus bereksodus untuk mencari keselamatan. Mereka tetap tinggal di desanya selagi perang terus memanas dari hari ke hari. Jumlah transmigran Jawa di Desa Bukit Hagu adalah 3.018 jiwa dan terbagi ke dalam 77 KK. Kalaupun ada yang mengungsi ke luar Aceh, itu hanyalah sebagian kecil. Hampir 95 persen transmigran Jawa tetap bertahan di Bukit Hagu biarpun wilayah mereka merupakan wilayah operasi GAM. Para penduduk Bukit Hagu masih bertahan hidup sampai sekarang dan banyak yang mengaku mengalami trauma atas konflik yang pernah terjadi. Hal ini bisa kita cermati dari pernyataan Suyatno, salah satu transmigran asal Madiun, Jawa Timur:

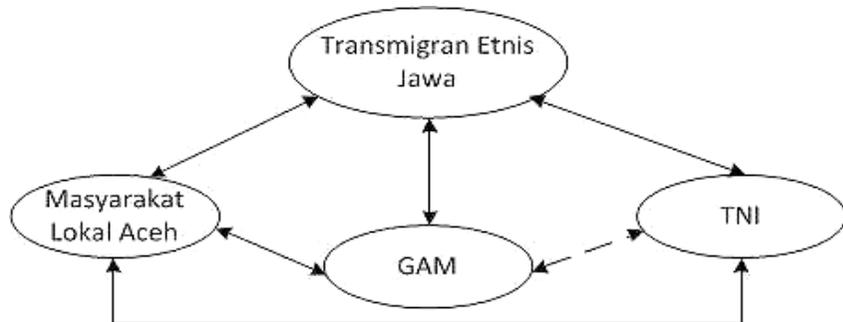
“... ketika terjadi konflik, kami tidak merasakan ketakutan seperti yang dirasakan oleh warga transmigran yang berada di desa lain. Entah itu karena kedekatan, hubungan ekonomi, atau budaya antara masyarakat Aceh itu sendiri yang dapat membuat kami berkomunikasi dengan baik. Sehingga, tidak ada alasan para GAM mengusir kami”.

Penuturan Suyatno tersebut menggambarkan bahwa interaksi yang terjadi antara transmigran Jawa dengan orang Aceh setempat membentuk sebuah hubungan baik dan keseimbangan sosial yang melekat dalam masyarakat. Hal ini tentu sangat berdampak baik bagi transmigran dalam menjalankan kehidupan mereka sehingga tidak terusik oleh konflik yang terjadi.

Transmigran Jawa yang berada di desa Bukit Hagu mampu hidup berdampingan tidak saja dengan GAM tetapi juga aparat militer. Posisi lokasi transmigran yang berada diantara GAM dan markas militer menjadikan para transmigran etnis Jawa mencari

cara dalam memosisikan diri mereka dengan kedua belah pihak yang bertikai dengan tetap mempertahankan posisi dan wilayah transmigrasi. Dilihat dari lokasi transmigrasi, transmigran di Bukit Hagu berada di tengah-tengah basis massa GAM dan markas TNI. Namun, transmigran Jawa tersebut memiliki kekuatan dalam melakukan negosiasi terhadap GAM dan TNI untuk selalu menjaga tidak terjadi peperangan khususnya di desa Bukit Hagu. Hal ini tentu tidak hanya mampu bertahan tetapi hidup berdampingan dengan kedua pihak yang berkonflik tersebut.

Transmigran etnis Jawa yang berada di desa Bukit Hagu mampu menjaga keseimbangan sosial antara transmigran etnis Jawa dengan GAM, TNI dan masyarakat lokal pada saat konflik. Hubungan yang terjadi dapat digambarkan melalui ilustrasi pada gambar 2.8 di bawah ini:



Gambar 2.8. Hubungan Keseimbangan Sosial

Sumber: Elaborasi Penulis (2023)

Interaksi dan tujuan dari transmigran etnis Jawa ini mampu membawa mereka bertahan dalam aktivitas kehidupannya membentuk kehidupan baru serta berbaur dengan masyarakat lokal. Namun semua itu berubah ketika terjadi konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat sehingga menyulut kemarahan GAM dan

terjadi pengusiran besar-besaran yang terjadi pada transmigran yang berada di Aceh. Namun tidak terjadi pada transmigran etnis Jawa yang berada di desa Bukit Hagu. Tentu permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Dalam Bab ini akan dipaparkan bagaimana transmigran etnis Jawa tersebut dapat bertahan dan tidak terjadi pengusiran pada mereka serta menciptakan keseimbangan sosial diantara transmigran, GAM, TNI dan masyarakat lokal.

Melucci melihat, solidaritas internal dapat terbentuk selama konflik terjadi, sehingga akan menghasilkan suatu identitas bersama. Hal yang terpenting selain perjuangan mendapatkan tujuan adalah penguatan solidaritas kelompok. Ia berpendapat bahwa "orang-orang akan merasa terikat satu sama lain bukan serta merta karena mereka saling berbagi kepentingan dan tujuan yang sama, tetapi melainkan juga karena mereka perlu ikatan tersebut untuk membuat kesepahaman tentang apa yang mereka lakukan" (Melucci, 1996: 74). Solidaritas bersifat kultural dan merupakan produksi simbolis kehidupan sehari-hari. (Melucci, 1996: 115). Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Iskandar Aiyub Ali (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Malikkusaleh) bahwa:

"...selama konflik terjadi, kami membangun kesepahaman antara transmigran yang satu dengan lain untuk tidak membela salah satu kelompok bersenjata, namun kita harus memiliki prinsip hidup sehingga dapat bertahan dalam konflik. Seandainya terjadi pembantaian kepada kita, setidaknya kita sudah siap untuk melawan. Masing-masing orang diminta untuk melaksanakan perannya seperti hari-hari biasa, karena kita juga sudah lama berada di sini, masyarakat lokal juga merupakan teman kami".

Selanjutnya ketika terbentuk hubungan antara transmigran etnis Jawa dengan GAM, TNI dan masyarakat lokal akan

membentuk sebuah keseimbangan sosial. Teori keseimbangan sosial dalam disertasi ini akan mengkaji tentang bagaimana peran aktor sosial yaitu transmigran etnis Jawa dalam menciptakan sebuah keseimbangan sosial dengan GAM, TNI, dan Masyarakat lokal sehingga transmigran mampu bertahan dan tidak terusir dari desa Bukit Hagu, melainkan dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat yang terlibat dalam konflik saat itu. Dalam keseimbangan sosial ini juga akan dilihat bagaimana posisi transmigran diantara GAM, TNI dan Masyarakat lokal yang dipandang dari bidang politik, budaya dan ekonomi.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, mengadakan persaingan, pertikaian dan konflik maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial. Secara umum bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama, persaingan, konflik dan akomodasi (Soekanto, 1990). Dalam aplikasinya, masyarakat transmigrasi desa Bukit Hagu berupaya agar dalam kehidupan bermasyarakat yang baru dapat membantu kemajuan desa dan menjaga keharmonisan sesama kelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya interaksi antara transmigran dengan penduduk asli. Fungsi adaptasi merupakan sistem untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem komunitas dalam menghadapi *external demands*.

Transmigrasi yang terjadi pada transmigran Jawa yang ada di Bukit Hagu, pada awalnya diketahui bahwa desa Bukit Hagu merupakan hutan rimba yang tidak memiliki penghuni, bahkan tidak pernah terjamah oleh manusia. Namun, berdirinya pabrik gula di Cot Girek mulai tahun 1970, banyak para pekerja pembangunan membutuhkan kayu sebagai bahan perluasan perkebunan tebu dan

keperluan pembangunan pabrik sehingga hutan-hutan di sekitar Cot Girek mulai dirambah. Penebangan kayu besar-besar dan gelondongan di hutan rimba di sekitar pembangunan pabrik, dan untuk pembuatan tempat tinggal sementara para pekerja serta perumahan untuk pekerja yang memiliki kelas pekerja yang tinggi. Keadaan hutan rimba tersebut sudah dapat di akses oleh penduduk di sekitar wilayah dekat hutan, misalnya sudah ada jalan untuk melintasi areal hutan tersebut mulai dari perkampungan Lhoksukon sampai ke Cot Girek. Perambahan hutan mengakibatkan adanya keuntungan bagi penduduk asli setempat. Mereka bisa memperoleh upah dari aktivitas pembukaan areal transmigrasi serta penggarapan lahan. Seperti penuturan Keuchik Ali, orang asli Lhoksukon:

“Sebelum ada pabrik gula di Cot Girek, kami semua tidak berani masuk hutan rimba yang ada di dekat pabrik gula Cot Girek (sekarang bernama Bukit Hagu). Kondisi hutan tersebut sangatlah lebat dan banyak binatang buasnya. Para sesepuh kami tidak mengizinkan kami masuk hutan, dikarenakan bahaya di dalam hutan yang tidak diketahui. Namun setelah adanya perambahan hutan ini, jalan-jalan setapak mulai muncul dan terbentuk jalan yang bisa di lewati untuk akses ke hutan rimba”

Hutan rimba itu dahulunya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar, jenis pohon kayu yang memiliki ciri-ciri pohonnya yang lurus, cabangnya banyak tetapi berada di ketinggian dan memiliki daun sangat mirip dengan daun pohon mangga serta buahnya kecil-kecil seperti buah pohon beringin yang biasanya disukai oleh jenis burung. Kayu yang cirinya demikian oleh orang-orang tua Aceh dinamakan dengan “Bak Hagu” atau “pohon Hagu”. Sedangkan “Buket” adalah kawasan yang berada atas ketinggian atau di atas puncak gunung, jadi “Buket” sama pengertiannya dengan “Bukit” yaitu satu wilayah yang berada di

tempat dataran tinggi. Sehingga menjadi penanda wilayah hutan rimba tersebut yang ditumbuhi kayu dengan ciri-ciri tersebut dinamakan dengan "Bukit Hagu". Semenjak saat itu, daerah hutan rimba tersebut dinamakan desa "Bukit Hagu".

Mulanya, di Bukit Hagu tidak ada penduduk. Kawasan ini cuma menjadi lintasan alternatif bagi orang-orang Lhoksukon yang berpergian ke Cot Girek. Pada akhir tahun 1975 mulai ditempatkan para transmigrasi tahap pertama sebanyak 50 KK tepatnya di Gampong Bukit Aman. Para petugas dari dinas transmigrasi dan warga transmigrasi juga menyebut wilayah penempatan ini dengan nama Bukit Hagu. Proses transmigrasi etnis Jawa ke Aceh Utara berawal dari penyampaian tentang daerah baru sebagai tempat tujuan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Para transmigran ke Aceh memiliki tujuan untuk peningkatan hidup yang lebih baik, selain itu mereka juga diberi peluang untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan (Swasono, 1985). Pada dasarnya mereka mengelola lahan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan hidup di Aceh. Mengingat bahwa lahan pertanian yang ada di Aceh sangatlah luas dibandingkan dengan yang ada di Jawa yang padat penduduknya. Jenis perpindahan penduduk transmigran biasanya dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya. Rahmat, warga transmigran generasi pertama di Bukit Aman yang berasal dari Jawa Tengah, menjelaskannya sebagai berikut:

"... program transmigrasi pemerintah merupakan salah satu program yang sangat tepat untuk kami-kami yang tidak memiliki lahan di daerah padat penduduk seperti yang ada di Jawa. Apalagi kehidupan di Jawa bisa dikatakan sangatlah keras mengingat banyaknya persaingan yang terjadi di Jawa untuk mempertahankan kehidupan mereka. Untuk itu, salah satu alasan saya untuk mengikuti program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat membangun

keluarga yang harmonis. Selain itu juga saya sangat senang untuk bertani mengingat daerah-daerah terpencil memiliki lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan”.

Lokasi pemukiman Desa Bukit Hagu terletak di lokasi yang jauh dari penduduk asli (Aceh), pemukiman ini berada di tengah hutan yang jauh dari lokasi pemukiman warga asli dan sarana transportasi (jalan) pada masa awal penempatan sungguh miris disebabkan karena tidak ada jalan, hanya ada jalan setapak yang sering dilalui dalam berburu rotan dan aktivitas menebang kayu liar. Kondisi terasing yang dialami oleh para transmigran yang berlatar belakang Jawa tersebut hidup dengan kondisi yang serba kekurangan karena fasilitas perumahan yang tidak memadai, walaupun dibantu oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pembangunan rumah-rumah pun dilakukan sendiri yang berasal dari bahan-bahan sederhana yang mereka temui di sana. Seorang tokoh warga bernama Sawidi mengungkapkan:

“Harapan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya memandang bahwa transmigrasi ini merupakan program keluarga harapan untuk membantu saya keluar dari kesusahan. Tetapi, saya dan kawan-kawan yang lain harus menerima nasib bahwa pemukiman yang kita dapatkan kita bangun dari nol. Tidak ada fasilitas yang memadai, hanya ada barak-barak penampungan sementara, sehingga kita semua membangun rumah sendiri-sendiri dengan berbekal peralatan dan bahan-bahan seadanya yang berasal dari potongan-potongan kayu. Dan ada beberapa bahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu kami dalam membangun rumah. Alhasil rumah yang kami buat setidaknya dapat berlindung dari panas dan dingin”.

Namun, kesulitan itu harus “diterima” karena mau tak mau mereka sudah menjadi bagian dari sebuah program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seperti yang

mereka lalui setiap saat, bahwa segala rintangan akan menjadi teman mereka untuk mengarungi kehidupan yang panjang. Di saat inilah kecerdasan serta strategi yang harus mereka terapkan untuk bisa bertahan hidup dan mampu mengembangkan diri mereka. Maka proses adaptasi menjadi pilihan satu-satunya untuk bertahan dalam kondisi serba kekurangan seperti ini. Kondisi yang memang tidak memadai membuat para transmigran hidup di barak-barak pengungsian selama satu tahun lamanya. H. Badrul Syamsi salah satu yang pernah mengalami kesulitan hidup tersebut:

“Pertama kali sampai di pemukiman transmigrasi, saya dan kawan-kawan lain ditempatkan di barak-barak penampungan sementara dengan kondisi seadanya, hanya berlapis tikar-tikar anyaman dengan atap terpal. Tentunya keinginan untuk hidup layak minimal tinggal bersama keluarga dalam satu rumah membuat semangat kami untuk berjuang dan membangun rumah seadanya. Melihat keadaan sekitar yang penuh dengan hutan, membuat kami berpikir untuk memanfaatkan bahan-bahan yang melimpah yang tidak terpakai dengan menggunakan alat-alat seadanya. Proses pembuatan rumah kayu tersebut berlangsung selama satu tahun lebih. Dengan tekad yang kuat kami harus bisa bertahan dalam kondisi lingkungan seperti ini. Kami hanya memegang semboyan, *‘wong urip numpang ngombe ae’*, yang berarti hidup ini hanya menumpang minum”.

Dalam proses pendirian rumah, para warga transmigran melakukan gotong royong untuk mempercepat proses pembangunan, sebagaimana diungkapkan Muhammad Muslih:

“Pembangunan rumah waktu itu adalah kita hanya berbekal papan, kayu-kayu yang diambil dari hutan dengan peralatan sederhana untuk memotong dan mengolah kayu untuk bisa dijadikan sebagai tiang-tiang dan fondasi dari rumah. Untuk atapnya menggunakan daun rumbia yang dirapat-rapatkan sehingga membentuk sebuah atap yang bisa melindungi dari

panas dan hujan. Pada waktu itu, yang bisa membuat rumah hanya segelintir orang sehingga kita saling kerja sama dan gotong royong untuk membangun rumah”.

Kerja sama dan sikap gotong royong yang tercermin dalam masyarakat transmigran Jawa merupakan rasa senasib dan sepenanggungan mereka untuk saling membantu dalam suasana pengungsian seperti yang mereka rasakan. Tentunya sikap kebersamaan ini merupakan salah satu kemampuan adaptasi yang mereka miliki. Jika salah seorang memiliki kesulitan dalam hidup untuk menjalani proses adaptasi, para transmigran saling membantu untuk bisa melewati hari-hari mereka dalam bertahan hidup di tanah rantau. Tata cara hidup masyarakat Jawa memang mengedepankan sistem kekerabatan dan mudah menerima dalam masyarakat ataupun lingkungan luar karena masyarakat Jawa selalu mengutamakan kebersamaan, mementingkan kesopanan. Prinsip hidup seperti ini mampu menjadikan etnik Jawa memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Termasuk mereka yang berada di desa Bukit Hagu. Mereka selalu bersama dalam masa-masa awal transmigrasi untuk membangun rumah dan membangun perekonomian mereka dari nol dengan teknologi seadanya dan belum memadai.

Fungsi adaptasi dalam kajian transmigrasi etnis Jawa di desa Bukit Hagu ini adalah tentang kemampuan transmigran dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam dan di luar pemukiman yang telah di sediakan oleh pemerintah agar mereka dapat bertahan hidup dan mempertahankan diri mereka terhadap lingkungannya. Suatu sistem ini dapat berjalan karena ada peran pro aktif seorang aktor atau para transmigran etnis Jawa desa Bukit Hagu dalam hal ini. Aktor yang berperan penting di dalam masyarakat yang beraneka ragam dengan nilai-nilai sosial yang berbeda dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai segala sesuatu yang diharapkannya (dalam artian kebutuhan yang diharapkannya dan dicapai bersifat non profit) maka peran aktor atau penduduk pendatang diharapkan mampu mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Dalam perannya berinteraksi dengan penduduk lokal, para transmigran membangun hubungan yang baik.

Dalam proses adaptasi yang dilakukan oleh transmigran etnis Jawa di Desa Bukit Hagu untuk membentuk sebuah hubungan dengan masyarakat. Dalam perspektif teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem dan bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dalam masyarakat bersifat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar suatu sistem lebih cenderung ke arah *equilibrium* dan bersifat dinamis. Setiap masyarakat mempunyai susunan sekumpulan subsistem yang satu sama lain berbeda-beda, hal ini didasarkan pada struktur dan makna fungsional bagi masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu mengalami perubahan pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan kemampuan secara lebih baik untuk menanggulangi permasalahan dan problem-problem dalam kehidupannya. Dengan adaptasi yang dilakukan oleh transmigran etnis Jawa terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dapat membentuk sebuah hubungan yang erat dan mampu bertahan hidup.

Selain adaptasi dengan lingkungan yang mereka hadapi, persoalan ekonomi dan pekerjaan merupakan hal yang paling utama dalam keseharian mereka, tentunya membutuhkan suatu penyesuaian dan melakukan kerja sama serta usaha dan kreativitas tersendiri dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Pilihan pekerjaan menjadi sesuatu penting yang harus dilakukan oleh para transmigran Bukit Hagu. Kondisi lingkungan Bukit Hagu yang

merupakan hutan rimba memiliki potensi kayu bakar yang melimpah, sehingga menjadi penjual kayu bakar merupakan salah satu cara adaptasi mereka dalam bertahan hidup.. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kondisi ekonomi warga transmigran yang di mana persoalan ekonomi merupakan persoalan yang paling pertama mendesak, akan tetapi dengan berbagai kreativitas dan etos kerja tinggi sehingga persoalan ekonomi ini dapat teratasi meskipun tidak serta merta langsung terjawab dan terpenuhi. Tetapi dengan cara inilah sehingga tahap demi tahap masalah ekonomi dapat teratasi. Ihwal ini dijelaskan oleh seorang informan bernama Wagiman. Ia merupakan tokoh masyarakat yang berstatus generasi pertama:

“... saya melihat banyak kayu bakar yang tidak termanfaatkan oleh kami semua, karena pemukiman ini letaknya di kelilingi Hutan. Jadi saya memiliki inisiatif untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk di jual ke orang-orang Aceh, mungkin mereka membutuhkan. Tidak lama, saya pun berangkat bersama pak Sawidi untuk berjualan kayu bakar, namun sangat disayangkan sekali bahwa warga desa juga rata-rata mengumpulkan kayu bakar untuk kebutuhan memasak mereka. Dan warga desa menyarankan kami untuk ke Kota Lhoksukon saja, mungkin disana lebih banyak pembeli seperti para pedagang-pedagang makanan yang membutuhkan kayu bakar untuk kebutuhan mereka. Alhamdulillah kayu bakar kami pun diterima dan dibeli oleh masyarakat. Usaha ini semakin menarik dan banyak diikuti oleh transmigran lainnya. Karena kami sudah terbiasa menjual ke warga kota Lhoksukon, akhirnya mereka juga tetap membeli di kami sehingga kami juga dapat bertahan hidup dengan menjual kayu bakar”.

Usaha menjual kayu bakar ini pertama kali dipelopori oleh Pak Sawidi dan Pak Wagiman. Keduanya menjual kayu bakar ke perkampungan orang Aceh yang berjarak sekitar sepuluh kilometer

dari pemukiman transmigrasi. Pada tahap-tahap awal usaha, mereka memiliki kendala karena masyarakat desa juga senang mengumpulkan kayu bakar sehingga mereka harus berjalan lebih jauh ke kota untuk menjajakan kayu bakar mereka. Usaha ini merupakan sesuatu perjuangan adaptasi lingkungan dan ekonomi mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, dengan kegigihan dan keuletan transmigran Jawa dalam bekerja merupakan sebuah nilai penting untuk bertahan dalam kondisi apapun. Kehidupan awal-awal transmigrasi membuat mereka harus berpikir keras bagaimana untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang baru pertama kali mereka rasakan. Walaupun bantuan pemerintah yang mereka dapatkan berupa jaminan hidup, namun masih saja kekurangan, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus mereka penuhi. Dengan desakan kebutuhan itu, setelah hubungan mereka dengan masyarakat lokal baik melalui menjual kayu bakar dan bekerja di sawah-sawah orang Aceh, selanjutnya hubungan itu berkembang menjadi hubungan penjual dan pembeli. Hubungan tersebut dimulai dengan menjual dan membeli barang-barang dan kebutuhan pokok yang lain, seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Seiring waktu, para transmigrasi yang banyak menanam sayur-sayuran di lahan rumah dan pekarangan serta lahan untuk palawija, sehingga para transmigran membawa hasil panen mereka ke kota Lhoksukon. Hubungan jual beli antara transmigran dengan masyarakat Aceh berkembang ke arah yang lebih baik menjadi hubungan dagang. Pertanian para transmigran sudah cukup terkenal di kalangan pedagang kota Lhoksukon, sehingga para pedagang langsung menuju desa Buket Hagu untuk menjadi pedagang pengumpul sayur-sayuran. Di sisi lain, para pedagang pengumpul ini juga membawa kebutuhan para transmigran seperti garam, rokok, ikan asin, ikan basah (ikan laut) dan bahan sembako

lainnya, sehingga para transmigrasi juga tidak perlu susah payah dalam membawa sayur-sayuran hasil panen ke kota dan tidak perlu lagi ke kota untuk membeli kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Begitu juga sebaliknya, harga yang didapatkan oleh pedagang Aceh lebih murah jika dibandingkan dengan para transmigran yang membawa hasil panen mereka ke kota. Seperti penuturan dari Acang Iskandar, salah seorang pedagang pengumpul sebagai berikut:

“Awal-awal berinteraksi dengan para transmigran dari Jawa ini, dulu mereka pergi ke Lhoksukon untuk menjual sayur-sayuran mereka. Awalnya saya kenal mereka ketika mereka menjual kayu bakar. Lama kelamaan usaha mereka berkembang pesat dengan hasil pertanian yang mereka miliki. Karena kebutuhan dan saling membutuhkan, akhirnya saya dan mereka sepakat untuk datang ke desa mereka membawa sebagian kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat desa Bukit Hagu, tidak hanya saya, namun banyak juga teman-teman saya yang ingin melakukan bisnis ini dan datang ke desa Bukit Hagu untuk bertransaksi. Dan kesepakatan harga pun jauh lebih murah jika mereka datang ke kota. Dan itu juga menguntungkan kami, dan mereka pun tidak rugi, karena tidak susah payah untuk pergi ke kota”.

Transmigran membentuk institusi atau kelompok yang memiliki tujuan bersama dalam bagaimana mereka bertahan hidup. Dalam hal ini bahwa sistem dan institusi berfungsi mempertahankan solidaritas sosial dengan menerapkan peraturan yang berakar pada konsensus sosial tentang nilai-nilai bersama. Dengan kerja sama diantara transmigran akan memudahkan untuk pencapaian tujuan yang telah dicanangkan sebelum dan sesudah berada di daerah pemukiman bahwa tujuan mereka adalah untuk bertahan hidup dengan cara menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal melalui hubungan dagang untuk menciptakan

sebuah interaksi sosial. Transmigran di Bukit Hagu memanfaatkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal, membangun tujuan bersama untuk dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal.

Integrasi merupakan salah satu bentuk dari proses sosial yang merupakan suatu proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda, yang dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut (Suprpto, 1987). Integrasi berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur sesuatu agar tidak terjadi pertentangan di antara individu-individu, kelompok, atau subsistem yang ada, sehingga terjadi keseimbangan dalam sistem secara keseluruhan. Fungsi integrasi ini dipenuhi oleh sistem hukum. Integrasi adalah pola hubungan yang menekankan persamaan dan bahkan saling mengintegrasikan antara satu kelompok dengan yang lain. Pola-pola hubungan itu hanya terjadi apabila orang per orang atau kelompok-kelompok manusia saling bekerja sama, saling berbicara untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi dapat dicapai melalui pola interaksi sosial yang memadai dan terkoordinasi antar unsur-unsur pendukung masyarakat, terutama mengenai penanaman norma yang berlaku dalam masyarakat. (Awan, 2010: 30). Terjadinya integrasi sosial menyebabkan kelangsungan hidup individu atau kelompok terjamin, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan. Integrasi sosial merupakan suatu proses untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelompok yang tidak akan pernah selesai dan berlangsung terus menerus. Hal ini dapat dicapai menurut beberapa fase yakni akomodasi, kerja sama, koordinasi, dan asimilasi (Susanto, 1983).

Terlihat pada kehidupan sehari-hari transmigran etnis Jawa bahwa hubungan antara transmigran di Bukit Hagu dengan masyarakat Aceh di sekitar perkampungan atau di kecamatan

Lhoksukon tidak hanya sebatas hubungan antara penjual dan pembeli, namun lebih dalam, ketika ada acara seperti perkawinan, dan lain-lain, maka masyarakat Aceh akan mengundang para transmigran untuk menghadiri acara mereka, dan sebaliknya. Sehingga hubungan kekerabatan diantara transmigran dan warga Aceh di sekitar sepanjang jalan menuju Lhoksukon, maupun warga kota dan sekitarnya menjalin hubungan baik di antara keduanya. Seperti dari penuturan salah satu tokoh masyarakat yaitu M. Sholeh (Imam Dusun Harapan Mulia) yang kerap kali diundang oleh masyarakat lokal ketika melakukan pesta perkawinan bahwa:

“...pada saat ada perkawinan di Aceh, kami para tokoh masyarakat di undang untuk mengikuti Acara mereka, dan para ibu-ibu transmigran membantu memasak untuk orang Aceh. Dan disitu saya melihat bahwa orang Aceh menghidangkan masakan Khas Jawa, dan ternyata orang Aceh juga senang dengan masakan tersebut, seperti Bakso dan masakan lainnya. Itu bukti bahwa budaya Jawa juga sebenarnya diterima oleh orang Aceh”.

Senada dengan itu, Kepala Desa (Keuchik) Bukit Hagu mengatakan:

“... kalau dari segi makanan, orang Aceh yang tidak pernah sebelumnya makan daun singkong, daun talas, sekarang sudah dimakan sebagai sayur, dahulunya yang singkong hanya pengolahannya di rebus saja, sekarang banyak variasinya, dijadikan gorengan, kukusan dan sebagai bahan campuran kue juga”.

Penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran etnis jawa memunculkan kekerabatan diantara mereka yang selanjutnya menjadi hubungan kerja, di mana transmigran Jawa sebagian besar menjadi buruh lepas di sawah milik warga Aceh di sekitar Bukit Hagu. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Tayeb Sulaiman,

seorang kepala desa Seunebok Lama yang sering berinteraksi dengan masyarakat transmigran Bukit Hagu bahwa:

"... pada masa awal-awal kedatangan mereka, banyak yang menawarkan hanya sekadar membantu menggarap sawah orang-orang Aceh. Sawah di Aceh sangat luas-luas sehingga tidak bisa dilakukan sama pemiliknya sendiri, karena mengakibatkan kewalahan. Kendatipun menyuruh penduduk lokal, jarang ada yang menganggur, sehingga dengan keberadaan orang-orang Transmigran ini membantu mereka dalam menggarap sawah-sawah mereka. Dari sinilah komunikasi baik itu terjalin, tidak ada yang dirugikan dengan ikatan kerja seperti itu, mereka menjalin hubungan yang harmonis demi menyambung kehidupan mereka, demi mendapatkan kesejahteraan. Dan prinsip mereka yang saya tahu adalah, mereka merantau untuk menetap, di manapun mereka tinggal itu hanyalah sementara adanya, dan dengan begitu mereka harus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar mereka.

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kondisi akan kebutuhan tenaga kerja pada orang Aceh, maka terjadi ketergantungan antara orang Aceh dengan para transmigran. Para transmigran bekerja dari pagi sampai sore, dan makan siang ditanggung oleh pemilik sawah. Pekerjaan tersebut dibagi 2 dari seluruh hasil panen pada petak sawah yang dikerjakan setiap hari. Namun pekerjaan yang banyak itu jika dikerjakan oleh satu orang akan memakan waktu yang banyak sehingga mereka membentuk kelompok biasanya yang terdiri dari 7 orang dalam satu kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan dengan berkelompok memudahkan para transmigran dan orang Aceh. Kadang-kadang mereka menginap di perumahan orang Aceh atau di Meunasah.²⁵ Dengan menginap di sekitaran perkampungan orang Aceh, terjadi interaksi sosial antara warga dan transmigran, misalnya sholat berjamaah, makan bersama, dan aktivitas yang lainnya, walaupun dengan

keterbatasan bahasa, seiring berjalannya waktu, kedua kelompok masyarakat ini saling memahami bahasa masing-masing. Tidak lama kemudian banyak orang Aceh yang dapat berbahasa Jawa, dan banyak orang Jawa dapat berbahasa Aceh.

Proses akulturasi ini terjadi selama bertahun-tahun, ketika masa panen tiba, para transmigran akan datang ke pemukiman orang Aceh. Dan kadang-kadang orang Aceh yang datang untuk sekadar memberitahukan para transmigran bahwa musim panen telah tiba. Dalam hal ini terjadi integrasi sosial di antara keduanya. Jiwa mereka sudah menyatu dengan baik sehingga saling membutuhkan. Seorang transmigran bernama Imran bercerita:

“Kami ke sini untuk mengubah nasib, sudah seyogianya kita harus saling menghormati dan sopan santun terhadap sesama. Dan sebagai orang baru di suatu desa, ya memang seharusnya saling mengenal satu sama lain. Karena kita sama-sama saling membutuhkan sehingga terjadi interaksi yang sering. Dengan interaksi yang sering itu saya yakin kita tidak akan mudah terpecah belah dan terjadi konflik”.

Interaksi antara pendatang dan masyarakat lokal seperti yang dialami oleh transmigran Jawa yang berada di Bukit Hagu bahwa dapat diketahui dalam masyarakat yang dinamis. Konflik adalah keniscayaan. Keniscayaan itu mengejawantah dalam berbagai pola interaksi dan relasi individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat (Firdaus, 2014). Namun, di masyarakat sekitar Bukit Hagu keniscayaan tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh pertemuan budaya dan tradisi dalam masyarakat serta adanya identitas bersama, maka kehidupan masyarakat menjadi aman dan tenteram. Antarmasyarakat yang berbeda etnik tersebut nyaris tidak terjadi konflik antar kelompok, masyarakat berusaha untuk memahami budaya masing-masing, sehingga muncul hubungan sosial yang harmonis. Karena terjalannya hubungan yang harmonis antara masyarakat yang berbeda etnis tersebut, telah menciptakan

persatuan yang kokoh, sehingga membawa banyak perkembangan untuk daerah ini, diantaranya dalam bidang keagamaan, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya.

Fenomena lebih lanjut dapat diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan serta sekadar olahraga bareng pun sudah menjadi kebiasaan di antara warga masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal. Setiap tanggal 17 Agustus mereka menggelar berbagai lomba-lomba untuk tetap menjalin kekerabatan. Interaksi yang terjadi menunjukkan keharmonisan antara satu etnis yang lain dengan etnis yang lain pula. Hal tersebut menggambarkan bagaimana kondisi yang terjadi antara transmigran Bukit Hagu dengan warga Aceh yang memiliki kehidupan rukun dan tenteram. Sehingga, seyogianya, interaksi sosial memunculkan sebuah perasaan saling menghargai dan membutuhkan satu sama lain.

Dalam konteks seperti ini, manusia adalah seorang makhluk sosial yang memiliki arti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jelas bahwa, dalam kehidupan ini manusia saling memiliki ketergantungan untuk menciptakan integrasi satu sama lain dalam mendukung hidupnya. Setiap individu akan melebur menjadi satu dalam sebuah kelompok sosial yang dikenal dengan nama masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Interaksi sosial merupakan sebuah proses sosial yang terjadi apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial dan merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antara individu dan kelompok (Soekanto, 2000). Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa antara individu yang

satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.

Hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lain merupakan wujud integrasi sosial yang didorong oleh adanya saling ketergantungan kebutuhan antara sesama manusia. Integrasi sebagai bentuk hubungan antar manusia tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang mengitari kehidupan manusia itu sendiri. Integrasi dapat terjadi karena pertemuan langsung antar individu dan dapat pula terjadi karena persentuhan antar ide, paham dan budaya. Integrasi sosial dapat terjadi jika terdapat kontak sosial dan komunikasi, yang dapat dilihat dari dasar sudut pandang psikologis dan sosiologis.

Terciptanya hubungan sosial yang baik di antara etnis yang berbeda budaya tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi dapat berlangsung melalui interaksi yang baik dan intens melalui struktur sosial yang ada (Rahmad, 2015). Maka sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik menciptakan sebuah integrasi diantara masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis.

Hubungan antara transmigran dengan masyarakat lokal salah satunya adalah banyak terjadi perkawinan campuran antara transmigran etnis Jawa yang berada di desa Bukit Hagu dengan masyarakat lokal. Sehingga dengan adanya perkawinan antar budaya dan suku serta etnis ini memunculkan pertukaran budaya. Salah satu memunculkan tentang budaya orang Jawa seperti, kibotan, kuda kepang, dan ketoprak. Perkawinan campuran ini juga

memiliki dampak positif untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara antara salah seorang warga Aceh yaitu Nurjanah, yang bersuami orang Jawa mengatakan bahwa:

"... menurut saya, pernikahan campuran itu tidak masalah selama tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan kedua belah pihak saling menerima satu sama lain. Saya juga memiliki Suami orang Jawa, dan kehidupan kami normal-normal saja selama ini, budaya yang kami bawa masing-masing bisa kami pahami satu sama lain. Itulah cinta bisa mengalahkan perbedaan ras, dan budaya, asal tidak berbeda agama saja. Perkawinan campuran itu juga sangat unik, bisa menimbulkan wawasan budaya yang luas untuk anak-anak kami".

Interaksi yang terjadi antara etnis Jawa dengan Aceh didasarkan atas pola hubungan antara mereka yang dilandasi berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Adanya hubungan yang sesuai ini dengan keperluan mereka, mewujudkan jaringan-jaringan sosial yang bertujuan untuk memudahkan dalam kehidupannya. Berawal hanya sebagai hubungan perdagangan antara etnis Jawa yang ada di Bukit Hagu dengan orang-orang Aceh menimbulkan sebuah interaksi sosial. Kenyataannya, hubungan tersebut tidak berhenti sampai sebatas interaksi biasa. Namun sering terjadi perkawinan campuran yang mengakibatkan hubungan emosional antara kedua etnis tersebut semakin erat. Sebagian masyarakat Aceh yang berada di sekitar desa Bukit Hagu dan etnis Jawa yang keduanya merupakan muslim, percaya sepenuhnya bahwa jodoh, ada di tangan Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Aceh yang beristri orang Jawa, yaitu Muklis Kamarudin mengatakan bahwa:

"Meskipun jodoh itu merupakan sebuah takdir Allah, tidak berarti bahwa manusia harus diam terpaku hanya menanti

jodoh yang datang dari-Nya. Tetap harus ada upaya yang dilakukan untuk memperoleh jodoh yang tepat. Ketika dulu saya melihat bahwa istri saya yang sekarang ini cocok menjadi pendamping saya kelak, saya berusaha untuk mendekati dia, dan meyakinkan orang tuanya. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang mengatakan bahwa pernikahan beda etnis merupakan sesuatu yang dibenci oleh adat. Jika dia jodoh saya dan kami saling mencintai mengapa tidak untuk kami menikah. Yah, pada saat itu saya memutuskan untuk menikahi dia walaupun beda etnis yang penting saya bahagia”.

Berdasarkan kasus pernikahan diantara beda etnis tersebut dapat dilihat bahwa hadirnya para transmigran sebagai para pendatang di tengah-tengah kehidupan masyarakat pribumi akan membangun sebuah proses sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang dengan perorangan, antara kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Apabila seseorang bertemu dengan orang lainnya, maka pada saat itulah akan terjadi interaksi sosial. Meskipun pertemuan tersebut tidak saling menukar tanda-tanda atau terjadi percakapan di antara keduanya, interaksi sosial telah terjadi. Itulah yang terjadi diantara warga desa Bukit Hagu dengan orang-orang Aceh di sekitar desa Bukit Hagu sehingga memunculkan sebuah interaksi sosial dan menjalin kekerabatan yang tidak mudah digoyahkan oleh konflik semacam apapun.

Pernikahan campuran ini merupakan salah satu tindakan dalam memelihara hubungan yang sudah terbentuk dengan baik. Hubungan antara transmigran yang dulunya tidak erat, dengan terjadinya perkawinan ini membentuk sebuah kerekatan dan hubungan yang harmonis diantara masyarakat lokal dengan transmigran etnis Jawa. Perkawinan yang terjadi tersebut tidak

menimbulkan konflik, karena didasarkan atas dasar cinta dan kasih sayang. Seperti yang telah dikatakan oleh salah satu informan di atas bahwa dengan adanya perkawinan campuran ini akan memberikan wawasan yang luas bagi keturunan-keturunan mereka. Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa tidak terpikirkan akan terjadinya konflik di antara mereka.

Tujuan melakukan perkawinan ini didasarkan atas suka sama suka, selain itu dilakukan atas dasar memperbaiki keturunan. Dahulunya bahwa, ketika orang Aceh melaksanakan acara-acara masyarakat seperti sunatan, hajatan dan lain-lain, tidak jarang ditemukan masyarakat transmigran sering mengikuti acara, sehingga tidak jarang pula tertarik melihat gadis-gadis Aceh ketika ikut bersama dalam acara. Begitu pula sebaliknya, ketika ada acara yang diadakan oleh transmigran etnis Jawa di desa Bukit Hagu banyak pemuda-pemuda Aceh yang mendatangi acara sehingga tertarik terhadap gadis-gadis yang berada di desa Bukit Hagu. Berawal dari itu, terjadilah perkawinan campuran atas dasar suka dan cinta. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Sutrisno yang merupakan suami dari Nurjanah mengatakan bahwa:

“... pada saat orang-orang Aceh melakukan hajatan, banyak di antara kita para pemuda ikut ke tempat acara berlangsung. Dan tidak sedikit wanita-wanita Aceh yang memikat hati kami. Dan pada waktu itu, istri saya sangat cantik sekali, membuat saya tertarik. Dengan keberanian diri, saya mulai menjalin hubungan cinta dengan dia. Dan yang paling menegangkan ketika datang melamar dia ke orang tuanya. Waktu itu seakan-akan pertarungan nyawa yang saya taruhkan, khawatirnya menjadi konflik. Tetapi nyatanya tidak, namun saya diberikan syarat untuk bisa menikahi anaknya, saya disuruh menggarap sawahnya selama satu tahun. Dan selama satu tahun itu saya buktikan kalau saya sungguh-sungguh. Karena saya dipandang sungguh-sungguh sama bapaknya, maka kami dinikahkan dan sampai saat ini pernikahan saya

dengan istri saya. Didasarkan atas dasar cinta dan kasih sayang. Tidak sedikitpun menginginkan terjadinya konflik”.

Begitu pula yang dirasakan oleh orang Aceh yang beristri orang Jawa:

“... saya adalah anggota pembela Aceh, dulu sering singgah di desa Bukit Hagu, saya bertemu dengan istri saya ini, dan karena sering mampir, saya jatuh cinta dan saya menikahinya. Saya mengesampingkan kebencian terhadap pemerintah, dengan menikah dengan istri saya, saya memulai kehidupan baru bersamanya, bahagia bersama anak-anak kami” (Muklis Kamaruddin, warga Asli Aceh yang beristri orang Jawa).

Pernikahan antar etnis ini memang tidak akan menimbulkan konflik jika didasarkan atas cinta dan kasih sayang. Sehingga dengan adanya perkawinan ini akan membentuk sebuah sistem kebudayaan yang dapat memelihara pola-pola struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang termotivasi mereka dalam berbuat sesuatu. Dalam hal ini, tidak terjadinya konflik dengan cara melangsungkan pernikahan dengan masyarakat lokal memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda etnis jika memiliki kesempatan. Dalam konteks perkawinan yang terjadi antara transmigran dengan masyarakat lokal, ada struktur dalam masyarakat seperti penghulu, kepala desa, dan berbagai tokoh masyarakat fungsional dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk mewujudkan perkawinan tersebut sehingga tercipta sebuah hubungan yang baik. Dengan adanya perkawinan campuran tersebut dapat menjalin hubungan yang harmonis, mengenal satu sama lain, dan terjadinya pemeliharaan pola-pola hubungan antara transmigran etnis Jawa yang berada di desa Bukit Hagu dengan masyarakat lokal Aceh.

Hidup Aman di Tengah Perang

Hubungan yang terjalin antara transmigran etnik Jawa dengan GAM merupakan kasus unik. Ini fenomena langka mengingat GAM merupakan sebuah institusi yang menonjolkan sikap anti-Jawa. Anggota GAM yang berada di hutan sering mengalami kelaparan karena kesulitan mencukupi kebutuhan masing-masing. Secara diam-diam mereka pun mendatangi kampung terdekat untuk mengambil kebutuhan. Biasanya, kebutuhan pokok yang diambil dari kampung para transmigran disesuaikan untuk kebutuhan selama seminggu. Artinya, setiap minggu ada anggota GAM yang masuk desa. Hal ini seperti diungkapkan oleh mantan anggota GAM bernama Muhibbun:

“... kami mengandalkan bantuan masyarakat lokal, dalam organisasi ini, seminggu sekali ada yang bertugas dalam mengambil makanan pokok untuk dibawa ke markas-markas yang ada di hutan. Dalam perjalanan gerakan ini, tidak jarang bahwa anggota-anggota yang bertugas mengambil makanan di masyarakat lokal juga pernah tertangkap oleh tentara dan disiksa, terkadang ada juga yang meninggal, sehingga strategi kita ubah untuk mendapatkan makanan”.

Dalam hubungan antara transmigran etnis Jawa dengan GAM, didapatkan hasil bahwa ketika sebuah tujuan yang menjadi harapan gerakan GAM terhadap kecukupan bahan makanan selama berperang tidak tercapai. Salah satunya yaitu, ketika mereka beroperasi di hutan kecukupan mereka jauh dibilang dari kata cukup, sebab, jika mereka terang-terangan melakukan peperangan melawan tentara maka akan menyulutkan mereka pada kekalahan. Itulah sebabnya mereka berdiam diri di dalam hutan menunggu perintah dari pimpinan untuk melakukan penyerangan.

Konsekuensi yang mereka terima adalah ketidakcukupan bahan makanan yang mereka miliki, tidak jarang pula mereka

makan satu piring lebih dari tiga orang. Seperti yang diungkapkan oleh Nawi, salah satu bekas komandan operasi GAM:

"... saya memulai bergabung dengan GAM pada tahun 1997, waktu itu saya pernah menjadi "komandan bom" dan pernah menjadi komandan operasi. Salah satu pengalaman saya menjadi anggota GAM adalah ketika bergerak di hutan, tinggal di hutan, makanan menipis dan harus makan bersama-sama. Pernah juga kami makan satu piring bertiga, dan yang paling tidak terlupakan adalah tentang rokok satu batang kami berbagi dengan lima belas anggota GAM. Bahkan ketika ada sisa-sisa rokok kami linting lagi dan kita isap bersama. Pada saat seperti itu, kebersamaan kami benar-benar rekat, untuk memperjuangkan masyarakat, kami rela mati menghadapi tentara-tentara itu".

Mengharapkan dari sumbangan makanan dari markas besar sangat susah sekali. Kadang, muncul rasa penyesalan diri ketika mengenang masa-masa tersebut. Seperti penuturan salah satu mantan kombatan GAM bernama Amat:

"... bertahan hidup di hutan sambil menunggu perintah dari pimpinan, itu sangat sulit sekali, namun tetep kami berusaha untuk bertahan demi membela masyarakat Aceh yang tertindas oleh kekejaman tentara. Jika mengandalkan kiriman bahan makanan dari markas komando, akan sangat sulit sekali, karena pada waktu itu, tentara-tentara menguasai jalanan sehingga jika ada truk atau mobil GAM akan sia-sia. Walaupun dilakukan dengan cara penyamaran, tetap saja bakal diinterogasi sama tentara, sehingga, para anggota GAM yang lain juga mengandalkan hutan dan masyarakat lokal setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka ... pada saat saya bergabung dengan GAM, saya rela mati demi membela ideologi yang ingin memerdekakan Aceh menjadi bangsa yang terlepas dari Indonesia. Setiap pagi dan petang saya bergerilya untuk melakukan peperangan, pernah dihadapkan pada situasi di mana anggota GAM dikepung oleh

tentara, saya sangat ketakutan sekali pada saat itu, namun saya berusaha melarikan diri dan berhasil sembunyi dari hutan ke hutan. Mengingat akan hal itu saya sangat menyesal pernah terlibat dalam gerakan ini, saya banyak melihat mayat di mana, sahabat, saudara, orang-orang yang tidak bersalah dan banyak anak kecil, perempuan-perempuan menjadi kebangisan tentara dan anggota-anggota GAM. Tetapi semua itu sudah menjadi kenangan hitam saya”.

Keterdesakan di hutan memaksa para anggota GAM mencari solusi dalam bertahan hidup. Mengingat bahwa salah satu lokasi hutan tempat mereka beroperasi dekat dengan desa Bukit Hagu, mereka mencoba untuk mencari bantuan kepada masyarakat Bukit Hagu. Awalnya mereka melakukannya dengan cara mengancam para penduduk. Karena para anggota GAM juga saling mengenal dengan masyarakat, sebelum terjadi konflik sudah sering berkomunikasi dan bersama sehingga jalan kekerasan disampingkan, namun di diskusikan dengan jalan yang baik. Anggota GAM yang beroperasi di hutan juga kadang-kadang mendapatkan bahan makanan dari masyarakat transmigran etnis Jawa yang berada di Bukit Hagu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga transmigran etnis Jawa Ahmad Satari, yang menjadi negosiator utama ke GAM mengatakan bahwa:

“Hubungan kami antara GAM bisa dibilang cukup baik sebelum terjadinya konflik. Sehari-hari kami saling mengenal satu sama lain dan sering berinteraksi. Ketika mereka meminta secara paksa bahan makanan kepada kami, kepala desa kami dahulu memiliki power untuk mencegah terjadinya paksaan itu, kepala desa dan beberapa warga mendiskusikan permasalahan tersebut. Sehingga ditemukan solusinya dan GAM terkadang mendapatkan bahan makanan dari masyarakat transmigran di desa Bukit Hagu”.

Dengan adanya gerakan GAM yang meminta bahan makanan dari penduduk lokal dan penduduk transmigran, mencerminkan bahwa terjadinya suatu ketimpangan, atau adanya ketidakberfungsian suatu subsistem sehingga terjadilah ketimpangan tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa posisi dari kedua pihak membentuk sebuah struktur sosial yang saling ketergantungan.

“... dengan cara seperti itu, hubungan antara GAM dengan kami, semakin membaik karena di satu sisi kami membantu kebutuhan mereka, di sisi lain mereka juga bergantung kepada kami sehingga tidak berani melakukan pengusiran seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Ketika mereka melakukan gerakan-gerakan, kadang-kadang mereka kembali beraktivitas normal seperti biasanya, kadang-kadang pula ketika bersama-sama dengan mereka, sewaktu-waktu kembali ke hutan. Sehingga pergerakan mereka bersifat laten atau tersembunyi. Karena memiliki kepentingan satu dengan lain, hubungan baik antara GAM tetap terjaga sehingga kami pun aman” Hadisukseno, Ketua Koperasi Diponegoro di Bukit Hagu).

Dalam hubungan antara transmigran dengan GAM, terbentuknya interaksi antara transmigran dengan GAM merupakan sebuah hubungan yang baik. Interaksi sebagai kunci kehidupan manusia, kelompok, dan masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia dapat merasakan berbagai pengalaman hidup karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial sehingga menjalin sebuah ketergantungan satu sama lain. Hubungan antara masyarakat transmigran Jawa di Bukit Hagu dengan GAM setempat, yang bergerak di kawasan Lhoksukon, bisa dikatakan tidak berpotensi konflik sehingga saling ketergantungan satu sama lain.

Di sisi lain, ada TNI. Pada saat masyarakat dihimpit oleh dua kekuatan bersenjata yang saling berperang, masyarakat lokal maupun transmigran menjadi sangat menderita, mereka terjebak dalam pilihan kehidupan yang sulit karena tidak ada yang dapat membela mereka. Masyarakat dipaksa untuk mendukung pemerintahan Indonesia di satu sisi, di sisi lain, GAM menekan mereka sehingga posisi mereka terancam. Tidak sedikit yang menjadi korban keganasan kedua kelompok bersenjata tersebut. Sebagaimana GAM, anggota TNI juga menghadapi masalah kelaparan kalau sedang berpatroli di hutan selama sehari-hari. Singgih, seorang mantan tentara, memberi tahu penulis sebagai berikut ketika diwawancarai:

"... selama proses peperangan yang terjadi dengan GAM, kami rela mati dalam mempertahankan NKRI. Kami tidak lepas dari yang namanya berpatroli di kampung-kampung masyarakat Aceh lokal maupun di pemukiman transmigran etnis Jawa. Terkadang pula kami juga menelusuri hutan-hutan untuk mengintai markas-markas mereka. Masalah peperangan tidak kami hiraukan, entah mati di medan perang atau tidak, namun yang menjadi kekhawatiran kami bersama adalah tentang persediaan bahan makanan yang hampir habis. Jika mengandalkan kiriman dari pemerintah, akan sulit dan bahaya karena khawatirnya terjadi sabotase oleh para tentara GAM. Untuk itu kami meminta makanan ke masyarakat lokal Aceh dan pemukiman-pemukiman transmigran yang berada di daerah basis konflik GAM-RI. Namun itu juga tidak bisa membantu kami karena masyarakat ketakutan dan trauma akan konflik sehingga mereka semua berusaha untuk menyelamatkan diri mereka menjauh dari daerah konflik".

Prajurit TNI yang bertugas di daerah Aceh mereka juga kekurangan bahan makanan sebagai persediaan. Namun hal itu tidak terjadi di desa Bukit Hagu, para tentara yang sedang bertugas

di sana terkadang dipenuhi kebutuhannya. Akibatnya, para transmigran etnis Jawa yang berada di Bukit Hagu mendapatkan perlindungan dari para TNI. Tidak hanya itu, transmigran yang berada di desa Buket Hagu masih memiliki rasa kasihan karena masih termasuk bagian dari Republik Indonesia seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan, yaitu Siswoyo, mengatakan bahwa:

“... para tentara datang menemui kami ke desa untuk meminta bantuan makanan mengingat persediaan makanan mereka semakin sedikit. Karena masyarakat di sini memiliki persediaan makanan yang dikumpulkan dari hasil perkebunan sawit mereka, sehingga para tentara juga dibantu dengan bahan makanan tersebut. Selain itu, kami yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami dari tidak memiliki lahan sekarang sudah punya lahan juga punya tanggung jawab dalam membantu pemerintah. Salah satu yang dapat kami lakukan adalah dengan cara membantu dan mencukupi kebutuhan para tentara serta *men-support* kegiatan mereka. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi kami semua”.

Pergerakan dari TNI yang bersifat manifes atau terang-terangan tersebut juga memiliki dampak yang positif bagi transmigran etnis Jawa khususnya di lokasi penelitian yaitu desa Bukit Hagu. Mereka dapat menjalin hubungan yang baik dengan TNI, dan pengharapan rasa aman itu juga dapat mereka rasakan karena sifat dari pergerakan dari TNI adalah manifes diketahui oleh masyarakat luas. Artinya bahwa TNI dapat melindungi keberadaan mereka. Berbeda halnya dengan GAM bahwa ketika mereka sembunyi-sembunyi, masyarakat tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dengan fungsi manifes yang dijalankan oleh tentara republik Indonesia ini dapat membangun hubungan sosial di antara berbagai pihak. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat transmigran etnis Jawa yaitu Faturokin mengatakan bahwa:

"... keberadaan tentara yang nyata adanya dapat memberikan rasa nyaman terhadap kita semua. Karena mereka dapat kita lihat apa yang mereka lakukan. Sewaktu-waktu GAM mengacau, mereka akan pasang badan untuk kita".

Begitu juga dengan yang dirasakan oleh masyarakat lokal Aceh yang berada di sekitaran desa Bukit Hagu. Salah satu informan yaitu Keuchik Ali mengatakan bahwa:

"Kami bersyukur ada tentara yang berpatroli di sekitar desa kami, walaupun ada beberapa tentara di daerah lain juga kadang-kadang tidak mampu menjaga masyarakat, dengan kehadiran tentara ini, rasa aman itu ada, kadang-kadang GAM tersebut juga berlaku kasar kepada kami jika mereka tidak mendapatkan bahan makanan, dengan adanya tentara yang berpatroli persentase kedatangan GAM ke kami juga sedikit menurun, mereka juga mikir-mikir jika harus baku tembak secara langsung".

Di tengah kekusutan konflik antara GAM dengan TNI, para tokoh atau tetua di Bukit Hagu tidak memihak salah satunya. Bahkan dengan cerdas, mereka mulai berpikir untuk merangkul atau memanfaatkan kedua pihak demi terciptanya rasa aman di kampung mereka. Dengan sumber-sumber daya tertentu, mereka membangun *bargaining* dengan GAM dan TNI. Kedua pihak yang bertikai ini diservis agar mereka bersedia mengambil posisi yang sama: pelindung warga Bukit Hagu.

Transmigran di Bukit Hagu mendirikan koperasi sebagai wadah dalam pengumpulan hasil pertanian dan perladangan mereka. Waktu itu mereka sudah mengembangkan pertanian kelapa sawit yang hasilnya akan di jual ke pabrik kelapa sawit setempat. Hasil perkebunan yang dijual secara individu tergolong memiliki harga yang rendah dan memakan biaya operasional tinggi. Oleh sebabnya, mereka membuat sebuah koperasi yang dinamai Koperasi Unit Desa Diponegoro. Pengambilan nama koperasi ini

didasarkan pada perjuangan Pangeran Diponegoro. Pemilihan nama ini sangat menjadi penyemangat bagi mereka untuk selalu tetap bertahan dalam peliknya situasi kehidupan transmigran pada saat itu.

Keuntungan yang didapatkan dari penjualan anggota koperasi disisihkan sebesar 15% untuk simpanan jangka panjang, yang akhir tahun dibagi sebagai sisa hasil usaha. Selain itu, keuntungan 15% tersebut digunakan untuk pengadaan pembelian pupuk bersama dan kebutuhan lainnya. Usai pendirian koperasi, selanjutnya para pengurus mencari bantuan pemerintah dan pihak swasta untuk memodali usaha koperasi.

Berdiri dan mandirinya koperasi ini menjadi saksi terjadi konflik Aceh yang menimbulkan eskalasi kekerasan dan Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Terkait konflik, banyak terjadi pemungutan liar *pajak nanggroe* oleh GAM terhadap orang-orang Jawa.

Di samping itu, TNI yang mendirikan pos-pos keamanan di seluruh Aceh sebagai langkah dalam membekukan pergerakan GAM mengalami ketidakcukupan kebutuhan sehari-hari untuk personel. Bekal yang diberikan pemerintah tidak cukup. Secara tidak langsung, prajurit TNI meminta para transmigran Jawa di Bukit Hagu untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam melaksanakan tugas. Hal utama yang diminta adalah kebutuhan primer: makanan dan minuman.

Kondisi ini menempatkan transmigran Jawa dalam keadaan terjepit di antara dua kekuatan bersenjata. Di satu pihak, ketika transmigran tidak memberikan apa yang diinginkan oleh GAM, maka mereka akan diancam dengan pengusiran atau pembakaran rumah. Termasuk pula ternaknya akan dibunuh. Di sisi lain, TNI juga minta dipenuhi kebutuhannya oleh warga transmigran. Upaya membantu TNI tidak pernah terpaksa. Para transmigran menganggap itu sebagai tanggung jawab mereka.

Para sesepuh di Bukit Hagu kemudian mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk mencari solusi. Tak berlarut-larut, mereka kemudian sepakat untuk tidak lagi membagikan hasil sisa usaha di Koperasi Diponegoro kepada anggota koperasi. Hasil sisa usaha tersebut disepakati untuk dibagikan kepada komplotan GAM serta prajurit TNI setempat.

Dalam kasus ini, tokoh beserta aparat desa mengadakan negosiasi dengan kedua belah pihak. Warga akan memberikan kompensasi berupa uang bulanan kepada TNI dan GAM, dengan syarat TNI akan melindungi mereka dan GAM tidak menyerang atau mengusir mereka dari desanya. Negosiasi ini bertujuan utama untuk melindungi semua orang yang berada di Bukit Hagu.

Hubungan saling ketergantungan ini berhasil tercipta karena satu sama lain saling membutuhkan. Karena terciptanya keamanan yang dijamin oleh GAM sekaligus TNI, banyak orang di luar Bukit Hagu memilih untuk mengungsi ke Bukit Hagu. Dalam bayangan mereka, daripada harus eksodus ke Medan, Sumatra Utara, lebih bagus eksodus ke Bukit Hagu karena jaraknya dekat sehingga mereka tetap bisa berada tak jauh dari aset-asetnya, yakni rumah, kebun, dan peralatan kerja yang tak mungkin diangkut saat eksodus. Suritno adalah satu dari sekian orang yang melakukan ini. Dia menjelaskan:

“Saya merupakan warga desa Sidomulia yang mengungsi ke desa Bukit Hagu, dulu, di desa itu terjadi pengusiran besar-besaran yang jika saya ingat bakalan menyakiti hati saya. Rumah-rumah dibakar, kendaraan-kendaraan dihancurkan, pemukiman, kekerasan tiada henti sampai ada korban yang ditembak. Sungguh pilu kejadian itu, banyak dari kita harus berjalan berpuluh-puluh kilo mengungsi ke desa yang satu ke desa yang lain. Namun kondisi yang saya temukan tidak jauh berbeda. Tetapi ketika saya pergi menuju desa Bukit Hagu, kondisinya berbeda. Hampir 95% warganya tidak mengungsi

sama sekali, namun saya melihat mereka kadang-kadang berbaaur dengan warga Aceh. Dan saya di terima di desa ini sebagai bagian dari warga etnis Jawa. Saya sanggup jadi apapun asal ada tempat berteduh, dan selama dua tahun saya menjadi buruh di salah satu persawahan warga desa Bukit Hagu yang berada di Lhoksukon dan setelah beberapa tahun saya mampu membangun rumah dan menetap sampai saat ini”.

Desa Bukit Hagu selama masa konflik dapat dikatakan merupakan salah satu tempat teraman untuk mengungsi dan menetap. Hal ini disebabkan karena desa Bukit Hagu memiliki ketergantungan dan hubungan emosional dengan masyarakat Aceh sehingga tidak mudah untuk mengalami konflik. Terlepas dari interaksi sosial yang mempengaruhi tidak terjadinya konflik dan tidak terusirnya transmigran etnis Jawa dari Bukit Hagu, ada hal yang penting yang menjadi kunci dalam memudarkan konflik antara GAM dan TNI yang basis pergerakannya di sekitar desa Bukit Hagu. Kemampuan masyarakat transmigran dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik didukung oleh sumber daya yang mereka miliki. Kebutuhan pangan untuk GAM dan TNI dipenuhi oleh transmigran yang berada di Bukit Hagu selama konflik berlangsung.

Tidak hanya itu, hasil kelebihan dari koperasi sudah ditentukan berapa yang harus diberikan ke GAM dan TNI untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seperti yang dikatakan oleh ketua koperasi, Hadisukmono, bahwa:

“... berdasarkan kesepakatan antara seluruh transmigran yang tergabung dalam koperasi “Diponegoro” menyetujui tentang pemberian jatah kepada masing-masing anggota bersenjata yaitu GAM dan TNI. Waktu itu mereka diberikan sejumlah uang, kalau tidak salah jumlahnya sampai 10 jutaan dengan syarat untuk tetap menjaga kedamaian di desa Buket Hagu. Sejumlah transmigran bernegosiasi ke GAM untuk tidak melakukan kekerasan, pembantaian dan menjaga agar desa

Bukit Hagu terlepas dari daerah konflik. Begitu pula terhadap TNI, kepala desa pun melakukan negosiasi untuk selalu menjaga keselamatan dan kedamaian untuk masyarakat transmigran”.

Tentu saja saya coba mengejar klarifikasi dari pihak GAM mengenai hal ini. Saya akhirnya mendapat pengakuan langsung dari beberapa mantan petempur GAM yang membenarkan bahwa mereka dan kawan-kawannya bisa terhindar dari kelaparan berkat pangan yang diberikan orang-orang Jawa di Bukit Hagu. Sholeh salah satunya, berkata:

“Masyarakat Desa Bukit Hagu merupakan masyarakat yang baik. Mereka tidak takut akan adanya kelompok bersenjata GAM, bahkan mereka membantu kami dalam urusan bahan pangan. Selain itu juga masalah kedekatan sebelum terjadinya konflik, masyarakat transmigran di Desa Bukit Hagu sering berbaur dengan masyarakat lokal Aceh. Dengan adanya bantuan makanan dari mereka, kami bisa menyambung hidup di hutan untuk tetap melaksanakan gerilya. Dan kami memegang janji kami pada saat itu, untuk tidak pernah mengusik keberadaan mereka, karena kami juga bergantung akan mereka”

Tokoh GAM setempat lainnya, Muhibbun, pun mengakui hal serupa:

“Kerja sama antara GAM dan transmigran yaitu dalam bentuk saling bantu membantu, walaupun GAM benci sama orang-orang Jawa, tetapi transmigran yang ada di desa Bukit Hagu, sudah banyak juga membantu GAM dalam bahan-bahan pokok. Saya sering ke desa Bukit Hagu, sebelum terjadinya konflik, saya juga sudah berkawan baik dengan mereka-mereka itu, transmigran itu sopan-sopan dan ramah, tidak pelit, jadinya bagaimanapun ideologi GAM yang ingin juga mengusir etnis Jawa dari Aceh, akan kalah dengan hubungan kekerabatan itu. Dan dari cerita transmigran kepada saya,

mereka memberikan GAM sejumlah uang dalam sebulan dan memenuhi kebutuhan pokok mereka”.

Di sisi lain, mantan prajurit TNI yang pernah bertugas di sekitar Bukit Hagu pun mengamini pengakuan transmigran Jawa yang menjadi informan saya. Salah satu prajurit yang menjadi saksi negosiasi tersebut adalah Agus Paripurno:

“... mereka memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan dengan GAM sehingga mereka tidak terusir dari tempat tinggalnya. Struktur yang dibentuk dalam masyarakat cukup membantu mereka dalam melakukan negosiasi. Dengan adanya koperasi yang mereka bangun, dapat membantu kehidupan mereka. Berbeda dengan daerah lain yang saya ketahui bahwa, koperasi mereka tidak berjalan dengan baik. Disebabkan pengelolaan yang kurang bagus, dengan adanya koperasi tersebut dapat membantu mereka bertahan dalam konflik. Selain itu juga dapat membantu kami dalam bertahan hidup karena ada sumbangan bahan pokok”.

Transmigran Jawa di Buket Hagu tidak menginginkan konflik, namun mendambakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, suatu sistem sosial dianggap dapat diprogramkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu sehingga mempunyai fungsi dalam membangun unsur-unsur ketertiban sosial dalam masyarakat. Dengan adanya hubungan dengan TNI dan GAM menyebabkan terbentuknya solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang terbentuk mengakibatkan masyarakat menyampingkan konflik yang terjadi di antara mereka.

Keseimbangan struktural atau lebih sering dikenal keseimbangan sosial dianggap sebagai proses sosial yang mendasar dalam mengkaji permasalahan di dalam masyarakat. Keseimbangan sosial ini menjelaskan bagaimana perasaan, sikap dan keyakinan, yang dimiliki aktor sosial terhadap satu sama lain, serta mempromosikan pembentukan kelompok-kelompok sosial yang

stabil. Dalam teori keseimbangan sosial, aktor sosial memegang peranan penting dalam mengatur dan mewujudkan keseimbangan dengan mentaati norma-norma pada masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi aktor sosial adalah transmigran etnis Jawa yang memegang peranan dalam menciptakan sebuah keseimbangan di antara transmigran, GAM, TNI, dan masyarakat lokal sehingga transmigran Jawa yang berada di Desa Buket Hagu tidak terusir dan mampu bertahan dalam dinamika konflik yang terjadi.

Keseimbangan sosial menggambarkan bagaimana sebuah struktur individu dan kelompok serta objek seimbang dan struktur yang lain tidak seimbang karena disebabkan oleh pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam hal ini, transmigran pada awal-awal kedatangan mereka di Bukit Hagu, hubungan yang terjalin dengan masyarakat lokal cukup baik. Pengaruh positif yang diberikan oleh transmigran kepada masyarakat lokal mengakibatkan terjadinya sistem sosial yang seimbang. Terlihat bahwa, kehadiran dari para transmigran sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Pada saat itu, masyarakat lokal Aceh memiliki sawah yang sangat luas dan tidak mampu untuk bekerja sendiri mengurus sawah mereka. Jika mengandalkan tenaga lokal, upah yang mereka minta sangat tinggi, namun dengan kehadiran para transmigran, mereka tidak pernah meminta upah kepada pemilik sawah, berapa pun yang diberikan kepada mereka pasti diterima. Dengan demikian, para pemilik sawah sangat senang dengan sikap yang dimiliki oleh orang-orang Jawa. Interaksi sosial pun terjadi saat itu dan membentuk hubungan yang harmonis. Tidak jarang pula mereka diberikan bibit oleh masyarakat lokal untuk mereka tanami di pekarangan rumah mereka. Seperti penjelasan Sawidi (tokoh masyarakat yang menjadi negosiator dengan GAM):

“... pada awalnya interaksi baik-baik saja, karena orang-orang Aceh dapat tambahan buruh tani untuk menggarap lahan

persawahan mereka. Dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Aceh yang menjadi buruh. Misalnya ketika panen kita juga dikasih hasil panennya, berapa pun kami dikasih kami terima tanpa mematok harga. Walaupun padi yang belum digiling pun kami menerimanya untuk menyambung hidup”.

Hubungan positif ini memacu struktur sosial menjadi seimbang. Kekkerabatan mereka menjadi baik. Hal ini karena terbentuk interaksi sosial diantara mereka, di mana interaksi sosial merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang tumbuh dari pola-pola perikelakuan manusia yang berbeda-beda menurut situasi dan kepentingan yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial. Hubungan sosial ini pada awalnya merupakan proses sosial penyelesaian nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian meningkat menjadi semacam pergaulan yang tidak hanya sekadar pertemuan fisik melainkan merupakan pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut, misalnya saling berbicara (komunikasi), kerja sama dan menyelesaikan suatu masalah, atau mungkin pertemuan dalam suatu pertikaian dan lain sebagainya (Soekanto, 1985). Hubungan sosial antara transmigran dengan masyarakat lokal semakin harmoni melalui ikatan bisnis di antara keduanya. Mereka saling ketergantungan satu sama lain, di satu sisi, para pedagang pengepul yang berada di Lhoksukon membutuhkan hasil perkebunan dari masyarakat transmigran, begitu juga sebaliknya para transmigran membutuhkan kebutuhan pokok seperti beras, garam, rokok, dan bahan pangan lainnya. Sehingga para pedagang pengepul akan datang ke desa Bukit Hagu untuk membeli hasil perkebunan sekaligus menjajakan dagangannya ke transmigran.

Namun hubungan sosial ini sempat mengalami kerenggangan disebabkan karena pergolakan GAM sudah mulai di seluruh daerah Aceh. Pergerakan GAM yang terjadi di Aceh mengakibatkan perubahan yang sangat jauh berbeda dengan awal-awal kedatangan. Ada rasa takut dan khawatir akan terjadinya pengusiran terhadap transmigran etnis Jawa. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Satari (Negosiator utama ke GAM, Pernah menjadi DPRD Aceh Utara tahun 2009-2014):

“... menegangkan dan rasa takut selalu ada dalam diri masing-masing transmigran. Karena yang dilihat konflik. Sampai-sampai tidak bisa keluar dari Desa Bukit Hagu untuk sekadar belanja. Selama waktu 3 bulan itu cukup membuat masyarakat transmigran trauma dengan kondisi yang ada”.

Adanya Koperasi Diponegoro memicu faktor penting dalam menciptakan keseimbangan sosial yang ada di antara transmigran etnis Jawa, dengan GAM dan TNI. Di mana keuntungan dari hasil usaha masyarakat transmigran tersebut diberikan kepada GAM sebanyak 5 juta dan TNI sebanyak 10 juta. Seperti yang diungkapkan oleh pak Sawidi yang merupakan tokoh masyarakat dan negosiator ke GAM:

“... kami punya koperasi yang merupakan tempat menaruh sisa hasil usaha masing-masing orang, kami memberikan GAM sejumlah uang sebesar 5 juta untuk GAM dan 10 juta untuk TNI. Itu masih pemberian resmi, belum pemberian yang tidak resmi, uang itu dan pemberian lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan syarat, mereka tidak mengganggu dan mengusik kami. Kalau ada lebih bakalan kami kasih, kita sama-sama bertahan untuk hidup. Jika ada permasalahan lain mengenai GAM saya dan beberapa tokoh masyarakat lainnya melakukan negosiasi kepada GAM untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Pada masa konflik GAM dengan TNI, masyarakat transmigran memiliki kemampuan dalam menciptakan keseimbangan di antara masyarakat lokal, GAM dan TNI. Proses keseimbangan yang terjadi adalah ketika transmigran atas desakan GAM membabat hutan untuk dijadikan kayu-kayu bahan bangunan kemudian di jual kepada panglong (pemilik toko bahan bangunan) yang berada di Lhoksukon. Dalam hubungan bisnis yang terjadi antara Panglong yang merupakan masyarakat lokal, mereka di-*backup* oleh TNI sehingga hubungan bisnis yang sebenarnya tidak dibenarkan tersebut dapat berjalan lancar. Kemudian hasil dari bisnis tersebut dibagikan kepada GAM. Tentunya hubungan ini menciptakan interaksi sosial yang kuat sehingga tidak mudah untuk terjadinya konflik. Berkembangnya usaha perdagangan transmigran dari hasil usaha palawija, kebun karet dan kelapa sawit, serta ternak-ternak mereka membantu menyejahterakan para masyarakat desa Bukit Hagu. Perdagangan tersebut merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Betapa tidak, lahan seluas dua hektare yang dimiliki masing-masing transmigran yang ditanami kelapa sawit menghasilkan 4-5 ton buah kelapa sawit yang di panen 2 kali dalam sebulan. Hasil penjualan kelapa sawit ke pabrik-pabrik yang berada di sekitar Lhoksukon sebagiannya disimpan oleh koperasi Diponegoro untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak dari para transmigran.

Transmigran yang memberikan bantuan kepada GAM dan TNI dapat menciptakan keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi konflik di Bukit Hagu. GAM yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan mengusir transmigran tidak mampu terwujud karena hubungan ketergantungan. Begitu juga dengan TNI, dalam kasus ini, bukan TNI yang memiliki power untuk melindungi transmigran, namun transmigran lah yang memiliki power dalam melindungi TNI dari serangan GAM. Seperti yang diungkapkan oleh

M. Sholeh (Imam Dusun Harapan Mulia) yang sangat disegani oleh seluruh penduduk desa Bukit Hagu mengatakan:

"... kalau mereka mau menyerang kami, kami tidak bisa melawan apa-apa, namun mereka tidak berani menyerang kami, karena kami bernegosiasi dengan mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka, dan kami yang mengatur mereka, kami berikan makanan-makanan pokok dan uang 5 juta buat mereka. Ketika TNI beroperasi kami kasih tahu kepada mereka untuk pergi, sehingga mereka pergi dari markas mereka, sebagian ada yang tinggal yang keras kepala tersebut sehingga ditangkap oleh TNI. GAM itu membutuhkan kita, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan pengusiran terhadap kami".

Salah satu keseimbangan sosial yang tercipta dalam hubungan transmigran dengan pihak-pihak yang berkonflik adalah dengan memberikan informasi ke masing-masing pihak. Seperti yang dikatakan M. Sholeh dalam wawancaranya bahwa, informasi TNI mengadakan operasi diberberkan ke GAM untuk tidak terjadi pertumpahan darah, begitu juga sebaliknya, ketika GAM mengadakan operasi, TNI diberitahukan untuk meninggalkan posko-posko mereka yang berada di Bukit Hagu demi keselamatan mereka. Sumber informasi mereka berasal para pedagang pengepul yang sering melakukan transaksi ke Bukit Hagu, mereka dekat dengan GAM dan mereka juga dekat dengan TNI. Sehingga dalam kehadiran mereka sangat berperan sebagai informasi bagi transmigran untuk mengatur kedua pihak yang bertikai. Seperti dalam teori keseimbangan sosial bahwa, dalam mewujudkan sebuah keseimbangan sosial, aktor sosial yang terlembaga dalam masyarakat harus mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus transmigran desa Bukit Hagu, transmigran memiliki power dalam mengatur mereka sehingga ketika para GAM dan TNI mengikuti norma-norma yang telah

disepakati bersama dapat mewujudkan sebuah keseimbangan sosial yang dapat menekan terjadinya konflik.

Secara keseluruhan warga di Desa Bukit Hagu telah sukses membangun komunikasi sosial dan pola hubungan sosial di antara warga komunitas yang lebih dominan bercirikan integral, interdependen, dan harmonis di tengah kehidupan sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ketergantungan dan hubungan sosial tersebut tidak hanya berlangsung dalam pola hubungan biasa sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu telah memasuki ruang sosial yang kondusif tanpa adanya rintangan soal perbedaan agama dan budaya yang cukup berarti.

Kini, sebagian warga komunitas transmigrasi telah melangsungkan pernikahan/kawin dengan penduduk lokal di sekitar wilayah Desa Bukit Hagu. Dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan/kawin bagi mereka yang berbeda keyakinan, tetap menjunjung tinggi praktisi beragama dan adat istiadat masing-masing etnis yang tampak mulai dari prosesi lamaran hingga pada acara pelaksanaan seperti yang sudah lazim terjadi di Desa Bukit Hagu yang mayoritas penghuninya adalah orang Jawa yang beragama Islam. Akan tetapi, pernikahan yang berlangsung antara warga transmigrasi dengan penduduk lokal digelar dengan memadupadankan adat dari kedua belah pihak. Demikian pula dalam hal penampilan kesenian, setelah menggelar tari-tarian tradisional Jawa, setelah selesai acara maka akan dilanjutkan dengan adat Aceh dan begitu sebaliknya.

Tampaknya, masalah pernikahan/kawin tersebut berlangsung dengan lancar dan aman, karena pada umumnya mereka tidak mempersoalkan masalah perbedaan etnis dan keyakinan dan bahkan amat terkesan bahwa semua pihak relatif terbuka untuk saling menerima, sehingga tidak ada lagi diantara etnis tertentu atau semua etnis yang terkesan begitu fanatik atas nama agama dan adat istiadatnya masing-masing.

Pada pesta pernikahan masyarakat Jawa, adat Jawa berupa kuda kepong yang digunakan untuk meramaikan pesta pernikahan sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal, baik itu yang GAM maupun masyarakat lokal yang tidak ikut GAM pun sangat antusias mengikuti acara tersebut. Begitu pula dengan TNI, karena satu-satunya hiburan mereka setelah lelah menjaga masyarakat tetap aman yaitu kalau ada pesta-pesta pernikahan yang mengadakan acara hiburan. Tidak dipungkiri bahwa, GAM dan TNI yang terlihat bengis dan kejam pun sangat menyukai acara ini. Tidak jarang bahwa, pemuda GAM maupun masyarakat lokal tertarik dengan perempuan transmigran Jawa banyak yang menikah karena ketertarikan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Tayeb Sulaiman selaku Keuchik Seunebok Lama:

“... karena ini berbicara dua etnis yang berbeda, tentu mereka membawa masing-masing budaya dan adat istiadat mereka. Dan inilah yang menjadi kekaguman saya terhadap transmigran ini, mereka hidup ditanah orang, mereka rela tidak menonjolkan budaya dan adat istiadat mereka demi menciptakan keadaan yang seimbang, namun tidak melupakan budaya mereka. Dan mereka berusaha untuk mempelajari budaya orang-orang Aceh tersebut, seperti budaya berdagang, mereka pelajari agar transaksi mereka lancar. Terus dalam adat pernikahan, bahkan ketika saudari istri saya menikah dengan orang Jawa, mereka mengombinasikan dua adat yang berbeda. Kalau sudah harmonis sih, diapakan saja bakalan enak tanpa terjadi konflik. Beda dengan kebanyakan transmigran yang berada di daerah lain”.

Perkawinan menjadi jalan bagi penyatuan dua budaya yang berbeda. Dalam setiap perkawinan orang Aceh, makanan khas Jawa pun kadang-kadang digunakan sebagai hidangan oleh orang Aceh dalam pesta perkawinan mereka. Selain dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, proses akulturasi juga terjadi dalam ruang

bahasa daerah yang digunakan masing-masing etnik yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur tetap menggunakan bahasa dan dialeknya, sehingga bahasa dan dialek warga transmigran tersebut dimengerti dan digunakan oleh penduduk lokal dan masyarakat pendatang lain yang sudah pandai berbahasa dan berdialek Jawa. Demikian pula sebaliknya, warga komunitas transmigrasi itu sendiri juga sudah banyak memahami bahasa penduduk lokal sehingga dalam praktik kesehariannya, tak sedikit ditemui mereka tetap saling mengerti dan memahami maksud dari percakapan, walaupun menggunakan bahasa daerah masing-masing. Posisi transmigran etnis Jawa dengan masyarakat lokal, GAM dan TNI dalam bidang budaya menunjukkan hubungan yang baik diantara mereka sehingga mewujudkan keseimbangan sosial.

Penduduk transmigran yang berada di desa Bukit Hagu memiliki kedudukan yang setara dengan masyarakat lokal. Untuk saat ini, mereka sudah bagian dari Aceh dan tidak lagi menjadi permasalahan. Bukan lagi target GAM yang dianggap sebagai representasi dari pemerintah pusat. Keuchik Bukit Hagu Giri Saputra mengutarakan:

“Falsafah hidup kita itu di mana Bumi di pijak, di sana langit di junjung. Itu yang saya sampaikan kepada Abang-abang GAM itu dan mereka baru tertegun mendengar itu. Saya katakan, kalau saya mau berbuat demikian bukan saya bangun Jawa Pak, kalau saya mau bangun Jawa ya di Pulau Jawa sana. Yang saya acungi jempol pada saat konflik hingga kini dan *InshaAllah* yang akan datang nantinya, bahwasanya kami yang ada di Trans sana itu, bukan, oh sana orang Jawa, sekarang tidak ada lagi seperti itu, kami orang Aceh Pak, bahasanya saja orang Jawa, karena bahasa Aceh itu sulit. Kalau dikatakan di Bukit Hagu itu orang Jawa, ya enggak ada pak, karena di Aceh ini semua orang Aceh”.

Pernyataan Giri Saputra tersebut menggambarkan bahwa masyarakat transmigran juga ingin diakui sebagai bagian dari Aceh. Karena di daerah asal pun mereka tidak memiliki apa-apa hanya sebatas keluarga yang masih tinggal di sana. Sehingga dalam keseharian mereka, tidak takut akan terjadinya konflik sampai pengusiran, disebabkan oleh mereka sudah lama tinggal dan memiliki bisnis yang berkembang. Sebelum datang GAM ke desa Bukit Hagu, perkebunan kelapa sawit mereka sangat sukses dan mereka mampu panen dua kali dalam sebulan. Penghasilan mereka sangat banyak, dan rumah-rumah mereka sudah lebih baik daripada baru-baru datang, secara keseluruhan mereka memiliki kehidupan yang sejahtera. Hubungan bisnis dengan masyarakat lokal pun semakin berkembang dan memiliki interaksi yang intens. Dengan sumber daya yang mereka miliki, posisi mereka diantara GAM, TNI dan masyarakat lokal pun semakin strategis. Transmigran dapat mengatur elemen-elemen masyarakat dengan memaksimalkan fungsi dari struktural masyarakat mereka. Dari hubungan dalam bidang ekonomi ini, masyarakat transmigran hidup berkecupan bahkan sampai bisa membantu GAM dan TNI. Dalam hal ini terwujud keseimbangan sosial antara transmigran etnis Jawa dengan masyarakat karena lokasi transmigran yang berada jauh dari mereka sehingga tidak menimbulkan iri hati karena transmigran dapat sukses dengan pemberian lahan oleh masyarakat, yang seyogianya merupakan hak dari masyarakat lokal Aceh.

Bidang politik merupakan salah satu bidang yang sangat memiliki peran dalam bertahannya masyarakat transmigran di desa Bukit Hagu. Betapa tidak sistem politik yang diterapkan oleh masyarakat transmigran adalah dengan sistem negosiasi serta sistem informasi. Negosiasi dilakukan dengan mencukupkan kebutuhan GAM dan Transmigran untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan peperangan.

Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial

Selanjutnya untuk sistem informasi, masyarakat lokal memberikan informasi kepada transmigran terkait dengan GAM dan TNI. Informasi tersebut digunakan oleh masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan sosial yang terjadi. Dengan adanya sistem politik tersebut, mereka dapat bertahan dan tidak terusir dari Desa Bukit Hagu.

BAGIAN 4

Transmigrasi Pascakonflik

Di Aceh, pemulihan terhadap kerusakan program transmigrasi sudah dimulai saat perang masih terjadi atau belum berakhir. Para transmigran Jawa yang sudah bereksodus ke kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi lain dibujuk untuk kembali ke kampung mereka dengan iming-iming akan dijamin keselamatannya. Pemerintah meyakinkan mereka bahwa kesatuan militer telah tersedia sehingga para pemberontak yang anti-Jawa dan ingin menyakiti orang-orang Jawa tidak akan mampu masuk ke dalam desa.

Kenyataannya, jaminan itu tidak mendatangkan hasil yang sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Sebagian transmigran memutuskan kembali, lainnya yakin dengan keputusan untuk meninggalkan rumah dan ladang mereka. Aset-aset ini tentu tak dibiarkan terbengkalai, tetapi juga tak dijual dengan harga yang layak. Dengan rasa pasrah, orang-orang yang tak mau pulang itu menjual aset-aset mereka dengan harga teramat murah. Orang-orang Aceh yang dekat dengan mereka dan memiliki uang, tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membeli aset tersebut. Bagi transmigran yang menjualnya, dapat sedikit lebih baik ketimbang aset mereka terbengkalai bahkan mungkin nanti kepemilikannya bisa saja beralih sehingga mereka tak dapat apa-apa. Kerugian tak dapat dihindari. Yang tersisa untuk diperbaiki adalah meminimalisasi kerugian yang akan diderita.

Jaminan keamanan yang dikeluarkan militer pun tidak otomatis mendatangkan dampak positif. Setelah militer mengeluarkan pernyataan akan menjamin keselamatan para transmigran, dampak pascaeksodus kenyataannya masih berlanjut. Banyak transmigran yang enggan kembali ke Aceh. Alasannya macam-macam. Pertama, mereka masih merasa tidak adanya jaminan keamanan bagi orang-orang Jawa jika kembali ke Aceh. Kedua, para transmigran masih mengalami trauma dengan berbagai tindak kekerasan yang disaksikan dan dirasakan selama konflik. Ketiga, para transmigran memandang tempat pengungsian bisa menjadi tempat mereka melanjutkan masa depan dengan "membuka usaha baru". Menurut Alihat (2012), keengganan itu juga terjadi lantaran keterbatasan dana pemerintah untuk "memobilisasi ulang transmigran ke Aceh dalam jumlah besar". Sementara itu, kegundahan para transmigran muncul karena pernyataan beberapa pejabat daerah Aceh yang mengatakan bahwa transmigran merupakan sumber konflik. Terdapat 15.022 ribu kepala keluar yang tidak ingin kembali ke Aceh. Akibatnya, sawah dan kebun transmigran terbengkalai, khususnya di daerah zona merah (Juli, 2013).

Konflik vertikal yang terjadi antara GAM dengan pemerintah pusat, juga menimbulkan konflik horizontal yang melibatkan etnis Jawa. Sehingga di daerah-daerah lain, GAM dan sebagian masyarakat lokal membenci orang Jawa dan melakukan pengusiran besar-besaran. Namun di desa Buket Hagu ini tokoh masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam mencegah pengusiran tersebut. Adanya GAM tersebut disebabkan karena pengaruh negatif yang berasal dari para pembenci pemerintahan pusat sehingga mengakibatkan struktur lain dari masyarakat tidak seimbang. Teori keseimbangan mengklaim bahwa yang tidak seimbang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman dari

pengaruh negatif bahwa perasaan negatif ini mendorong orang berjuang untuk struktur yang seimbang, karena pada dasarnya struktur yang seimbang lah yang menjadi impian dalam diri masing-masing aktor sosial ketika masyarakat menginginkan struktur yang seimbang, dalam hal ini adalah transmigran etnis Jawa maka akan terjadi hubungan di antara mereka.

Pada masa konflik GAM dengan TNI, masyarakat transmigran memiliki kemampuan dalam menciptakan keseimbangan di antara masyarakat lokal, GAM dan TNI. Proses keseimbangan yang terjadi adalah ketika transmigran atas desakan GAM membatat hutan untuk dijadikan kayu-kayu bahan bangunan kemudian di jual kepada panglong (pemilik toko bahan bangunan) yang berada di Lhoksukon. Dalam hubungan bisnis yang terjadi antara Panglong yang merupakan masyarakat lokal, mereka di-*backup* oleh TNI sehingga hubungan bisnis yang sebenarnya tidak dibenarkan tersebut dapat berjalan lancar. Kemudian hasil dari bisnis tersebut dibagikan kepada GAM. Tentunya hubungan ini menciptakan interaksi sosial yang kuat sehingga tidak mudah untuk terjadinya konflik. Berkembangnya usaha perdagangan transmigran dari hasil usaha palawija, kebun karet dan kelapa sawit, serta ternak-ternak mereka membantu menyejahterakan para masyarakat desa Buket Hagu. Perdagangan tersebut merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Betapa tidak, lahan seluas dua hektare yang dimiliki masing-masing transmigran yang ditanami kelapa sawit menghasilkan 4-5 ton buah kelapa sawit yang di panen 2 kali dalam sebulan. Hasil penjualan kelapa sawit ke pabrik-pabrik yang berada di sekitar Lhoksukon sebagiannya disimpan oleh koperasi Diponegoro untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak dari para transmigran.

Kedatangan etnik Jawa di Aceh dalam program transmigrasi seperti dikatakan oleh Sri Mulyono bahwa itu telah dimulai pada

zaman kerajaan Majapahit. Hal ini dikonfirmasi oleh pendapat Pengawas Pujakesuma Langsa, Dr. Zulkarnaen, S.B., M.A, bahwa orang Jawa di Aceh telah datang sejak masa raja-raja masa lalu, seperti adanya program Gajah Mada tentang "kesatuan nusantara". Orang-orang Jawa sudah ada pada saat Kesultanan Aceh, dapat dibuktikan bahwa di sekitar istana ada nama desa Jawa (Sudirman, 2009: 176). Tahap kedua, mereka hadir di era pascakemerdekaan yang ditandai dengan bergulirnya program transmigrasi.

Kedatangan transmigran etnis Jawa di Aceh mengakibatkan masyarakat Aceh memiliki pandangan tersendiri terhadap transmigran etnis Jawa yaitu bukan sebagai "pelengkap" (*complementer*), tetapi sebagai "pesaing" (*competitor*) bahkan sebagai "musuh" (*rival*) dalam kehidupan pertanian mereka. Pertanian bagi orang Aceh merupakan mata pencaharian tradisional utama yang dimuliakan (*occupational preference*) (Pelly, 1989). Betapa tidak, bahwa sumber daya alam berupa pertanian di daerah Aceh belum menggunakan teknologi canggih, tetapi Aceh merupakan lumbung padi untuk Sumatera dan Kalimantan. Di samping tanah yang subur, dan curah hujan yang cukup, tetapi penduduk Aceh tidak terlalu padat seperti di Sumatera Barat atau di Jawa (Pelly, 1989). Oleh karena itu, kehadiran transmigrasi dari Jawa dipandang orang Aceh sebagai intervensi pemerintah pusat dalam kehidupan pertanian mereka. Rasa tidak senang atau curiga, telah menyusut reaksi yang negatif dari pihak Aceh terhadap transmigran Jawa.

Menyampingkan pemikiran orang Aceh yang menganggap bahwa program transmigrasi merupakan program intervensi pemerintah, proses transmigrasi yang berlangsung dapat dikatakan berjalan lancar. Ditinjau secara historis, Provinsi Aceh termasuk salah satu daerah yang paling akhir menerima transmigran. Lokasi transmigrasi pertama kali dibuka di Aceh pada tahun 1964 di

daerah Blang Peutek, Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan jumlah transmigran sebanyak 100 kepala keluarga (KK) (Suwondo, 1982). Sesuai persebaran pembangunan permukiman melalui transmigran tersebut, hingga tahun 2013 telah dilakukan penempatan transmigran di Aceh mencapai 41.577 KK atau 175.304 jiwa yang tersebar di 158 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam 19 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, teridentifikasi lokasi UPT yang telah menjadi desa/gampong definitif sebanyak 125 lokasi termasuk pemekaran desa. Dalam perkembangannya, persebaran pembangunan permukiman melalui transmigrasi di Aceh terus mengalami kemajuan dengan dibukanya berbagai lokasi transmigrasi lainnya di Aceh. Kehidupan para transmigran di Aceh berjalan cukup baik, terutama dari segi sosial ekonomi dan budaya (Saleh, 2005).

Sebagaimana diutarakan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) menyebutkan bahwa keberadaan transmigran etnis Jawa menunjukkan peningkatan sebesar 400.023 jiwa (15,87%) di seluruh Aceh dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Aceh sebesar 4.486.570 jiwa (50,32%). Artinya, kelompok transmigran etnis Jawa merupakan golongan kedua yang terbesar di Aceh. Keberadaannya hampir dijumpai pada tiap wilayah tingkat dua, seperti di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Utara.

Menurut Abdoellah (1997), kehidupan transmigran etnis Jawa umumnya masih amat terikat pada tanah pertanian. Jarang ditemui sebagai pedagang atau usahawan yang berhasil. Namun demikian, sikap transmigran yang rajin bekerja dan hemat tampaknya cukup memungkinkan menjadi golongan penduduk yang relatif lebih baik status sosial ekonominya. Transmigran etnis Jawa mampu menghadirkan dan menghidupkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang tersebar di seluruh Aceh, yakni

tumbuh menjadi sentra-sentra produksi dan menjadi pemasok sayur-sayuran, buah-buahan dan juga ternak bagi masyarakat.

Meskipun mengalami kemajuan, secara historis keberadaan transmigran etnis Jawa di Aceh tidak terlepas dari terjadinya berbagai konflik berkepanjangan di Aceh. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Aceh memang memiliki sejarah konflik yang sangat lama dan berakar. Namun, sejarah konflik antara masyarakat Aceh dengan etnis Jawa pun ternyata juga memiliki sejarah yang panjang. Konflik tersebut pada akhirnya memunculkan sentimen negatif antara orang Aceh terhadap Jawa.

Sejak agresi Belanda pada 26 Maret 1873 sampai revolusi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Aceh terus bergolak dalam konflik. Hal ini tidak terlepas dari masa transisi yang tidak mapan dan konflik kekuasaan serta ideologi yang merupakan bagian lain yang mendorong lahirnya konflik berkepanjangan tersebut. Sejarah panjang kehidupan masyarakat "Aceh" (komunitas Nanggroe Aceh Darussalam) ditandai oleh berbagai "peristiwa", terbebani oleh berbagai "masalah" sosial politik yang diantaranya bahkan berimplikasi secara nasional maupun internasional. Masyarakat Aceh pernah mengalami kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kemudian dinodai oleh rangkaian peristiwa dan masalah. Masalah dimulai dari tahun 1873 dengan terjadinya perang Aceh selama kurang lebih 30 tahun (Veer, Paul van, 1985). Dilanjutkan dengan pendudukan tentara Jepang, partisipasi masyarakat Aceh dalam perang revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu terjadinya Perang Cumbok (Basral, 2013; Saleh, 1992; dan Sjamsuddin, 1999).

Konflik antara Aceh dan Jawa setidaknya dimulai dari kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai representasi dari etnis Jawa. Ketika Belanda

melakukan penjajahan di Nusantara, kurang lebih 350 tahun lamanya, Aceh juga berjuang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bahkan Aceh memiliki andil besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh juga banyak membantu Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari datangnya kembali gangguan Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Pada Tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan Soekarno dan Hatta di Jakarta, tak lama setelah itu pada 15 Oktober 1945, Aceh menyatakan diri bergabung dengan NKRI.

Pemerintah Darurat Indonesia kemudian langsung mengeluarkan ketetapan mengenai posisi Aceh di dalam Republik Indonesia (NKRI). Ketetapan itu diberlakukan pada 17 Desember No. 8/Des/W.K.P.H yang menetapkan Aceh sebagai sebuah provinsi. Namun, pada 8 Agustus 1950 Dewan menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) menetapkan kalau wilayah RIS dibagi ke dalam 10 provinsi dan Aceh tidak lagi termasuk ke dalam salah satu provinsi. Keputusan itu menggugurkan janji Sjarifuddin Prawiranegara tentang pembentukan Provinsi Aceh. Keputusan pembubaran provinsi Aceh kemudian di umumkan oleh Perdana Menteri M. Natsir yang disiarkan oleh RRI di Koetaradja, Aceh pada 23 Januari 1951. Keputusan tersebut telah melukai perasaan seluruh masyarakat Aceh dan menjadi awal perlawanan Daud Beureueh dengan membentuk sebuah gerakan yang bernama DI/TI (sebelumnya NII) (Akbar, Madya, 1999). Konflik terus berlanjut yaitu ketika pada bulan April 1957, tuntutan masyarakat Aceh tentang hak menerapkan syariat Islam serta daerah otonomi khusus ditindaklanjuti oleh pemerintah Soekarno. Kemudian ditandatangani perjanjian atau ikrar Lam Teh. Hal itulah yang kemudian mengakhiri pemberontakan Muhammad Daud Beureueh. Hubungan antara Aceh dan Jawa mulai membaik.

Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadi kudeta politik yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Soekarno. Setelah Soeharto berkuasa ternyata ia membuat kebijakan yang sangat sentralistik. Daerah istimewa yang dijanjikan dulu tidak pernah ditepati dan bahkan dilupakan. Hal ini memicu kembali kekecewaan rakyat Aceh terhadap Jawa yang merupakan representasi dari Pemerintah Indonesia.

Kekecewaan rakyat Aceh terhadap orang Jawa diperkuat oleh penemuan sumber cadangan minyak dan gas alam terbesar pada tahun 1971 di Arun, Lhokseumawe. Empat tahun kemudian Mobil Oil Indonesia perusahaan raksasa yang bermarkas di Amerika Serikat diberikan hak untuk mengeksploitasi, kemudian disusul oleh berdirinya perusahaan-perusahaan industri besar seperti PT. PIM, PT AAF, PT KKA dan sejumlah industri hilir lainnya. Meskipun Aceh telah ditetapkan sebagai kawasan ZIL (Zona Industri Lhoseumawe) namun keuntungan tidak pernah dirasakan oleh rakyat Aceh. Masyarakat Aceh tetap miskin, seluruh keuntungan mengalir ke pusat. Ekspansi besar-besaran tenaga kerja asing juga terjadi. Sebagian besar birokrat serta posisi-posisi penting di dalam pemerintahan di Aceh dikuasai dan didominasi oleh orang Jawa. Hal inilah yang semakin menumbuhkan kebencian orang-orang Aceh terhadap orang Jawa.

Kekecewaan demi kekecewaan dirasakan oleh orang Aceh terhadap pemerintahan yang dianggap sebagai representasi dari etnis Jawa. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik. Puncaknya adalah, lahirnya kembali sebuah gerakan perlawanan yang diberi nama ASLNF (Aceh Sumatera Liberation Front) atau yang sering disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976.

Bagi orang Aceh, NKRI adalah milik bangsa Jawa. Ini karena fakta politik di masa orde baru etnis Jawa mendominasi struktur

pemerintahan. GAM membangun rasa benci dengan memanfaatkan sentimen etnis tersebut (Susan, 2008). Orang Jawa merupakan musuh historis bagi rakyat Aceh. Dalam hal ini, Hasan Tiro membangkitkan kembali sejarah penjajahan Majapahit terhadap Kerajaan Samudera Pasai sehingga permusuhan dengan pihak Jawa merupakan garis merah atas apa yang terjadi pada masa lalu pada bangsa Aceh. Seiring perjalanan waktu, intensitas perang semakin meningkat. Pemerintah penguasa Orde Baru sedang giat-giatnya merealisasikan program pembangunan serta penyebaran Transmigrasi terutama yang berasal dari pulau Jawa yang kemudian ditempatkan di daerah-daerah terpencil pada saat itu. Tak sedikit transmigran yang berasal dari pulau Jawa membangun pemukiman-pemukiman baru di Aceh. Hal ini semakin menambah kemarahan orang Aceh terhadap Jawa dan tak jarang selama kurun waktu tahun 80-90-an para transmigran menjadi sasaran amarah masyarakat Aceh terutama sekali GAM. Para transmigran banyak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi mulai dari penganiayaan, penculikan terhadap etnis Jawa, pembakaran rumah hingga kehilangan nyawa. Hal ini yang kemudian membuat orang-orang Jawa transmigran merasa terancam hidupnya dan bahkan kebanyakan dari mereka memilih keluar dari Aceh.

Ketika itu orang Aceh sangat membenci orang Jawa. Bagi orang Aceh, Jawa adalah bangsa pengkhianat, meskipun sebenarnya yang patut dibenci adalah oknum pemerintah Indonesia, yang dominan di tempati oleh orang-orang yang beretnis Jawa, namun para transmigran pula tak luput dari teror serta ancaman dan intimidasi. Karena orang Aceh beranggapan, semua orang Jawa adalah penipu, sehingga orang-orang Aceh terutama GAM, telah memersepsikan atau memaknai negatif secara umum terhadap etnis Jawa. Pengusiran dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan (seperti pembakaran rumah dan pembunuhan)

merupakan eksekusi dari sanksi sosial yang dijatuhkan orang Aceh secara sepihak terhadap orang Jawa yang berlokasi di daerah Istimewa Aceh. Namun, di balik eksekusi itu ada berbagai faktor yang berada di luar jangkauan pengusiran yang telah menyebabkan keterasingan warga transmigrasi tersebut (Pelly, 1989).

Konflik yang terjadi terus berlanjut, seiring berjalannya waktu terjadi perjanjian kedamaian diantara kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia atau dikenal dengan istilah MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM akhirnya mengakhiri konflik yang berkepanjangan tersebut. MoU Helsinki ini kemudian dituangkan dalam UU nasional yaitu UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini merupakan babak baru dimulainya kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis serta awal dimulainya pembangunan kembali setelah porak poranda karena konflik dan bencana tsunami.

Pada masa pascakonflik inilah perbaikan program transmigrasi semakin digalakkan. Berbekal situasi yang telah aman dan keyakinan para transmigran yang masih berada di luar Aceh bersedia kembali ke UPT masing-masing, pemerintah mengimbau agar mereka menjalani hidup kembali di Aceh. Wacana ini sudah muncul sebenarnya sejak bulan September 2004, tiga bulan sebelum bencana tsunami. Menurut laporan *Tempo*, waktu itu pemerintah memang sedang giat merencanakan pengembalian transmigran asal Pulau Jawa ke Aceh. Program ini akan dijalankan pemerintah dari akhir 2004 sampai awal 2005. Jumlah yang akan dipulangkan ke Aceh sebanyak 736 kepala keluarga atau 3.680 jiwa. Mereka tersebar di pengungsian di Sumatra Utara dan Jambi. Semuanya akan ditempatkan ulang di Kabupaten Aceh Jaya dan

Nagan Raya. Kebijakan pengembalian ini sepaket dengan kebijakan penempatan transmigran baru. Pemerintah akan mendatangkan 12 ribu kepala keluarga atau 60 ribu jiwa transmigran baru asal Jawa di seluruh Indonesia, termasuk Aceh ("Transmigran Asal Jawa Dikembalikan ke Aceh Akhir 2004", *Tempo*, 14 September 2004).

Wacana ini segera mendapat tanggapan. Ketika mulai digulirkan setelah konflik, sejumlah bekas pejuang GAM menyatakan keberatannya. Mereka menolak rencana pemerintah yang ingin mendatangkan transmigran Jawa baru, tetapi tak menolak pengembalian transmigran Jawa yang lama yang sebelumnya mengungsi di luar Aceh karena amuk perang. "Asal bukan transmigran baru yang masuk ke Aceh," kata Juru Bicara GAM, Bakhtiar Abdullah.

Menurutnya, transmigran asal Jawa digolongkan dalam sipil yang terimbas konflik sehingga mereka masuk program reintegrasi pascakonflik di Aceh. Abdullah juga meminta pemerintah tak diskriminatif karena transmigran lokal yang mengungsi dari Bener Meriah dan Aceh Tengah luput dari perhatian. Bukti mantan GAM tak keberatan dengan pengembalian transmigran lama bias dilihat dalam kasus di Aceh Barat. Sebanyak 15 Kepala Keluarga transmigran asal Meulaboh, Aceh Barat, yang mengungsi ke Purbalingga, Jawa Tengah, sudah kembali ke kampung halaman pada dua hari yang lalu. Kepulangan mereka disambut baik para bekas pemberontak di sana. Termasuk oleh jajaran pemerintah daerah setempat. Pemerintah pun berjanji akan membangun kembali permukiman bagi 900 keluarga transmigran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14 miliar ("Gam Tolak Transmigran Baru Asal Jawa", *Tempo*, 15 Maret 2006).

Dengan demikian, para mantan petempur GAM tidak menolak rekonsiliasi. Mereka bahkan mendorong berjalan mulusnya rekonsiliasi pascakonflik antara orang Aceh dengan orang Jawa

yang pernah tinggal di Aceh dan telah mampu membangun hubungan baik dengan orang-orang Aceh di sekeliling sebelum mereka terpaksa melakukan eksodus akibat eskalasi konflik. Bahkan, para bekas anggota GAM berusaha agar hak-hak para transmigran lama dipenuhi oleh pemerintah, yakni dengan memberi perhatian berupa pemulihan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan, antara lain, dengan menolak kedatangan transmigran baru. Dengan adanya gelombang transmigrasi baru, mantan kombatan GAM menilai kebijakan tersebut akan membuat pemerintah kurang memedulikan transmigran lama. Padahal transmigran lamalah yang harus diprioritaskan. Program transmigrasi baru hanya akan membuat pemerintah jadi tidak fokus membenahi kehidupan orang-orang Jawa yang telah lama hidup di Aceh, apalagi memberi perhatian terhadap orang Aceh yang menderita akibat perang.

Penolakan seperti ini tentu tidak terjadi di Desa Bukit Hagu. Ketika konflik berlangsung, sekitar 95 persen transmigran bertahan dan hidup di lokasi dengan berbagai cara dan strategi. Mereka tetap bekerja sebagai petani perkebunan, baik itu petani kebun kelapa sawit, maupun kebun karet. Ada pun sebagian kecil lainnya jadi pedagang; membuka toko kelontongan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok di rumah mereka.

Upaya bertahan lainnya adalah dengan berusaha menyatu dengan penduduk sekitar. Usaha ini tentu saja melibatkan adaptasi atas praktik adat serta tradisi keagamaan setempat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan aset masyarakat yang sangat tinggi nilainya, walaupun sering terjadi konflik yang disebabkan oleh berbagai perbedaan tersebut. Kehidupan beragama yang sarat dengan nilai-nilai luhur perlu ditumbuhkan sikap dan pemikiran yang mampu melihat betapa pentingnya pergaulan yang luas dan sehat, serasi dan harmonis di dalam perbedaan pendekatan dalam menjalankan

kehidupan beragama. Masyarakat transmigran tentu juga memiliki perbedaan dalam menginterpretasi pada pelaksanaan-pelaksanaan agama yang dilakukan. Kadangkala dalam kesehariannya, masyarakat transmigran memiliki pendekatan yang berbeda dengan masyarakat lokal Aceh dalam menerapkan syariat Islam, mengingat banyak organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Namun tujuan akhir dalam pelaksanaan agama tersebut tetap sama untuk menyembah Allah. Perbedaan yang sedikit tersebut mendorong terwujudnya integrasi dalam masyarakat karena mereka secara bersama-sama berada dalam struktur masyarakat yang luas antara transmigran dengan masyarakat lokal.

Selama meneliti di kawasan transmigrasi di Aceh, saya melihat bahwa pra transmigran Jawa dalam beragama mereka lebih memperbanyak praktiknya daripada hanya sebatas perkataan-perkataan di mulut. Hal ini juga penulis peroleh keterangannya dari M. Sholeh yang merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa:

“Kalau dari sudut pandang sosial ekonomi, masyarakat trans, sangat di terima oleh masyarakat Aceh pada waktu itu melalui hubungan dagang. Kalau dalam sudut pandang agama, masyarakat trans, memang sedikit teori jika membahas agama, namun praktiknya langsung lebih baik. Ketika melihat itu oleh masyarakat lokal, sangat berdampak pada penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Mereka senang berteman dengan kita. Kalau dari sudut pandang budaya, makanan khas kadang-kadang dibuat oleh orang Jawa dan masyarakat lokal yang digarap sawahnya oleh mereka diberikan makanan khas tersebut. Secara keseluruhan, masyarakat lokal sangat baik menerima transmigran Jawa”.

Masyarakat lokal yang senang berteman dengan transmigran karena mereka taat dalam beragama dan perilaku mereka yang

sopan santun mewujudkan interaksi sosial yang baik. Pada saat transmigran bekerja di sawah orang-orang Aceh, mereka sering menginap di perkampungan orang Aceh dan sering mengikuti sholat berjamaah. Hal tersebut membuktikan masyarakat Aceh menempatkan transmigran dengan baik dan saling bergaul dalam hal kebaikan. Begitu juga posisi transmigran dalam agama terhadap GAM dan TNI, tetap menjalin hubungan yang baik dalam menjalankan ibadah. Dalam praktik agama, di Buket Hagu, transmigran yang berasal dari Jawa memiliki kemampuan mengaji rata-rata baik sehingga ketika sudah terbentuk dusun-dusun atau blok-blok pada saat itu, mereka yang memiliki kemampuan mengaji yang baik dapat mengajar anak-anak mengaji dan membuat seperti TPA. Bukan masyarakat transmigran saja yang mengikuti kegiatan tersebut, tetapi anak-anak dari masyarakat lokal juga mengikuti program belajar mengaji. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, sarana keagamaan bisa menjalin interaksi sosial yang baik diantara masyarakat transmigran etnis Jawa dengan masyarakat lokal Aceh.

EPILOG

Migrasi dan Transmigrasi

Prof. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A.

Dep. Antropologi - Universitas Gadjah Mada

Migrasi sebagai gejala yang inheren dalam kehidupan sosial manusia sejak mas pra-sejarah. Digerakkan oleh rasa ingin tahu, pertumbuhan populasi, perubahan ekologi, dan bencana dengan gaya lompat kodok nenek moyang berpindah tempat, hingga setelah ribuan tahun, dengan jalan darat maupun jalur laut, mereka sudah menyebar dari Afrika ke seluruh penjuru bumi. Masyarakat purba yang tersebar ini juga memelihara hubungan antar komunitas, jarak jauh maupun jarak pendek, yang dioperasikan dalam rangka pertukaran barang dan pemeliharaan jaringan sosial. Riwayat pelayaran jarak jauh purba antar pulau di Pasifik, pelayaran Nusantara - Afrika, Skandinavia - Amerika, dan Amerika - Pasifik Barat, masih dapat kita kenali hingga saat ini melalui bukti artefak dan linguistik. Pelayaran antar wilayah pre-historik ini tentu saja bukan hanya mempertukarkan benda, salah satu atau dua manusianya juga pasti ada yang tinggal menetap dengan masyarakat yang dikunjungi (Bellwood, 2005).

Pada masa historis, yang ditandai oleh adanya tulisan dan negara, migrasi terus berlangsung dengan tambahan dorongan berupa perdagangan, ekspansi politik, perang dan lapangan kerja. Hasil dari proses ini adalah terbentuknya koloni-koloni bangsa ataupun etnik, serta tumbuhnya komunitas melting pot. Para

pendatang dengan menggabungkan diri dengan masyarakat "asli" yang didatangi. Ada pola pada awalnya para pendatang ini, karena alasan kenyamanan komunikasi dan keamanan sosial, lebih suka hidup berkumpul dengan kaum masing-masing. Namun dalam perjalanan waktu, dibawa oleh kontak sosial yang makin akrab, perkawinan, percampuran pekerjaan batas-batas perkauman tersebut menjadi kian kabur dan pendatang serta masyarakat "asli" bercampur menjadi masyarakat dengan format baru: yang bukan pendatang dan juga bukan masyarakat asli. Metafora cat warna putih dan merah yang dituangkan berdampingan dan lama-lama membentuk warna pink mungkin bisa menggambarkan proses percampuran tersebut.

Migrasi sebagai gejala perpindahan populasi manusia bisa ditinjau sebagai peristiwa politik-ekonomi dan politik-teknologi (Li & Semedi, 2021). Sebagai gejala politik-ekonomi migrasi biasanya melekat dengan introduksi mode produksi baru atau pula modifikasinya untuk menghasilkan materi jenis baru ataupun jumlah yang lebih besar. Kedatangan gelombang pendatang baru dari Indocina ke Kalimantan mungkin pada milenium 2 sebelum Masehi membawa mode produksi pertanian ladang, yang menggeser berburu meramu yang dioperasikan oleh masyarakat yang sudah lebih dahulu bermukim di pulau tersebut (Bellwood, 2005). Peristiwa ini terekam dalam dongeng di kalangan petani, bahwa dulu nenek moyang mereka belajar berladang dari "hantu". Ilustrasi lain politik-ekonomi migrasi adalah pengiriman populasi Afrika untuk dijadikan budak penggarap perkebunan tebu di Karibia pada abad ke 17 dan 18. Industri gula berbasis perbudakan ini menghasilkan kemakmuran yang melimpah ruah bagi para pekebun kulit putih yang menjadi kemudian diinvestasikan sebagai modal revolusi industri di Eropa (Robinson, 2005). Demikian pula dengan migrasi orang Belanda ke Indonesia pada abad ke 19 yang

kemudian melahirkan perkebunan di Jawa, Sumatra dan Kalimantan--yang anehnya terus merajalela sampai saat ini ketika rejim kolonial secara resmi sudah dinyatakan dihapus.

Migrasi juga merupakan proses penciptaan subjek baru, yaitu manusia yang tata hidupnya distruktur oleh relasi yang berkembang dengan kedatangan mereka di wilayah baru atau pula manusia yang tata hidupnya distruktur oleh relasi yang berkembang oleh kedatangan populasi baru di wilayahnya. Gejala ini dapat dikenali melalui konsep umum sehari-hari seperti kaum migran, expatriat, masyarakat plural, orang Jawa Tondano, orang Jawa Deli, orang Cina Indonesia, Minang Jakarta, Ambon Jawa dan seterusnya. Manusia yang terkena konsep di atas adalah subjek-subjek baru yang dibentuk oleh migrasi. Kehidupan sehari-hari mereka merupakan campuran atau peleburan dari tradisi, kebiasaan, simbol yang dibawa dari kampung halaman dengan tradisi, kebiasaan dan simbol masyarakat yang didatangi. Mungkin secara emosional para pendatang ini ingin tetap memelihara tradisi asal, namun mereka harus menyesuaikan hidup dengan keadaan baru. Melalui proses ini muncullah, misalnya orang Cina Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia dengan logat daerah yang kental, dan setelah dua atau tiga generasi mereka tidak lagi bisa berbahasa Hokian atau pula Mandarin. Jika diamati lebih dekat mungkin semua komunitas yang membawa nama tunggal; entah itu Jawa, Sunda, Betawi, Lampung, Dayak, Bali pada dasarnya adalah masyarakat melting pot produk migrasi selama puluhan generasi.

Sebagai gejala sosial, secara tradisional migrasi tidak menimbulkan masalah. Ataupun jika ada masalah segera dapat diselesaikan melalui proses amalgamasi. Migrasi menjadi bermasalah, ketika perpindahan populasi manusia ini diprogramkan oleh pemerintah dan diisi dengan muatan-muatan politik-ekonomi yang sebenarnya berada di luar kepentingan para migran (Levang,

2003; Levang & Sevin, 1990). Mereka berpindah karena ingin menemukan dan membangun kehidupan baru yang lebih baik, namun ketika pemerintah campur tangan perpindahan tersebut dimuati dengan semangat "nation building"; dimuati dengan semangat menciptakan komoditi baru yang didasarkan pada mitos kolonial bahwa masyarakat yang didatangi adalah "pribumi malas" yang tidak paham mode produksi modern (Alatas, 1977).

Dua hal itulah yang membuat transmigrasi berbeda dengan migrasi.

Turut campur pemerintah dalam migrasi atau bahkan penggunaan migrasi sebagai program nation building atau pula penciptaan komoditi baru, menimbulkan perkara ikutan yang membuat migrasi jadi bermasalah. Dalam rangka membuat proyek nation building atau penciptaan komoditi baru berjalan lancar, pemerintah tidak segan memberikan subsidi melimpah kepada para transmigran. Mereka diberi tanah, perumahan, bantuan hidup, struktur desa baru dengan biaya dari APBN. Tentu saja ada korupsi disini, namun yang pasti para transmigran tetap mendapat subsidi. Guna menjaga kelangsungan misi penciptakaan komoditi baru, oleh pemerintah, transmigran ditempatkan dalam desa baru tersendiri, terpisah dari masyarakat setempat. Perlakuan ini menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan mesyarakat setempat, mereka mengevaluasi transmigran sebagai "anak emas Suharto". Sementara masyarakat setempat yang diminta tanahnya untuk desa dan kebun trasmigran tidak mendapatkan apa-apa. Pemukiman dan pemerintahan desa yang terpisah dari masyarakat setempat juga membuat transmigran tidak mudah berintegrasi dengan masyarakat setempat dan sangat menghambat proses amalgamisasi antara pendatang dan "warga asli". Perbedaan ini menjadi semakin sukar dijumpatani ketika para transmigran dilibatkan atau mengembangkan mode produksi yang tidak sejalan atau secara

moral bahkan bertolak belakang dengan praktik di kalangan masyarakat setempat. Hal terakhir ini bisa menjadikan para transmigran, meminjam istilah Olaf Smedal's (2013), "parasitic on a local situation and ... runs against its spirit".

Keadaan seperti itulah yang dengan rinci disajikan oleh Ibrahim Chalid dalam studi ini berdasarkan pada data etnografi historis di Aceh.

Pustaka

- Alatas, S. H. (1977). *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass and Company.
- Bellwood, P. (2005). *First Farmers. The Origins of Agricultural Societies*. Malden: Blackwell Publishing.
- Levang, P. (2003). *Ayo ke tanah sabrang: transmigrasi di Indonesia. Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Levang, P., & Sevin, O. (1990). *80 Years of Transmigration in Indonesia, 1905 -1985*. Jakarta: Departemen Transmigrasi and ORSTOM.
- Li, T. M., & Semedi, P. (2021). *Plantation Life. Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zones*. Durham: Duke University Press.
- Robinson, C. (2005). *Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition*. Chapel Hill: UNC Press.
- Smedal, O. H. (2013). *Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia* (Vol. 36). Leiden: Brill.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2007. *Sosiologi Pendidikan dan Dakwah*. Cirebon: STAIN Press.
- Adnan, H, dan Yentirizal. (2008). *Adaptasi Kelembagaan dan Aksi Kolektif Masyarakat terhadap Program Transmigrasi dalam Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. Jakarta: Center of International Forestry Research (CIFOR).
- Aguswandi, dan Zumner, W. (2008). *From Politics to Arms to Politics Again: The Transition of the Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement-GAM)*. Berlin: Berghof Research Center fo Constructive Conflict Management.
- Akbar, Madya. 1999. *Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Ali, Fachry, 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Alihar, F. 2012. "Transmigran dan Trauma Konflik Aceh". *Jurnal Ket transmigrasian*, Vol. 29 No. 2 Desember 2012.
- Angelsen, A, dan Rudel, T. K. 2013. "Designing and Implementing Effective REDD+ Policies: A Forest Transition Approach". *Review of Environmental Economics and Policy*, 7 (1).
- Anwar, Y. 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Anwar. 2004. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arsip Setwapres, *Golongan Karya di daerah Aceh Pemilu 2 Mei 1977*, nomor arsip HB IX 495-7.
- Barton J, Emery M, Flood R, *et al.* 2004. "A Maturing of Systems Thinking? Evidence from Three Perspectives", *Systemic Practice and Action Research*, Vol. 17.
- Bogdan, R., dan Taylor, S. J. 1975. *Introduction to Qualitative Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: Wiley Online Library.
- Bratakusumah, D. S, dan Solihin, D. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brinkerhoff, David B., Suzanne T. Ortega, dan Rose Weitz. (2011). *Essentials of Sociology*. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
- Brown, L. R. 1982. "Building a Sustainable Society". *Society*, 19 (2).
- Buchori, Mochtar, 1982, "Pola Tingkah Laku Birokrasi sebagai Akibat Pengaruh Kebudayaan", *Prisma*, 6 Juni 1982.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Calhoun, C. 2010. *Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science*. Columbia: Columbia University Press.
- Chilcott, J. (1998). Structural-Functionalism as a Heuristic Device. *Anthropology and Education Quarterly*, 29 (1).
- Creswell, J. W, dan Garrett, A. L. 2008. "The Movement of Mixed Methods Research and the Role of Educators", *South African Journal of Education*, 28 (3).
- Dale A, Vella, K, dan Potts R. 2013b. "Governance Systems Analysis: A Framework for Reforming Governance Systems". *Journal of Public Administration and Governance*, 3 (3).
- Djumala, D. 2013. *Soft Power untuk Aceh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Durkheim, E. 1970. *Suicide: A Study in Society*. London: Routledge.
- Elmhirst, R. 2012. "Displacement, Resettlement, and Multi-Local Livelihoods: Positioning Migrant Legitimacy in Lampung, Indonesia", *Critical Asian Studies*, 44 (1).
- Emiliana. 1997. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Garna, K. Judistira. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Garner, Roberta & Black Hawk Hancock. (2014). *Social Theory: Continuity and Confrontation: A Reader, Third Edition*. Toronto, Ontario: University of Toronto Press Incorporated.
- Ghani, Y. A. (2008). *Status Aceh dalam NKRI*. Denmark: Institute for Ethnic Civilizations Research.
- Giddens, A. (2013). *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. John Wiley & Sons.
- Hadi, S. (2006). *Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hamilton, Peter. (1990). *Reading from Talcott Parsons*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Harper, D. (2011). *Structural-Functionalism: Grand Theory or Methodology*. Leicester: University of Leicester.
- Henslin, J. M. (2006). *Essentials of Sociology: A Down to Earth Approach*. Boston: Allyn and Bacon.
- Hoey, B. A. (2003). Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional Communities Through Transmigration. *Ethnology*. 109-126.
- Horton, P. B., Hunt, C. L., & Ram, A. (1989). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Hoshour, C. A. (1997). Resettlement and the Politicization of Ethnicity in
- ILO. (2010). *Memahami Defisit Kesempatan Kerja Produktif dan Menetapkan Target*. Organisasi Perburuhan Internasional.

- John Hutchinson and Anthony D. Richardson, H. W., & Bae, C. (2005). *Globalization and Urban Development*. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasim, M., & Karim, S. (2006). *Karakteristik kemiskinan di Indonesia & Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus, Padang Pariaman*. Jakarta: Penerbit Indomedia.
- King I. (1981). *A Theory for Nursing—Systems, Concepts, Process*. New York: Delmar Publishers Inc.
- King, I.M. (1999). A Theory of Goal Attainment: Philosophical and Ethical Implications. *Nursing Science Quarterly*, 12(4), 292-296.
- Kingsbury, N., & Scanzoni, J. (2009). *Structural-Functionalism*. In *Source book of Family Theories and Methods (pp. 195-221)*. Springer. Boston: MA.
- Kitchen, D. P. (2016). *Structural Functional Theory*. Encyclopedia of Family Studies, 1-7.
- Krech, David, C.R.S., and Ballachey, E.L. (1962). *Individual in Society, A Textbook of Social Psychology*. Tokyo: Graw-Hill.
- Lucas, J. W. (2007). *Structural Functional Theory*. The Blackwell Encyclopedia of Sociology.
- MacAndrews, C. (1978). Transmigration in Indonesia: Prospects and Problems. *Asian Survey*. 18(5), 458-472.
- Malalatoa. (1997). *Kajian Etnografi dan Pembangunan di Indonesia, dalam EKM. Mansinambow (ed.), Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. London: Routledge & Kegan Paul.

- Manay, H. (2016). Proyek Demografi dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional: Studi Tentang Transmigrasi di Gorontalo, 1950-1960. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 93-106.
- Merton, R. (1949). *Social Theory and Social Structure*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mohd, A. (2011). *11 Teori dan Prinsip Motivasi di Tempat Kerja*. Jakarta: PTS Professional.
- Moleong, L. J. (2000). *Metoda Kajian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5 (1).
- O'connor, C. M. (2004). Effects of Central Decisions on Local Livelihoods in Indonesia: Potential Synergies Between the Programs of Transmigration and Industrial Forest Conversion. *Population and Environment*, 25(4), 319-333.
- Patilima, Hamid. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pelly, Usman. (1989). *Hubungan Antara Kelompok Etnis*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poloma, Margaret. (2005). *Contemporary Sociological Theory, terjemahan oleh tim Yasogama, Cetakan ke 5*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Prasetyo, S.A. (2009). *Background and Political Situation in Aceh. In S.A. Olle Tornquist, & T. Birks (Ed), The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Jakarta: PCD Press Indonesia & ISAI.
- Prabowo, Hendro. Suparman, Agus. "Masalah Etnisitas dan Tata Ruang di Indonesia". Universitas Gunadarma: Proceeding Seminar Nasional PESAT 2005.
- Radcliffe-Brown, A. (1935). "On the Concept of Function in Social Science", *American Anthropologist*, 37(3): 394–402.
- Ratminto, R. (2004). Prospek Kelembagaan Transmigrasi: Demokratisasi Administrasi Program Transmigrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Ritzer, G. (2007). *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer. (2004). *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robert K. Merton. (1949). *Manifest and Latent Function, dalam R.K. Merton Sosial Theory and Sosial Structure*. New York: Free Press.
- Rohmah, Nurlaeli. Rangkuty, Putra Rakhmadsyah. Rizki, Dini. "Adaptasi Masyarakat Transmigrasi pada Masa Konflik Aceh (Studi Kasus di Desa Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah)", *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Saleh, H. H. 2005. *Transmigrasi Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Saleh, H. Heriawan., *et.al.* (2013). *Naskah Akademik: Arah Kebijakan Ketransmigrasian Tahun 2015-2019*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian.
- Sanderson, S. K. (1993). *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Penerjemah F. Widjidi dan S Menno). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sapta, F., & Supartono. (2005). *Gambaran Umum Kondisi dan Penyebab Kemiskinan*. Jakarta: Kikis Pers.
- Schulze, K.E. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organizations*. Washington: East West Center.
- Setijo, P. (2010). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, N. H. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1). Simatupang. (1978). *Pemberontakan di Indonesia*. Majalah Prisma (7). 8-9
- Singgih, E. G. (2004). *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sjamsuddin, N. (1984). *Issues and Politics of Regionalism in Indonesia: Evaluating the Acehnese experience*. In J.-J. L. Vani, *Armed Separatism in Southeast Asia* (pp. 111-128). Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Smart, J. (2003). Ethnic Entrepreneurship, Transmigration, and Social Integration: An Ethnographic Study of Chinese Restaurant Owners in Rural Western Canada. *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, 311-342.

- Soegiharto, S. (2009). *Transmigrasi: Belajar dari Kisah Sukses*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekiman & Yulianto. (1997). *Dimensi Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal di Provinsi Lampung*. Dalam Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad, *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspa Swara.
- Sofyan, A. F. (2013). "Pengaruh Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (3).
- Spencer, H. (1899). *The Principles of Sociology*. New York: Appleton & Company.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sugihartati, R. (2014). *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. (2004). *Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons*. Policy Studies 3-East West Center. Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sumawinata, S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, P. (1992). Kata pengantar dalam *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, ed. Roland Robertson, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparno, E. (2009). *Paradigma Baru Transmigrasi: Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia.

- Suprpto, (1987). *Sosiologi dan Antropologi*. Bandung: CV Rajawali.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susan. (2008). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Konrtemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Susanto, (1983). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sutrisno, I. H, *et al.* (2015). Conflict and Assimilation (Case Study of Javanese Among Acehese in Langsa 1955-2006). *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 20, Issue 5, Ver. II (May. 2015).
- Suwondo. (1982). *Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Swasono, S. E. (1973). Some Notes on the Nurturing of the Indonesian Entrepreneur. *Indonesian Quarterly*. 1, 51-64.
- Swasono, Sri Edi dan Singarimbun, Masri (ed). (1985). *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syarifuddin. (2000). *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Cidencindo Pustaka.
- Syawaludin, M. (2015). Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan: Telaah atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2).
- Tjandra, I. H. (2004). *Motiv-8*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono. "Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan Nasional". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLIV, No.4, 1996.
- Trijono, Lambang. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Turner, J. H. (2010). Natural Selection and the Evolution of Morality in Human Societies. *In Handbook of the Sociology of Morality*. Springer. New York: NY.
- Urry, J. (2000). *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- Ustman, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Dijk, K. (1981). *The Indonesian State: Unity in Diversity*, in S. Mitra (ed.), *The Post Colonial State in Asia*, London: Wheatsheaf.
- Van Lottum, J., & Marks, D. (2012). The Determinants of Internal Migration in a Developing Country: Quantitative Evidence for Indonesia, 1930–2000. *Applied Economics*, 44 (34).
- Veer, Paul van. 1985. *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hugronje*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Warsito, Rukmadi. (1984). *Pengantar: Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Pemukiman*. Jakarta: CV Rajawali.
- Whitten, A. J. (1987). Indonesia's Transmigration Program and Its Role in the Loss of Tropical Rain Forests. *Conservation Biology*, 1(3), 239-246.
- Widjanarko, T., & Sambodja, A. S. (1999). *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*. Cita Putra Bangsa.
- Wirawan. (2006). Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri. *Ringkasan Disertasi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Yin, Robert. K. (1996). *Case Study Research: Design and Methods, Third Edition*. California: Sage Publication.

BIODATA



Dr. Ibrahim Chalid, S. Sos., M. Si. lahir di Beureuneun, 9 September 1972. Menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Antropologi, Universitas Sumatera Utara dan dinyatakan lulus pada tahun 2000. Gelar magister sains di bidang antropologi sosial diraih setelah menyelesaikan pendidikan Magister Antropologi di Universitas Negeri Medan pada tahun 2011. Kemudian menyelesaikan studi doktoral pada Program Studi S3 Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2019.

Sejak menjadi mahasiswa pada jenjang sarjana, Ibrahim Chalid telah aktif melakukan advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan pada kelompok-kelompok marginal. Pada periode tahun 1998-2001, bersama aktivis Kontras Medan intens mendampingi dan mengadvokasi korban kekerasan konflik Aceh. juga mendampingi eksodus transmigran etnis Jawa dari Aceh ke Medan sebagai akibat konflik politik berkepanjangan antara GAM dengan pemerintah pusat. Pada periode rentang waktu yang sama, bersama para

aktivis dari YPRP (Yayasan Pembela Rakyat Pinggiran) mengadvokasi kebijakan marginalisasi yang dialami oleh kaum miskin kota (Abang Becak Kota Medan). Tahun 2002, Ibrahim Chalid turut merintis berdirinya program studi Antropologi di Universitas Malikussaleh, Aceh Utara. Saat ini, tercatat sebagai dosen tetap program studin Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. secara rutin menerbitkan tulisan hasil riset dalam bentuk artikel dan buku.

“Transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk ke daerah lain dengan tujuan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Buku karya Ibrahim Chalid menunjukkan pada kita bahwa di balik tujuan mulia pelaksanaan program transmigrasi ternyata menyimpan problem yang tidak mudah. Terutama proses adaptasi pendatang dan reaksi penolakan penduduk lokal. Buku ini berhasil membongkar situasi problematik yang belum banyak dikupas peneliti lain.”

Prof. Dr. Bagong Suyanto
(Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya)

“Transmigrasi atau migrasi secara umum di banyak tempat menimbulkan ketegangan antara etnik pendatang dan etnik setempat. Di Kalimantan Barat, misalnya, terjadi ketegangan antara etnik pendatang Madura dan etnik lokal Dayak. Lalu, di Lampung berlangsung ketegangan antara etnik pendatang Bali dan warga lokal Lampung. Kisah berbeda terjadi di satu kampung di Aceh, ketika transmigran beretnis Jawa menyatu dengan warga lokal Aceh seperti diungkap dalam buku ini. Ibrahim Chalid dengan pendekatan antropologisnya dalam buku ini telah menampilkan studi amat berharga bagi dunia akademik dan pengambilan kebijakan, yakni faktor-faktor yang dapat mewujudkan kohesi sosial antara warga pendatang dan warga lokal.”

Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si.
(Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia)

“Buku ini mengantar pembaca pada pengembaraan kronik transmigrasi yang telah berlangsung sejak era kolonial dan semakin masif pada Orde Baru. Termasuk problem yang menyertainya berupa konflik sosial yang mendera negeri ini pada masa awal reformasi. Buku ini wajib dibaca oleh para pengambil kebijakan, akademisi, aktivis sosial, mahasiswa, dan para peneliti sosial budaya.”

Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN. Eng.
(Rektor Universitas Malikusaleh)

“Buku ini menyoroti masalah transmigrasi dari sisi aspek sosial, khususnya berkenaan dengan kemampuan interaksi antara penduduk transmigran Jawa (pendatang) dan penduduk lokal Aceh dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan antaretnis. Temuan yang menarik dari buku ini adalah bahwa di tengah perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, masyarakat Jawa di Gampong Bukit Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, mampu memelihara keseimbangan hidup sosial mereka dengan TNI, GAM, dan masyarakat lokal Aceh. Kiat-kiat hidup bersosial yang ditunjukkan, khususnya oleh elite penduduk Gampong Bukit Hagu memperlihatkan pentingnya peran aktor dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah kuatnya sentimen SARA dalam pusaran konflik separatisme di Aceh. Buku ini menarik untuk dibaca karena bisa menjadi *lesson learned* bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dalam membangun persatuan Indonesia. Ketika banyak masyarakat transmigran Jawa yang terusir di Aceh, masyarakat transmigran Jawa di Gampong Bukit Hagu tetap hidup stabil dan rukun dengan masyarakat lokal Aceh.”

Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D.
(Peneliti Ahli Utama BRIN)

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

cs@deepublish.co.id

Penerbit Deepublish

@penerbitbuku_deepublish



Kategori : Transmigrasi

ISBN 978-623-02-6439-9



9 786230 264399